

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**MEMPERKUAT POSTUR PERTAHANAN  
GUNA MENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)**

Oleh :

**Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar**  
**Brigadir Jenderal TNI**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2023**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“Memperkuat Postur Pertahanan Guna Menjaga Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Pengangkatan Tutor Taskap bagi para peserta PPSA XXIV untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang Temanya telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA XXIV di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2023  
Penulis



Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar  
Brigadir Jenderal TNI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar  
Pangkat : Brigadir Jenderal TNI  
Jabatan : Staf Khusus Kasad  
Instansi : TNI AD  
Alamat : Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke XXIV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
  - Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Agustus 2023  
Penulis

Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar  
Brigadir Jenderal TNI

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Brigadir Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar  
Peserta : Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun 2023  
Judul Taskap : Memperkuat Postur Pertahanan Guna Menjaga Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2023, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

**\*\*coret yang tidak diperlukan**



Surya Dharma, S.I.P  
Marsda TNI (Purn)

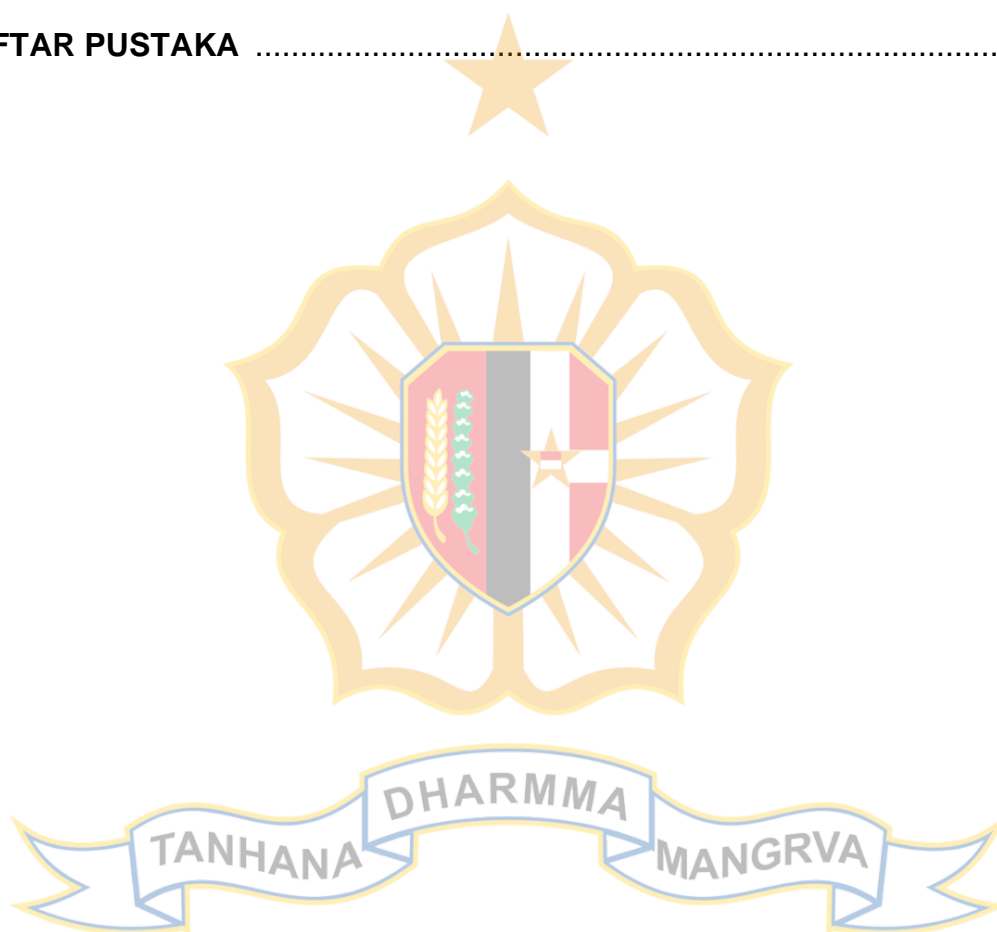
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Maksud dan Tujuan .....	8
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	8
5. Metode dan Pendekatan .....	11
6. Pengertian .....	11
<b>BAB II LANDASAN PEMIKIRAN</b> .....	<b>14</b>
7. Umum .....	14
8. Peraturan & Perundang-undangan.....	14
9. Data dan Fakta.....	19
10. Kerangka Teoretis .....	30
11. Lingkungan Strategis.....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>
12. Umum .....	40
13. Kondisi Postur Pertahanan : iv Ini dan Masalah yang Dihadapi Dalam Menjaga Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) .....	41
14. Dampak dan pengaruh dari lemahnya Postur Pertahanan terhadap	

Keamanan IKN .....	48
15. Penataan dan peningkatan postur pertahanan secara terpadu guna Mengamankan IKN.....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	86
16. Simpulan .....	86
17. Rekomendasi .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	91



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR. 1	GELAR KEKUATAN TDM DI SABAH DAN SERAWAK
GAMBAR. 2	AXIS ANCAMAN ASPEK LAUT
GAMBAR. 3	POTENSI ANCAMAN ASPEK UDARA
GAMBAR. 4	GELAR SATUAN TNI AD DI KALIMANTAN
GAMBAR. 5	GELAR SATUAN TNI AL DI KALIMANTAN
GAMBAR. 6	GELAR SATUAN TNI AU DI KALIMANTAN
GAMBAR. 7	CHINA'S NINE DASH LINE
GAMBAR. 8	SKENARIO RISIKO GLOBAL TAHUN 2023
GAMBAR. 9	GELAR SATUAN TNI DI KALIMANTAN
GAMBAR. 10	MANDALA OPERASI PERTAHANAN TERHADAP ANCAMAN
GAMBAR. 11	PENGINTEGRASIAN POSTUR HAN MILITER DAN NIRMILITER
GAMBAR. 12	STRUKTUR ORGANISASI KOGABWILHAN Es. PELAKSANA
GAMBAR. 13	REKOMENDASI STRUKTUR ORGANISASI KOGABWILHAN
GAMBAR. 14	KONSEP PENGUATAN POSTUR KODAM PENYANGGA IKN
GAMBAR. 15	KONSEP PENGUATAN POSTUR TNI AL DI KALIMANTAN
GAMBAR. 16	VISUALISASI PERTAHANAN UDARA BERLAPIS PENGAMANAN DI IKN
GAMBAR. 17	KONSEP PENGUATAN POSTUR TNI AU DI KALIMANTAN
GAMBAR. 18	VISUALISASI MULTI-DOMAIN OPERATION
GAMBAR. 19	VISUALISASI PROTOKOL ANTI ACCES/AREA DENIAL
GAMBAR. 20	BIFURKASI – PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN IKN
GAMBAR. 21	ANALISIS SKENARIO GANDA – PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN IKN
GAMBAR. 22	FISHBONE DIAGRAM – PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN IKN
GAMBAR. 23	GANTT CHART – PEMBANGUNAN POSTUR HAN IKN

## DAFTAR TABEL

TABEL I	ANALISIS – PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN IKN
---------	--



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Lingkungan strategis dunia, khususnya di kawasan Asia Pasifik, sedang mengalami perubahan yang dinamis dan kompleks. Kebangkitan ekonomi dan politik negara-negara Asia menjadikan kawasan ini sebagai pusat gravitasi dunia saat ini. Tantangan keamanan, klaim teritorial, dan persaingan kekuatan besar mempengaruhi dinamika kawasan. Namun, kawasan ini juga menunjukkan potensi kerjasama yang besar melalui forum besar di kawasan seperti ASEAN dan APEC. Dalam lanskap tersebut, ibu kota suatu negara memainkan peran penting. Sebagai pusat administrasi dan kebijakan, ibu kota mencerminkan bagaimana negara merespon dinamika lingkungan strategis. Ia menjadi cerminan dari identitas, visi, dan posisi strategis negara di kancah internasional. Setiap keputusan yang diambil di ibu kota memiliki dampak langsung pada bagaimana suatu negara berinteraksi dengan aktor lainnya di panggung global<sup>1</sup>. Ibu kota juga adalah tempat di mana aspirasi rakyat terwujud dalam kebijakan dan program, kebijakan nasional dirumuskan dan strategi luar negeri ditentukan. Di sini pula, hubungan diplomatik terjalin, baik melalui perwakilan asing atau kunjungan kenegaraan. Ibu kota juga menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara, mencerminkan perkembangan infrastruktur, teknologi, dan kualitas hidup penduduknya. Dalam konteks geostrategis, posisi geografis ibu kota juga mempengaruhi kebijakan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, di tengah turbulensi geopolitik dan geostrategi, ibu kota negara bukan hanya menjadi representasi fisik suatu negara, namun juga pusat keputusan yang menentukan arah masa depan negara dalam konteks global.

Perpindahan ibu kota negara merupakan fenomena dimana sebuah negara memutuskan untuk memindahkan ibu kota negaranya dari suatu lokasi ke lokasi baru. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik politik, ekonomi,

---

<sup>1</sup> Buzan, Barry, dan Ole Wæver. "Regions and Powers: The Structure of International Security." Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan<sup>2</sup>. Ada beberapa kemungkinan alasan yang mendorong sebuah negara mempertimbangkan perpindahan ibu kotanya. Kemungkinan yang pertama adalah pertimbangan kondisi geografis dan demografis. Salah satu alasan umum adalah ketidakseimbangan demografis dan pembangunan antara ibu kota dan wilayah lain di negara tersebut<sup>3</sup>. Ibu kota yang terlalu padat dapat memicu berbagai masalah, seperti masalah sosial, kemacetan lalu lintas, tekanan pada infrastruktur, dan polusi lingkungan. Memindahkan ibu kota ke wilayah yang lebih luas atau kurang padat dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketegangan ini dan mendistribusi populasi dan sumber daya. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah pertimbangan pembangunan ekonomi. Memindahkan ibu kota bisa menjadi upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sebelumnya kurang berkembang<sup>4</sup>. Adanya kebutuhan untuk meratakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah negara. Sedangkan pertimbangan ketiga adalah terkait faktor pertahanan dan keamanan. Lokasi ibu kota yang strategis sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara<sup>5</sup>. Jika ibu kota suatu negara yang ada saat itu dianggap rentan terhadap serangan militer, bencana alam, atau ancaman lainnya, pemerintah mungkin mempertimbangkan memindahkan ibu kota ke lokasi yang lebih aman. Selanjutnya, pertimbangan lain adalah pertimbangan sosial, dimana perpindahan ibu kota negara memberikan kesempatan untuk memperbaiki masalah sosial yang ada di ibu kota sebelumnya. Perpindahan ini akan memberikan manfaat sosial, seperti peningkatan aksesibilitas dan fasilitas publik serta kesempatan kerja yang lebih luas bagi penduduk. Kemungkinan pertimbangan lain adalah terkait identitas nasional dan simbolisme. Dalam beberapa kasus, pemindahan ibu kota bisa menjadi bagian dari usaha untuk membangun atau memperkuat identitas nasional<sup>6</sup>. Pemerintah mungkin memandang perpindahan ibu kota negara sebagai kesempatan untuk menciptakan suasana yang lebih baik atau memperjelas visi dan tujuan nasional negaranya.

<sup>2</sup> Setiawan, R. (2019). The Dynamics of Capital City Relocation: Comparative Study on Brazil and Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

<sup>3</sup> Florida, R. (2017). The New Urban Crisis. Basic Books.

<sup>4</sup> World Bank (2009). Reshaping Economic Geography. World Development Report.

<sup>5</sup> Tatham, M. (2014). The Politics of Security. Routledge.

<sup>6</sup> Brenner, N., Keil, R. (2006). The Global Cities Reader. Routledge.

Namun, perpindahan ibu kota negara bukanlah keputusan yang mudah. Membutuhkan proses perencanaan yang matang dan implementasi yang cermat, karena dampaknya tidak hanya sebatas pada perubahan administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur dan bahkan aspek pertahanan keamanan. Perpindahan ibu kota akan melibatkan investasi yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan<sup>7</sup>. Beberapa contoh perpindahan ibu kota negara yang terkenal antara lain adalah Brasil, yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasília pada tahun 1960. Nigeria juga memindahkan ibu kota dari Lagos ke Abuja pada tahun 1991. Selain itu, negara Kazakhstan memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana (sekarang Nur-Sultan) pada tahun 1997, dan Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005.

Pemindahan ibu kota negara Indonesia sudah diwacanakan dan direncanakan sejak presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno. Pada tahun 1957 Presiden Soekarno telah menggagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya, saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Akan tetapi rencana ini tidak berlanjut akibat adanya peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965. Selanjutnya pada tahun 1997, presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan. Akan tetapi rencana inipun tidak terlaksana akibat adanya krisis moneter ditahun yang sama dan lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta, yaitu ke wilayah Jawa Barat. Rencana itu belum terwujud akibat pertimbangan anggaran yang cukup besar sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak saat itu, serta pertimbangan faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung. Akhirnya, pada agustus 2019 yang lalu pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur yang kemudian dikenal sebagai Ibu Kota

---

<sup>7</sup> Zakir, I. A., Akhtar, P., & Karim, M. Z. A. (2021). Capital Relocation: Towards New Infrastructure Development. *Journal of Construction in Developing Countries*, 26(2), 39-52.

Nusantara, yang selanjutnya disingkat menjadi IKN. Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh ibu kota Jakarta selama ini, seperti tingginya kepadatan penduduk, permasalahan penataan kota, krisis ketersediaan air, masalah kontribusi ekonomi dan konservasi lahan, pertumbuhan urbanisasi, kerentanan terhadap bencana alam, kontribusi ekonomi nasional dan konservasi lahan yang terpusat pada pulau Jawa, penurunan daya dukung lingkungan dan berbagai tekanan terhadap pengelolaan sumber daya alam<sup>8</sup>. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menjadi dasar pembangunan IKN. Pembangunan ibu kota negara dengan nama Nusantara tersebut mengusung visi “Kota Dunia untuk Semua”, yang mewujudkan kota ideal sebagai acuan pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Pemerintah Indonesia memproyeksikan IKN sebagai *The Best City on Earth*, yang akan menjadi simbol identitas bangsa, kota yang modern dan berstandart internasional, menjadi *smart, green, beautiful and sustainable city*, kota yang memiliki tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat menjadi pendorong pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia<sup>9</sup>.

Dalam pelaksanaannya, proses pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser memiliki tantangan yang sangat besar dan kompleks. Berbagai tantangan tersebut baik dimensi sosial, ekonomi dan politik, termasuk juga dalam dimensi penyelenggaraan Pertahanan Negara. Hal ini dikarenakan pemindahan ibu kota negara ini berimplikasi pada *Center of Gravity (CoG)* negara, dan hal ini akan berpengaruh langsung pada Strategi Pertahanan Negara<sup>10</sup>. Untuk mengawal proses pembangunan dan berjalannya pemerintahan, ibu kota baru memerlukan dukungan Postur Pertahanan Negara yang tangguh, modern, adaptif dan profesional agar dapat memastikan terjaminnya Keamanan Nasional, melindungi infrastruktur penting, serta menjaga stabilitas di wilayah Ibu Kota Nusantara dan termasuk seluruh wilayah Indonesia. Penyusunan dan penyelenggaraan Postur Pertahanan dan strategi pertahanan yang digelar dalam mengamankan Ibu Kota Negara akan sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, seperti contoh di kota DKI Jakarta saat ini, yang didukung

<sup>8</sup> Sambutan Presiden RI pada Rapim TNI – Polri 2022.

<sup>9</sup> Kementerian PPN/Bapennas RI, Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, Juli 2021.

<sup>10</sup> Paparan Menteri Pertahanan kepada peserta PPRA 65 Lemhannas RI, Mei 2023.

dengan Postur Pertahanan yang kuat untuk melindungi ibu kota negara dari berbagai potensi ancaman. Bukan hanya Postur Pertahanan yang tergelar di wilayah DKI Jakarta, akan tetapi juga di wilayah lain diluar Jakarta yang pada akhirnya bertujuan untuk mengamankan ibu kota negara. Sementara Postur Pertahanan untuk mengamankan wilayah IKN masih bersandar pada Postur Pertahanan yang sudah tergelar di wilayah kalimantan saat ini, baik dari Aspek pertahanan darat, laut maupun udara. Kondisi ini dinilai masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan jika dihadapkan dengan berbagai potensi ancaman yang ada terhadap IKN, baik potensi ancaman militer maupun nir-militer. Postur yang ada saat ini belum mampu menghadapi berbagai potensi ancaman, baik ancaman dari darat, laut maupun udara. Postur Pertahanan yang tergelar di wilayah Kalimantan saat ini memang tidak di *design* penuh untuk dapat mengamankan ibu kota negara, banyak celah yang harus ditutup agar tidak berpotensi mengancam keamanan IKN kedepan. Panjang nya perbatasan darat Indonesia dan Malaysia, keberadaan ALKI II yang dekat dengan posisi IKN dan semakin dekatnya posisi ibu kota negara yang baru dengan wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi spot konflik dari negara-negara berkecutan militer kaut. Oleh karenanya, Kementerian Pertahanan telah merencanakan kesiapan perpindahan ini dari aspek Pertahanan dan Keamanan Nasional dengan perumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) 2020 – 2024, serta Kebijakan Pertahanan Negara (Jakhaneg) 2023, yang memproyeksikan penataan Sistem Pertahanan Militer secara terpadu, termasuk di wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi baru IKN dengan memprediksi berbagai kemungkinan ancaman yang cepat berubah. Penataan sistem Pertahanan ini berfokus pada upaya membangun dan memperkuat Postur Pertahanan Negara, khususnya di IKN sendiri, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan secara umum dan juga daerah lain di Indonesia.

Akan tetapi membangun Postur Pertahanan ini, baik militer maupun nirmiliter, dalam rangka mengamankan IKN menemui berbagai kendala, antara lain: terkait masalah anggaran, dimana membangun Postur Pertahanan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Faktor anggaran ini menjadi kendala utama, sehingga harus dialokasikan dengan bijaksana, mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur,



penyediaan personel, peralatan, dan pemeliharannya. Kendala lain adalah terkait dengan Infrastruktur pertahanan dan pendukungnya yang belum tersedia dan belum optimal, dan ini dapat menjadi faktor hambatan dalam membangun dan memelihara kekuatan pertahanan. Selanjutnya faktor geografi Kalimantan, dapat menjadi tantangan dalam membangun pangkalan-pangkalan militer dan juga melakukan berbagai rencana manuver militer. Termasuk faktor pengelolaan lingkungan dan pertimbangan sosial, dimana aktivitas militer harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk meminimalkan dampak lingkungan. Upaya pembebasan lahan untuk membangun pangkalan-pangkalan militer juga dapat berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat lokal setempat. Ditambah lagi berbagai dinamika kepemilikan lahan ulayat masyarakat adat yang terus berpotensi menjadi masalah pada waktu-waktu kedepan.

Dari uraian diatas, dihadapkan pada kondisi nyata postur pertahanan negara dan potensi ancaman yang ada saat ini, dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan di IKN, maka perlu untuk melakukan upaya memperkuat Postur Pertahanan Negara dari kondisi yang ada saat ini. Tanpa postur pertahanan yang kuat dan tangguh, maka kondisi pertahanan dan keamanan di wilayah IKN pada khususnya dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya tidak akan mampu menjawab potensi ancaman, tantangan dan gangguan yang mungkin timbul. Diperlukan suatu upaya yang mampu mengeksplorasi berbagai aspek strategis dalam membangun dan memperkuat Postur Pertahanan Negara, tidak hanya terpaku pada Postur Pertahanan Militer akan tetapi juga diimbangi dengan Postur Pertahanan Nirmiliter. Dimana Postur Pertahan Militer dan Nirmiliter ini meliputi aspek kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan pertahanan di IKN dan juga di seluruh wilayah Indonesia, khususnya terkait dengan proses pembangunan IKN. Hal ini dilakukan dengan membangun Postur Pertahanan Negara secara terpadu, yang diselaraskan dengan pembangunan kekuatan, kemampuan serta pemetaan gelar pertahanan yang dibutuhkan untuk menjawab ancaman dihadapkan pada letak geografis IKN<sup>11</sup>. Strategi yang akan dirumuskan haruslah dapat mengadopsi berbagai aspek yang meliputi pengembangan kekuatan pertahanan dan gelar pertahanan yang ideal, dihadapkan pada perkembangan geo-politik dan geo-

---

<sup>11</sup> Jakum Hanneg tahun 2020 - 2024

strategis Indonesia, serta peningkatan kemampuan pertahanan yang diantaranya meliputi pengembangan teknologi pertahanan, keamanan siber, pengembangan infrastruktur, serta pembangunan sumber daya pertahanan yang profesional dalam rangka mendukung pembangunan IKN. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis dibidang pertahanan-keamanan, upaya untuk memperkuat Postur Pertahanan Negara yang tangguh dan modern diharapkan dapat mendukung keberhasilan proses pembangunan IKN, serta menjamin kedaulatan dan keamanan negara secara keseluruhan. Pada akhirnya melalui analisis yang mendalam, maka akan ditemukan bagaimana upaya ini dapat mendukung pembangunan IKN secara tepat, serta memastikan keamanannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis selaku peserta PPSA XXIV LEMHANNAS RI tertarik untuk mengangkat hal ini menjadi sebuah judul Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) dengan judul : **Memperkuat Postur Pertahanan Guna Menjaga Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN).**

## 2. Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah terkait kajian mengenai upaya membangun Postur Pertahanan dalam rangka mengamankan dan mendukung proses pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu : ***“Bagaimana cara memperkuat Postur Pertahanan guna menjaga pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN)”*** Adapun jabaran dari rumusan masalah tersebut, akan diuraikan narasi pertanyaan sebagai panduan dalam penyusunan tulisan, yang berupa pertanyaan-pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi Postur Pertahanan saat ini dan masalah yang dihadapi dalam menjaga Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN)?
- b. Bagaimana dampak dari lemahnya Postur Pertahanan terhadap keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN)?
- c. Bagaimana menata dan meningkatkan Postur Pertahanan secara terpadu guna mengamankan Ibu Kota Nusantara (IKN)?

### 3. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan tentang upaya yang dilakukan dalam memperkuat Postur Pertahanan Negara guna menjaga pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN).

b. **Tujuan.** Sedangkan tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran peserta kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan tentang upaya memperkuat Postur Pertahanan Negara guna menjaga pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN).

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup pembahasan pada penulisan taskap ini dibatasi pada aspek Pertahanan Negara untuk mengamankan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan melakukan penelitian secara literasi terhadap kondisi Postur Pertahanan Negara di wilayah IKN saat ini, khususnya Postur Pertahanan Militer. Sedangkan analisis strategis dalam tulisan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, serta konstruksi langkah strategis dalam rangka memperkuat Postur Pertahanan Negara guna mengamankan Ibu Kota Nusantara (IKN).

b. **Sistematika.** Adapun sistematika penulisan TASKAP ini disusun sebagai berikut:

- 1) **Bab I : Pendahuluan.** Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan tulisan, ruang lingkup dan sistematika dengan teori-teori, metode dan pendekatan yang digunakan dan definisi serta istilah kunci yang digunakan dalam penulisan. Berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai konsep dan definisi postur pertahanan negara serta pentingnya membangun dan memperkuat postur pertahanan yang tangguh, modern dan adaptif dalam mendukung pembangunan dan mengamankan Ibu Kota Nusantara (IKN).



2) **Bab II : Landasan Pemikiran.** Bab ini pertama-tama menjelaskan tentang berbagai faktor yang menjadi landasan pemikiran dan berpengaruh pada pertanyaan kajian serta pencapaian simpulan yang akan digunakan dalam analisis. Termasuk uraian tentang konsep dasar pemikiran bagaimana membangun dan memperkuat Postur Pertahanan yang tangguh guna mendukung pembangunan dan mengamankan IKN. Bab ini juga akan menguraikan berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait dengan implementasi program pembangunan serta pertahanan di IKN. Beberapa teori dasar inti dan tinjauan pustaka juga akan diartikulasikan dalam bab ini untuk memberikan kerangka teoritis dan dasar logis dalam menyusun dan mengimplementasikan upaya memperkuat Postur Pertahanan, yang dikaitkan dengan program pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya juga akan diuraikan beberapa data dan fakta terkait, serta perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembangunan IKN dan upaya memperkuat Postur Pertahanan Negara di IKN dan wilayah lain di Indonesia.

3) **Bab III : Pembahasan.** Bab ini akan menguraikan tentang berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan postur pertahanan, yang meliputi aspek kekuatan, aspek kemampuan dan aspek gelar kekuatan pertahanan yang modern, tangguh serta adaptif dalam mendukung dan mengamankan proses pembangunan IKN. Postur Pertahanan yang akan dibahas meliputi postur pertahanan militer dan nirmiliter serta bagaimana keduanya harus diperkuat secara terpadu. Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, akan dibahas juga berbagai ancaman dan tantangan keamanan yang mungkin dihadapi dalam proses pembangunan IKN, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Tinjauan mengenai dampak serta pengaruh dari lemahnya postur pertahanan terhadap Keamanan IKN. Selanjutnya Strategi dan pendekatan yang dapat digunakan dalam menata dan meningkatkan kualitas postur pertahanan yang terpadu, terintegrasi

dan efektif dalam mengamankan IKN. Juga menganalisis tentang implikasi geopolitik yang perlu diperhatikan dalam merancang postur pertahanan untuk Ibu Kota Nusantara, seperti hubungan dengan negara-negara tetangga dan isu-isu keamanan regional dan global. Dan akhirnya berbagai langkah yang harus dilakukan dalam membangun postur pertahanan yang adaptif terhadap perubahan dinamis di lingkungan keamanan regional dan global dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Semua analisa dalam pembahasan senantiasa dikaitkan dengan data / fakta, peraturan perundang-undangan, teori dan metodologi analisis yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya.

4) **Bab IV : Penutup.** Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari uraian pembahasan pada Bab sebelumnya, dan rekomendasi dalam rangka mendukung terwujudnya langkah strategis yang telah diuraikan guna memperkuat Postur Pertahanan Negara yang tangguh dalam rangka mendukung pembangunan dan mengamankan Ibu Kota Nusantara (IKN).

## 5. **Metode dan Pendekatan**

a. **Metode Analisis.** Pembahasan dan penulisan naskah ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, melalui metodologi analisis PESTLE, *Risk and Impact Analysis (analisa risiko dan dampak)* dan *Scenario Building and Planning* yang didasarkan pada data-data hasil *literature review*, observasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengamatan di lapangan terkait dengan upaya memperkuat Postur Pertahanan Negara guna menjaga pertahanan dan keamanan IKN. Sedangkan sumber data tulisan berasal dari data yang diperoleh dari studi kepustakaan terkait dengan Strategi Pertahanan Negara, Doktrin Pertahanan Negara dan Postur Pertahanan Negara serta Ibu Kota Nusantara (IKN).

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini dilakukan dengan pendekatan empiris dan studi kepustakaan, melalui perspektif

kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin yaitu melalui tinjauan berdasarkan aspek keamanan dan kesejahteraan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. Dengan menggunakan fakta-fakta dari hasil pengamatan dan pengalaman selama bertugas di dunia militer, guna mendapatkan landasan ilmiah serta pemecahan pokok-pokok persoalan dalam perspektif yang akan datang.

## 6. Pengertian

- a. **Pertahanan.** Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara<sup>12</sup>.
- b. **Keamanan.** Bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, tidak mengandung risiko, tenteram dan tidak merasa takut atau khawatir<sup>13</sup>.
- c. **Postur Pertahanan.** Wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan pengeluaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara, terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung<sup>14</sup>.
- d. **Ibu Kota Nusantara (IKN).** Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara Indonesia<sup>15</sup>.
- e. **Potensi ancaman militer.** Potensi ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain<sup>16</sup>.
- f. **Potensi ancaman non militer.** Usaha atau kegiatan potensial selain ancaman militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau

<sup>12</sup> UU NRI No.34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>14</sup> UU NRI No.34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>15</sup> UU RI No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>16</sup> UU NRI No.34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia

berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa<sup>17</sup>.

g. **Ancaman aktual.** Merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman aktual adalah ancaman yang berkembang saat ini, sangat terlihat dan dapat dirasakan akibatnya, yaitu meliputi: ancaman perang psikologikal, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, bencana alam dan lingkungan, separatisme dan pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba<sup>18</sup>.

h. **Ancaman potensial.** Merupakan ancaman yang sifatnya relatif masih bisa diprediksi dengan eskalasi waktu dan kecil kemungkinan akan terjadi. Ancaman potensial dapat berupa konflik terbuka atau perang konvensional yang berasal dari luar negeri dalam bentuk invasi militer, infiltrasi dan sabotase yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan nasional<sup>19</sup>.

i. **Center of Gravity.** Merupakan karakteristik kunci, kemampuan atau tempat dimana menjadi pusat kekuatan militer atau bangsa dalam memperoleh kebebasan bertindak, kekuatan atau kemauan untuk bertempur pada suatu konflik<sup>20</sup>.

j. **Pertahanan militer.** Adalah kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung<sup>21</sup>.

k. **Pertahanan nirmiliter.** Adalah kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> Kementerian Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015.

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> ibid

kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter, yang terdiri dari unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa<sup>22</sup>.

l. **Postur pertahanan militer.** Adalah Postur pertahanan yang diarahkan untuk membangun kekuatan, kemampuan dan gelar Komponen Utama (TNI AD, TNI AU, dan TNI AL), Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung<sup>23</sup>.

m. **Postur Pertahanan nirmiliter.** Adalah Postur pertahanan yang terdiri dari Unsur Utama dan unsur-unsur lain kekuatan bangsa, disusun dan ditata oleh K/L di luar bidang pertahanan. Penataan Unsur Utama dan unsur-unsur lain diharapkan akan dapat terpadu dan berperan sesuai dengan fungsi pada Pertahanan Nirmiliter<sup>24</sup>.

n. **Pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis.** Adalah pertahanan negara kepulauan yang memandang seluruh pulau, perairan Indonesia beserta segala isinya dan ruang udara di atasnya sebagai satu kesatuan utuh, menempatkan pulau-pulau besar sebagai basis utama pertahanan, yang diperkuat dengan pertahanan gugusan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya yang disusun secara berlapis dan saling menutup mulai dari mandala luar, mandala utama, dan mandala dalam, guna mempertahankan seluruh wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>25</sup>.

o. **Kewaspadaan Nasional (Padnas).** Adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan Nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu potensi ancaman. Suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Kementerian Pertahanan RI, Postur Pertahanan Negara 2015

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Bahan Ajaran Lemhannas RI, BS. Kewaspadaan Nasional, hal. 38.

## BAB II

### LANDASAN PEMIKIRAN

#### 7. Umum

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keputusan strategis dan signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa, salah satunya adalah aspek pertahanan dan keamanan. Menyadari pentingnya memastikan keamanan dan kesejahteraan warga negara dalam situasi perubahan ini, penting bagi pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan strategi pertahanan yang efektif untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam konteks geopolitik dan geostrategi, posisi IKN yang berada di tengah-tengah wilayah Nusantara memberikan tantangan dan peluang tersendiri dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Mengingat pentingnya ibu kota sebagai simbol kedaulatan dan pusat pemerintahan, harus ada peningkatan signifikan dalam Postur Pertahanan di wilayah ini.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif dalam pelaksanaan pembangunan dan pengamanan IKN menjadi penting. Peraturan ini tidak hanya akan menjadi dasar hukum dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjamin bahwa semua aspek terkait dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta mampu mengantisipasi dan merespons berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Selanjutnya perlu memperhatikan berbagai data dan fakta serta dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terkait dan berpengaruh terhadap pembangunan Postur Pertahanan di IKN. Dan yang terutama juga adalah berbagai Kerangka Teoritis yang diperlukan dalam menganalisa dan sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan yang akan diajukan dalam membangun Postur Pertahanan.

#### 8. Peraturan dan Perundang-Undangan

- a. **UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Undang-Undang ini menjadi payung hukum yang fundamental dalam pembahasan tulisan ini. Undang-undang ini menetapkan berbagai aspek dari Sistem Pertahanan



Negara, termasuk peran dan kewajiban dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta penentuan kebijakan dan Strategi Pertahanan Negara. Beberapa poin penting dari undang-undang ini yang relevan antara lain:

1) Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Menurut Pasal 9, penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan melalui kebijakan pertahanan negara dan strategi pertahanan negara. Ini berarti bahwa memperkuat Postur Pertahanan di IKN, baik militer maupun nir-militer, harus sejalan dengan kebijakan dan strategi pertahanan negara yang ditetapkan oleh pemerintah.

2) Peran TNI. TNI memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, termasuk di IKN. Menurut Pasal 10, TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara dan melindungi kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara.

3) Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara. Pasal 14 dan 15 menetapkan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara dilakukan melalui pembinaan kemampuan TNI dan komponen cadangan dan pendukung lainnya. Ini berarti bahwa dalam konteks IKN, pembangunan infrastruktur pertahanan, pelatihan pasukan, dan peningkatan kapabilitas teknologi militer akan menjadi bagian penting dari proses ini.

b. **UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.**

Undang-Undang ini membentuk kerangka hukum dan organisasi bagi TNI sebagai pelaksana kebijakan pertahanan negara. UU ini memiliki beberapa elemen penting yang relevan dalam konteks memperkuat Postur Pertahanan dan menjaga keamanan IKN. Pertama, UU ini menegaskan peran TNI sebagai kekuatan pertahanan yang bertugas melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara (Pasal 2). Dalam konteks IKN, pasal ini menegaskan bahwa TNI memegang peran penting dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan wilayah ibu kota. Kedua, UU ini menguraikan

tugas dan wewenang TNI dalam operasi militer perang dan operasi militer selain perang (Pasal 7), yang meliputi penanggulangan ancaman militer dan non-militer. Dalam konteks IKN, pasal ini relevan bagi pengendalian berbagai jenis ancaman keamanan. Ketiga, UU ini menegaskan perlunya peningkatan profesionalisme TNI melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan sumber daya manusia (Pasal 29-35). Pasal ini relevan dalam konteks pengembangan kemampuan dan kesiapsiagaan TNI dalam menjaga keamanan IKN.

c. **UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.** Undang-Undang ini merupakan instrumen hukum yang membahas bagaimana sumber daya nasional di Indonesia dapat digunakan untuk mendukung pertahanan negara. Berikut adalah beberapa poin kunci yang relevan :

- 1) **Penggunaan Sumber Daya Nasional.** Undang-undang ini menguraikan bagaimana sumber daya negara, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, dapat digunakan untuk mendukung Pertahanan Negara (Pasal 5).
- 2) **Kerjasama Antar lembaga.** Undang-undang ini juga mencakup kerjasama antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan (Pasal 10). Dalam konteks IKN, pasal ini bisa berarti kerjasama antara TNI, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan Kementerian / Lembaga lain untuk memastikan penggunaan yang efektif dan berkelanjutan dari sumber daya nasional.
- 3) **Penyelenggaraan Kewajiban.** Pasal 18 undang-undang ini menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab setiap Warga Negara dan Badan Usaha dalam melaksanakan tugas dan peran dalam pertahanan negara. Pasal ini dapat menjadi dasar hukum untuk melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam upaya pertahanan di IKN.

Oleh karena itu, UU No. 3 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum yang penting untuk pengelolaan sumber daya nasional dalam konteks



pembangunan Postur Pertahanan di IKN. Hal ini memastikan bahwa sumber daya negara dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pertahanan dan keamanan di ibu kota baru Indonesia.

d. **UU RI No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).** Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pengelolaan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. UU ini menjadi penting dalam konteks memperkuat postur pertahanan negara di wilayah IKN. Dalam UU ini, pemerintah mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan IKN, termasuk aspek pertahanan dan keamanan. Pasal-pasal dalam UU ini juga merinci tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah IKN. UU ini juga mengatur tentang pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan pertahanan dan keamanan di IKN. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan pangkalan-pangkalan militer, sistem pertahanan, serta fasilitas lain yang dibutuhkan untuk mendukung operasional TNI di IKN. Dengan adanya UU ini, upaya memperkuat Postur Pertahanan Negara di IKN dapat dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, serta didukung oleh landasan hukum yang kuat.

e. **Perpres No 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.** Peraturan Presiden (Perpres) ini merupakan peraturan yang menguraikan strategi dan kebijakan pertahanan negara untuk periode 5 tahun. Perpres ini sangat penting dalam konteks memperkuat postur pertahanan negara di Ibu Kota Negara (IKN). Perpres ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas alutsista, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, hingga peningkatan kerja sama regional dan internasional dalam bidang pertahanan. Dokumen ini juga mencakup peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan upaya-upaya untuk memodernisasi dan meningkatkan kesiapan TNI dalam menjaga pertahanan negara. Dalam konteks IKN, Perpres ini memberikan landasan kebijakan untuk memperkuat Postur Pertahanan Negara di wilayah tersebut, termasuk melalui pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan, penempatan personel

TNI, dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga pertahanan dan keamanan di IKN.

f. **Perpres No 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN.** Peraturan Presiden ini mengatur tentang struktur dan kewenangan dalam pengelolaan dan pembangunan IKN. Perpres ini juga menciptakan entitas baru, yaitu Otorita IKN, yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh aspek terkait dengan pengelolaan dan pembangunan IKN. Hal ini termasuk perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur, regulasi terkait keamanan dan ketertiban, serta kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, dalam menjaga pertahanan dan keamanan di IKN. Lebih lanjut, Perpres ini juga memandu bagaimana Otorita IKN bekerja sama dengan berbagai entitas, baik pemerintah pusat, daerah, maupun swasta, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, Otorita IKN memiliki peran penting dalam menjembatani koordinasi antara pihak TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan IKN tetap aman dan terlindungi. Secara keseluruhan, Perpres No. 62 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang memadai untuk memperkuat Postur Pertahanan Negara di IKN, baik melalui peran langsung Otorita IKN maupun melalui koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan.

g. **Perpres No 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN Tahun 2022-2024.** Perpres ini menjadi fondasi penting dalam merencanakan dan menjalankan kebijakan pertahanan dan keamanan di IKN. RTR KSN IKN ini menjadi pedoman dalam penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, termasuk pertahanan dan keamanan. Perpres ini menggambarkan visi dan arah pembangunan IKN hingga tahun 2024, termasuk tata letak dan fungsi dari berbagai infrastruktur serta pemetaan zonasi. Hal ini mempengaruhi penempatan fasilitas pertahanan dan keamanan, serta menentukan jalur-jalur evakuasi dan mitigasi bencana yang efektif. Secara tidak langsung, RTR ini mempengaruhi kesiapan dan keefektifan operasional TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan di IKN.

h. **Permenhan No. 3 tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara tahun 2020 – 2024.** Permenhan ini adalah instrumen penting dalam pengelolaan dan pengembangan postur pertahanan negara, termasuk untuk keamanan di IKN. Permenhan ini menguraikan rencana strategis yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat postur pertahanan negara dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman keamanan. Permenhan ini mencakup strategi pengembangan kemampuan pertahanan, pemeliharaan kekuatan pertahanan, dan optimalisasi kerja sama pertahanan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada konteks IKN, Permenhan ini memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan dan memperkuat Postur Pertahanan Negara yang efektif dan responsif terhadap ancaman keamanan yang mungkin dihadapi kedepan, khususnya di IKN.

## 9. Data / Fakta

a. **Kondisi Geografi dan Demografi.** Pemahaman tentang kondisi geografi dan Demografi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat penting dalam menyusun strategi pertahanan dan keamanan. Berikut adalah beberapa data dan fakta penting yang harus dipertimbangkan:

1) **Geografi.** IKN berada di Pulau Kalimantan, yang secara geografis posisinya semakin dekat dengan perbatasan darat dengan negara tetangga, baik Malaysia maupun Brunei Darussalam. Termasuk perbatasan laut dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina dan China. Kondisi ini menempatkan IKN dalam posisi yang semakin rentan terhadap ancaman militer langsung dibandingkan dengan lokasi sebelumnya.

2) **Demografi.** Walaupun areal IKN yang akan dibangun saat ini adalah wilayah yang kosong, namun IKN diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan, baik melalui migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia maupun melalui pertumbuhan alami penduduk. Pertumbuhan populasi yang pesat ini dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam konteks keamanan, termasuk manajemen populasi, peningkatan kebutuhan akan infrastruktur dan layanan publik,

dan potensi peningkatan tingkat kejahatan. Komposisi etnis dan budaya penduduk di IKN juga berpotensi menjadi tantangan dalam konteks pertahanan dan keamanan. Dengan adanya migrasi besar-besaran dari berbagai daerah di Indonesia, IKN akan menjadi rumah bagi berbagai suku, budaya, dan agama.

**b. Risiko dan Potensi Ancaman.**

Dalam proses pembangunan dan berjalannya pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), ada beberapa risiko dan potensi ancaman keamanan yang perlu diperhatikan dari perspektif pertahanan dan keamanan<sup>27</sup>.

- 1) Ancaman Non-tradisional. Dengan adanya urbanisasi dan perkembangan teknologi, IKN sangat berpotensi berhadapan dengan berbagai ancaman non-tradisional, seperti kejahatan lintas antar negara, *cybercrime*, radikalisme, dan terorisme. Peningkatan populasi dan perubahan sosial ekonomi juga dapat meningkatkan tingkat kejahatan dan ketidakstabilan sosial<sup>28</sup>.
- 2) Ancaman Fisik. IKN berpotensi menghadapi ancaman fisik seperti bencana alam, yang bisa merusak infrastruktur kritikal dan mengganggu pelayanan publik<sup>29</sup>. Selain itu, perubahan iklim juga dapat membawa ancaman dalam bentuk banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya. Wilayah di Pulau Kalimantan memiliki kerentanan tinggi terhadap bahaya kebakaran lahan dan hutan.
- 3) Ancaman Terhadap Infrastruktur Kritis. Infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, komunikasi, dan transportasi bisa menjadi sasaran

<sup>27</sup> Laksmana, Evan A. "Pertahanan dan Keamanan dalam Perubahan Ibu Kota." CSIS Commentaries, no. DMRU-020-IDN. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2020.

<sup>28</sup> Mustopo, H. "Urbanisasi dan Implikasi Sosial Ekonominya." Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, vol. 2, no. 1, 2012.

<sup>29</sup> Pribadi, K.S., and H. Sengara. "Pencegahan Bencana sebagai Bagian dari Pertahanan Negara." Journal of Defence and Security, vol. 2, no. 2, 2022.

serangan, baik secara fisik maupun *cyber*. Hal ini bisa mengganggu fungsi vital negara dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar<sup>30</sup>.

4) Ancaman dari Dalam. Kondisi demografi yang beragam dan potensi tingginya migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia ke IKN, dapat memicu konflik sosial atau etnis jika tidak dikelola dengan baik<sup>31</sup>.

5) Potensi Ancaman dari Perspektif Geografis. Ibu Kota Nusantara (IKN) berada pada posisi yang sangat strategis, namun mengandung kerentanan terhadap ancaman, yang meliputi<sup>32</sup>:

- a) Perbatasan darat dengan Malaysia sejauh 2.062 Km,
- b) *Trans-Nasional Crime* dan *Terrorist Transit Triangle*,
- c) Dari arah barat, berpotensi adanya konflik terbuka di Laut China Selatan,
- d) Dari arah Timur, potensi kerawanan pada ALKI II,
- e) Dari arah Utara, dekat dengan Malaysia dan masuk dalam jangkauan senjata negara tersebut dan dalam radius jelajah rudal balistik dan rudal *hypersonic* (dari India, China dan Korea Utara),
- f) Mendekati *Flight Information Region* (FIR) negara tetangga (Singapura, Kinabalu, Manila),
- g) Adanya *Five Power Defence Arrangement* (FPDA), Australia, United Kingdom and United States of America (AUKUS), *One Belt One Road* (OBOR) dan *Belt and Road Initiative* (BRI).

6) **Potensi Ancaman Militer Aspek Darat<sup>33</sup>**. Potensi ancaman yang dapat mengganggu pertahanan aspek darat Indonesia adalah perbatasan darat. Selain itu, gelar kekuatan Tentara Darat Malaysia

<sup>30</sup> Permadi, D., and Y. Sudibyo. "Analisis Kerentanan Infrastruktur Kritis dalam Konteks Keamanan Nasional." *Journal of Defence and Security*, vol. 4, no. 2, 2023.

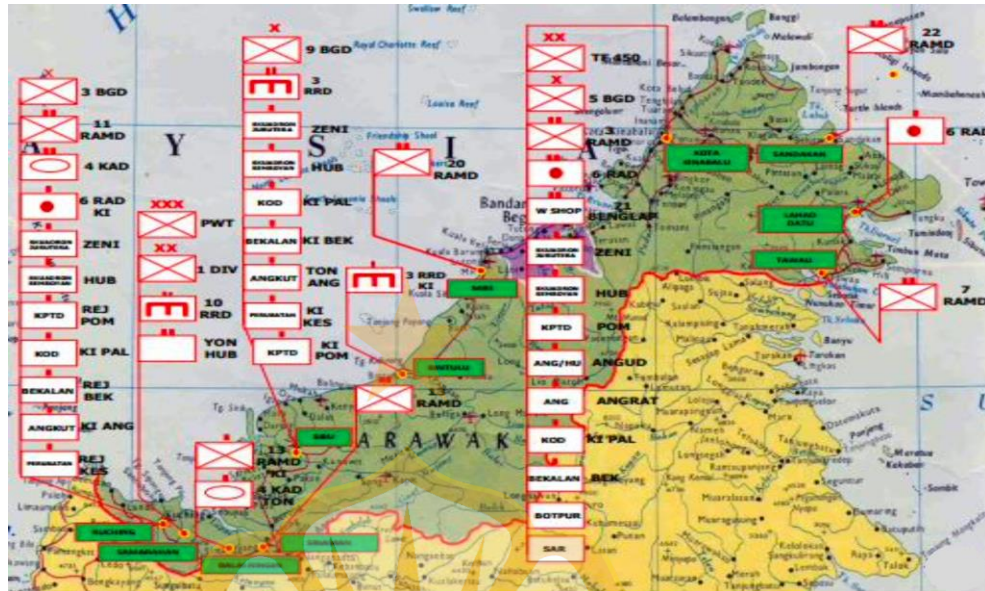
<sup>31</sup> Arifin, Z. "Migrasi dan Potensi Konflik Sosial: Studi Kasus Transmigrasi di Indonesia." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 3, no. 1, 2014.

<sup>32</sup> Paparan Menteri Pertahanan pada peserta PPRA 65 di Lemhannas RI, 5 Juni 2023.

<sup>33</sup> *Perkiraan Ancaman Militer Aspek Darat*, Srenad (2022)



(TDM) di Sabah dan Serawak juga menjadi potensi ancaman militer yang dapat mengganggu stabilitas nasional Indonesia.



**Gambar 1. Gelar Kekuatan TDM di Sabah dan Serawak**

(Sumber: Srenad, 2022)

Gelar kekuatan TDM di wilayah Sabah dan Serawak, sebagai berikut:

- a) Komando Wilayah Timur.
  - (1) 1 Divisi, yang terdiri dari :
    - (2) 3 Brigade yang terdiri dari : 8 Yonif, 1 Yon Zeni, 1 Yon Benglap, 2 Yon Hub, 1 Yon Kes , 2 Ki Pal.
    - (3) 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Ki Zeni, 3 Ki Hub, 3 Ki Pom, 3 Ki Bek, 2 Ki Ang, 1 Ki Angud dan Angrat
    - (4) 4 Resimen Askar Wataniah.
- b) Adapun persenjataan TDM di wilayah Sabah dan Serawak:
  - (1) Kavaleri : PT 91M (172M1Z) MBT, Scorpion 90 mm, Sibmas 90 AFXV, Condor & Stormer APC.
  - (2) Artileri : ASTROS II 300 mm MLRS, G5 MK 3 155 mm Howitzer, FH 70 155 mm, 105 mm meriam ringan, 105 mm Pack Howitzer.
  - (3) Arhanud : Jernas, Starburst (Unit Peluncur) : ANZA MK II & SA 16 IGLA.
  - (4) Sejata anti tank : Bhaktar Shikan ATGW, Metis-M ATGW,

Eryx ATGW, Brofors AT4 LAW & C 90 LAW, Carl Gustav 84 mm PIAT, M40 106 mm Recoilless Rifle.

Kemungkinan ancaman Darat dari wilayah batas RI – Malaysia ini melalui poros jalur wilayah perbatasan, meliputi jalur wilayah batas Sei Manggaris, jalur wilayah batas Seliku dan jalur wilayah batas Krayan.

7) **Potensi Ancaman Militer Aspek Laut**<sup>34</sup>. Potensi ancaman militer aspek laut berasal dari 3 *axis* utama, yaitu:

- a) *Axis* ancaman dari Barat Laut yang merupakan dampak dari Konflik Laut China Selatan, dengan dengan wahana udara.
- b) *Axis* ancaman dari Timur Laut yang merupakan dampak dari kerawanan Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Konflik Blok Ambalat, dengan wahana udara, permukaan laut dan bawah air, dan jalur ALKI II bagian Utara.
- c) *Axis* ancaman dari Tenggara/Selatan yang berasal dari Australia dan sekitarnya dengan wahana udara, permukaan laut dan bawah air, dan jalur ALKI II bagian Selatan.



**Gambar 2. Axis Ancaman Aspek Laut**  
(Sumber: Srenal, 2022)

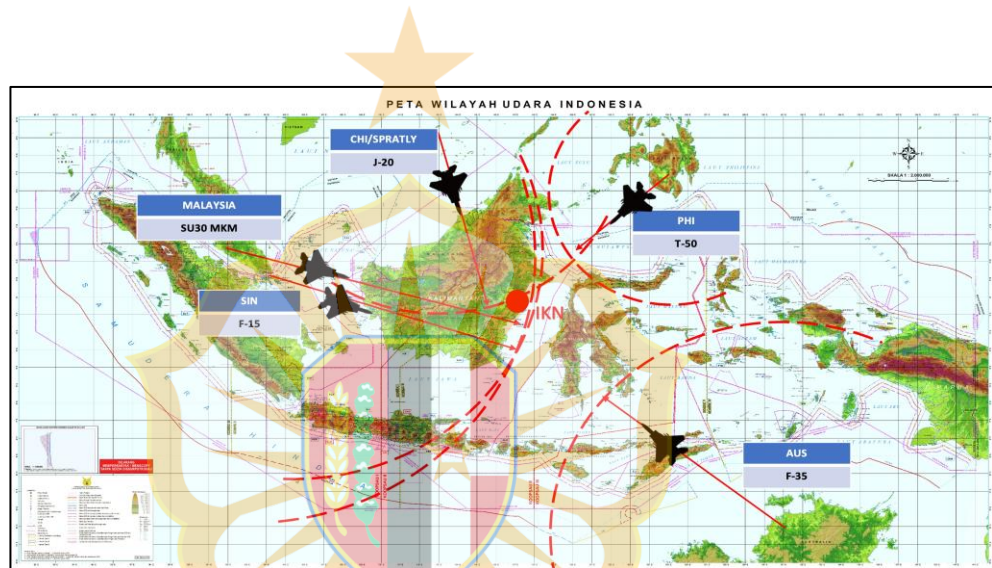
8) **Potensi Ancaman Militer Aspek Udara**<sup>35</sup>. Potensi ancaman aspek udara berasal dari pesawat tempur negara-negara tetangga yang berdekatan dengan lokasi IKN, diantaranya adalah:

<sup>34</sup> Ancaman Militer Aspek Laut, Srenal (2022)

<sup>35</sup> Ancaman Militer Aspek udara, Srenau (2022)

- a) China (Kepulauan Spratly) : pesawat J-20.
- b) Malaysia: pesawat Su-30.
- c) Singapura: pesawat F-15.
- d) Filipina: pesawat T-50.
- e) Australia: pesawat F-35.

Kemampuan yang dimiliki pesawat-pesawat tempur tersebut dapat merusak dan menghancurkan IKN sebagai *center of gravity* pemerintahan dan pertahanan Indonesia.



**Gambar 3. Potensi Ancaman Aspek Udara**  
(Sumber: Srenau, 2022)

Oleh karena itu, Strategi Pertahanan Negara untuk IKN perlu memperhitungkan berbagai potensi ancaman ini. Selain mempersiapkan kemampuan pertahanan dengan membangun Postur Pertahanan Negara yang kuat, juga perlu ada pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi ancaman-ancaman tersebut<sup>36</sup>.

- c. **Kekuatan dan Gelar Kekuatan Satuan TNI di sekitar wilayah IKN.**  
Gelar kekuatan TNI merupakan wujud dan refleksi dari strategi TNI dalam

<sup>36</sup> Satria, A. "Strategi Pertahanan dan Keamanan dalam Konteks Pembangunan Ibu Kota Baru." *Journal of Defence and Security*, vol. 5, no. 1, 2023.



pelaksanaan tugas pokok TNI. Adapun gelar kekuatan kewilayahan TNI, terdiri dari:

1) **Gelar Satuan TNI AD.** Gelar kekuatan kewilayahan TNI AD di wilayah Kalimantan saat ini terdiri dari:

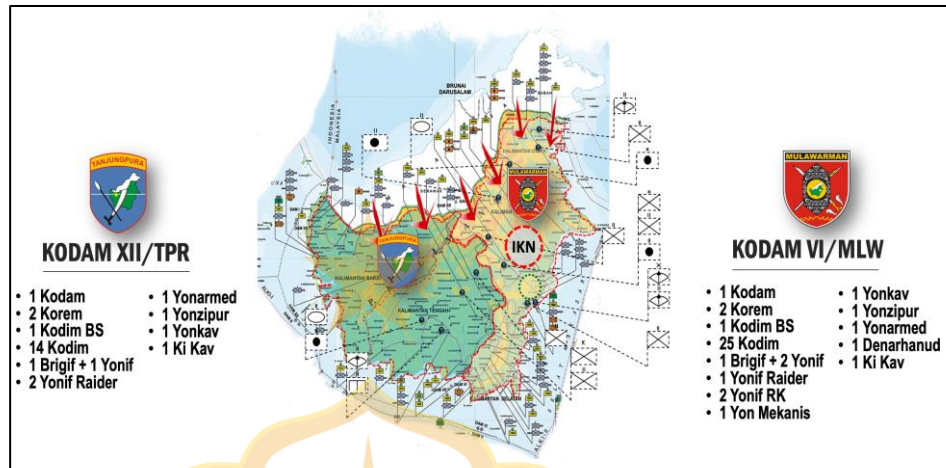
a) Kodam XII/Tpr, dengan gelar satuan terdiri dari :

- (1) 2 Korem (Korem 102/PJG Palangkaraya dan Korem 121/ABW Sintang).
- (2) 15 Kodim (Korem 102/PJG: 7 Kodim, Korem 121/ABW : 7 Kodim dan 1 Kodim BS).
- (3) Brigif 19/ Khatulistiwa di Singkawang (Yonif 645 / Gardatama Yudha di Sangau)
- (4) Yonif Raider 641/Beruang di Singkawang.
- (5) Yonif Raider Khusus 644/Walet Sakti di Putussibau.
- (6) Satuan Bantuan Tempur (1 Yon Armed 16/ Komposit/ Tumbak Kaputing di Ngabang, 1 Yon Zipur 6/Satya Digdaya di Anjungan, 1 Yonkav 12/Beruang Cakti di Peniti, dan 1 Kikav 12/Macan Dahan Cakti di Kubu Raya)

b) Kodam VI/MIW, dengan gelar satuan terdiri dari :

- (1) 3 Korem (Korem 091/ASN Samarinda, Korem 092/Maharajalila di Bulungan dan Korem 101/ANT di Banjarmasin).
- (2) 25 Kodim (Korem 091/ASN 8 Kodim, Korem 092/Maharajalila 5 Kodim, Korem 101/ANT 11 Kodim dan 1 Kodim BS 0905/Balikpapan).
- (3) Brigif 24/Bulungan Cakti (Yonif Raider 613/Raja Alam di Tarakan dan Yonif 614/Raja Pandhita di Malinau).
- (4) Yonif Raider 600/Modang di Balikpapan.
- (5) 3 Yonif (Yonif 611/Awang Long di Loa Janan, Yonif 621/Manuntung di Barabai, dan Yonif 623/ Bhakti Wira Utama di Banjarbaru).
- (6) 6 Satuan Bantuan Tempur (1 Yonkav 13/Satya Lembuswana di Samboja, 1 Yonzipur 17/Ananta Dharma di Samarinda, 1 Yonarmed 18/Buritkang di Berau, 1 Denzipur

8/Gawi Manuntung di Banjarbaru, 1 Denarhanud Rudal 002/Agni Bala Cakti di Bontang dan 1 Kikav 13/Macan Tutul di Samboja).



**Gambar 4 .Gelar Satuan TNI AD di Wilayah Kalimantan saat Ini**  
(Sumber: Srenad, 2022)

2) **Kekuatan dan Gelar Satuan TNI AL.** Gelar kekuatan kewilayahan TNI AL di Kalimantan terdiri dari:

a) Koarmada I membawahi Lantamal XII/Ptk, dengan satuan:

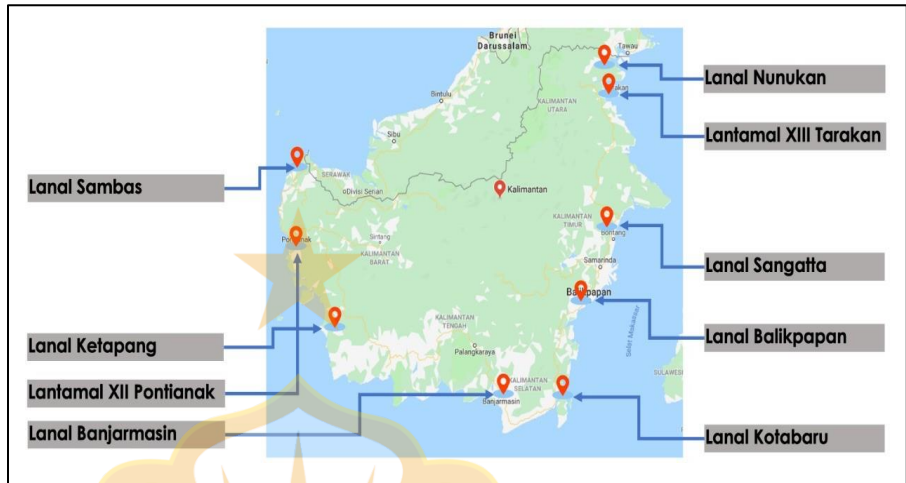
- (1) Lanal Sambas.
- (2) Lanal Ketapang.

b) Koarmada II membawahi Lantamal XIII/Trk, dengan satuan:

- (1) Lanal Balikpapan.
- (2) Lanal Sangatta.
- (3) Lanal Nunukan.
- (4) Lanal Banjarmasin.

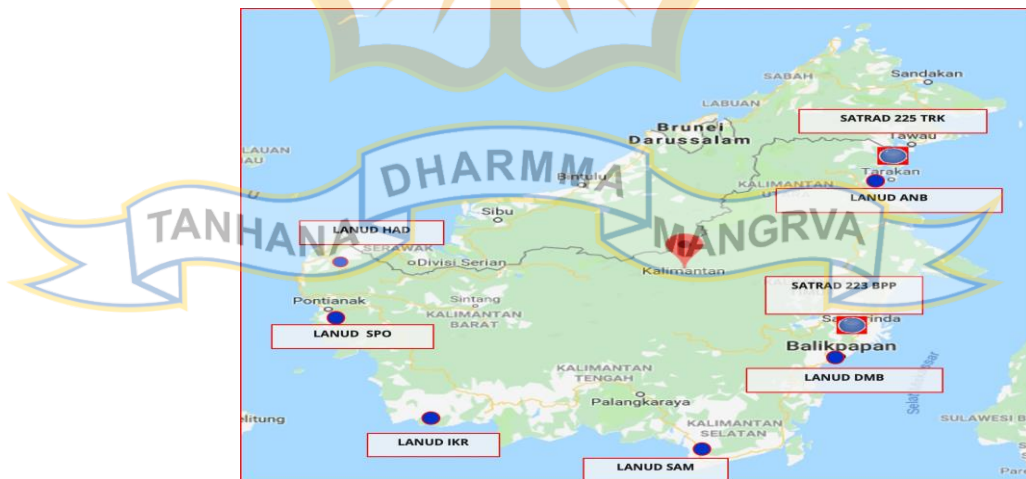
c) Dalam tugasnya selaku Pembinaan Dukungan Operas (Bin Dukops), Lantamal XII/Ptk dan Lantamal XIII/Trk bertugas menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL, pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang kemaritiman, pemberdayaan matra laut serta tugas-tugas lain berdasarkan kebijakan Kasal. Sedangkan sebagai Pelaksana Operasi, Lantamal XII/Ptk dan Lantamal XIII/Trk menyelenggarakan operasi

keamanan laut di wilayahnya dan meningkatkan daya guna serta hasil guna unsur-unsur secara optimal dalam pelaksanaan Operasi Keamanan Laut.



**Gambar 5. Gelar Satuan TNI AL di Kalimantan**  
(Sumber: Srenal, 2022)

- 3) **Kekuatan dan Gelar Satuan TNI AU.** Gelar kekuatan kewilayahan TNI AU di Kalimantan adalah Koopsud I dan II yang membawahi :
- a) Koopsud I, dengan gelar satuan sebagai berikut :
    - Lanud Supadio di Pontianak.



**Gambar 6. Gelar Satuan TNI AU di Kalimantan**  
( Sumber: Srenau, 2022)

- b) Koopsud II, dengan gelar satuan sebagai berikut :
- (1) Lanud Syamsudin Noor di Banjarmasin.
  - (2) Lanud Dhomber di Balikpapan.

- (3) Lanud Iskandar di Pangkalan Bun.
- (4) Komando Sektor (Kosek) II, yang terdiri dari :
  - c) Satrad 233/Bpp di Balikpapan.
  - d) Satrad 225/Trk di Tarakan.

d. **Kondisi Infrastruktur Pertahanan di IKN.** Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memerlukan pertimbangan mendalam tentang infrastruktur pertahanan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pertahanan di IKN masih dalam tahap awal, dengan berbagai proyek penting seperti pangkalan militer baru, sistem komunikasi dan peringatan dini, serta perlindungan infrastruktur kritis sedang dalam perencanaan atau tahap awal konstruksi<sup>37</sup>.

- 1) **Pangkalan Militer.** Proyek pembangunan pangkalan militer baru di IKN telah dimulai, tetapi masih jauh dari selesai. Infrastruktur militer ini sangat penting untuk memastikan pertahanan dan keamanan IKN. Kesulitan terbesar dalam proses ini adalah pemilihan lokasi yang strategis dan minim dampak lingkungan, serta memastikan pembangunan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan dan kesiapsiagaan tertinggi<sup>38</sup>.
- 2) **Sistem Komunikasi dan Peringatan Dini.** Pembangunan sistem komunikasi dan peringatan dini di IKN masih dalam tahap awal, dengan berbagai tantangan seperti kebutuhan teknologi tinggi dan kerahasiaan informasi. Diperlukan upaya dan investasi lebih lanjut untuk memastikan sistem ini dapat beroperasi secara efektif dan andal dalam mendeteksi dan merespons ancaman<sup>39</sup>.
- 3) **Perlindungan Infrastruktur Kritis.** Infrastruktur kritis di IKN, seperti jaringan transportasi dan sistem sumber energi, masih dalam proses pembangunan dan perlu mendapatkan perlindungan khusus. Faktor

<sup>37</sup> Laksmana, Evan A. "Pertahanan dan Keamanan dalam Perubahan Ibu Kota" CSIS Commentaries, no. DMRU-020-IDN. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2020.

<sup>38</sup> Satria, A. "Strategi Pertahanan dan Keamanan dalam Konteks Pembangunan Ibu Kota Baru" Journal of Defence and Security, vol. 5, no. 1, 2021.

<sup>39</sup> Supriyadi. "Pertahanan Sistem Infrastruktur Kritis Nasional" Journal of Defence and Security, vol. 3, no. 1, 2022.

risiko termasuk kerentanan terhadap ancaman fisik dan *cyber*, dan memerlukan langkah-langkah perlindungan khusus untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya<sup>40</sup>. Pembangunan infrastruktur pertahanan di IKN bukan hanya tentang bangunan fisik dan sistem, tetapi juga melibatkan pendekatan sistemik yang mencakup aspek hukum, kebijakan, dan kerjasama antar lembaga<sup>41</sup>.

f. **Anggaran Pertahanan.** Anggaran pertahanan Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembangunan dan berjalannya pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama dari perspektif pertahanan. Data menunjukkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2022 sebesar Rp 136,7 triliun atau sekitar 0,7% dari PDB, dan telah meningkat menjadi Rp 144,1 triliun pada tahun 2023, atau sekitar 0,73% dari PDB<sup>42</sup>. Namun, anggaran tersebut masih dianggap kurang memadai jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki skala dan tantangan serupa<sup>43</sup>. Dalam hal ini, sebagian besar anggaran pertahanan digunakan untuk pemeliharaan dan modernisasi alutsista, pengadaan peralatan dan perlengkapan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertahanan<sup>44</sup>. Tantangan yang muncul dalam penentuan anggaran pertahanan juga terletak pada penyeimbangan antara kebutuhan pertahanan dengan kebutuhan lainnya seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pertahanan, pemerintah juga mengupayakan pendanaan tambahan dari sumber lain jika diperlukan<sup>45</sup>. Untuk IKN, anggaran khusus diperlukan untuk memastikan bahwa infrastruktur pertahanan dapat dibangun dan dioperasikan dengan efektif. Hal

<sup>40</sup> Pribadi, K.S., and H. Sengara. "Analisis Resiliensi Infrastruktur Kritis untuk Pertahanan Negara: Studi Kasus Sistem Energi Jakarta" *Journal of Defence and Security*, vol. 4, no. 2, 2022.

<sup>41</sup> Permadi, D., and Y. Sudibyo "Analisis Kerentanan Infrastruktur Kritis dalam Konteks Keamanan Nasional" *Journal of Defence and Security*, vol. 4, no. 2, 2025

<sup>42</sup> Kementerian Keuangan RI. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

<sup>43</sup> Maharani, D., & Prabowo, R. (2022). Anggaran Pertahanan Indonesia: Sebuah Analisis Komparatif. *Journal of Defence and Security*, 4(1), 45-60.

<sup>44</sup> Laksmana, Evan A. "Pertahanan dan Keamanan dalam Perubahan Ibu Kota." *CSIS Commentaries*, no. DMRU-020-IDN. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2020.

<sup>45</sup> Nugroho, R., & Wahyudi, S. (2022). Prioritas dan Efisiensi Anggaran Pertahanan Indonesia. *Journal of Defence and Security*, 3(2), 70-85.



ini meliputi biaya untuk pengembangan dan pemeliharaan pangkalan militer, sistem komunikasi dan peringatan dini, dan perlindungan infrastruktur kritis. Dalam anggaran pertahanan tahun 2023, tercatat alokasi sebesar Rp 15 triliun khusus untuk pengembangan pertahanan dan keamanan di IKN<sup>46</sup>. Namun, kendala anggaran akan tetap ada. Dengan estimasi total biaya pembangunan IKN mencapai 466 triliun rupiah, pertanyaannya adalah seberapa besar bagian dari anggaran tersebut yang dapat dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan, tanpa mengorbankan kebutuhan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya<sup>47</sup>. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bagaimana mempertahankan dan mengoperasikan infrastruktur pertahanan ini dari tahun ketahun dalam jangka panjang.

## 10. Kerangka Teoritis

- a. **Teori Keamanan Nasional.** Teori keamanan nasional berkaitan dengan perlindungan terhadap ancaman eksternal dan internal<sup>48</sup>. Teori ini mencakup konsep pertahanan nasional, keamanan dalam negeri, serta intelijen dan kontra-intelijen, merangkum berbagai aspek yang menjadi tantangan dalam menjaga keamanan sebuah negara atau wilayah, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu penulis utama dalam teori ini adalah Barry Buzan yang memperkenalkan konsep "sektor keamanan" dalam bukunya yang berjudul "*People, States, and Fear*" (1983).
- b. **Teori Deterrence (Penangkalan).** Teori ini dapat digunakan sebagai kerangka pikir. Teori *Deterrence* dikemukakan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya "*Man, the State, and War*" (1959), di mana ia mengemukakan bahwa postur pertahanan yang kuat dapat menangkal agresi dari negara lain. Jika postur pertahanan lemah, maka akan berpotensi menimbulkan risiko keamanan yang lebih besar. Dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN), jika

<sup>46</sup> Prasetyo, B., & Rahmanto, Y. (2022). Menghadapi Tantangan Pertahanan di IKN: Perlunya Alokasi Anggaran Khusus. *Journal of Defence and Security*, 1(1), 60-75.

<sup>47</sup> "Pemindahan IKN Ditaksir Boroskan Anggaran Hingga Rp 466 Triliun". *Kontan.co.id*. Retrieved from <https://www.kontan.co.id/news/pemindahan-ibukota-negara-ditaksir-boroskan-anggaran-hingga-rp466-triliun>.

<sup>48</sup> Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Postur Pertahanan lemah, maka akan berpotensi menjadi sasaran agresi oleh negara lain atau aktor non-negara. Teori *Deterrence* memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kelemahan dalam postur pertahanan dapat berdampak pada keamanan IKN. Hal ini juga membantu menyoroti pentingnya mempertahankan dan meningkatkan postur pertahanan sebagai bagian penting dari strategi keamanan IKN.

c. **Teori Pertahanan Terpadu.** Teori ini mengemukakan bahwa pertahanan sebuah negara atau wilayah tidak hanya melibatkan militer, tapi juga melibatkan elemen-elemen lain seperti diplomasi, ekonomi, dan masyarakat sipil. Salah satu penulis utama dalam teori ini adalah Edward Luttwak, yang dalam bukunya "*Strategy: The Logic of War and Peace*" (1987) mengemukakan bahwa strategi pertahanan harus mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya aspek militer. Dalam konteks IKN, ini berarti bahwa untuk mengamankan ibu kota, strategi pertahanan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai faktor. Teori Pertahanan Terpadu oleh Edward Luttwak memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pemahaman yang lebih luas dan integratif tentang bagaimana pertahanan dapat ditingkatkan tidak hanya melalui peningkatan militer, tetapi juga melalui diplomasi, ekonomi, dan keterlibatan masyarakat sipil.

d. **Teori *Center of Gravity (CoG)*.** Teori dari John A. Warden III (1999) ini memandang musuh sebagai sistem dengan lima cincin konsentris, yang disebut "*Five Rings*", meliputi Kepemimpinan (cincin pusat), Sistem Organik, Infrastruktur, Populasi dan Aparat lapangan (cincin paling luar). Dalam konteks mengamankan Ibu Kota Negara (IKN), pendekatan ini dapat diadaptasi untuk memahami dan meningkatkan pertahanan dan keamanan di IKN. Dengan memahami "*center of gravity*" dari IKN melalui lensa "*Five Rings*", pemangku kebijakan dapat memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien untuk mengamankan ibu kota negara.

## 11. Lingkungan Strategis

a. **Global.** Beberapa fakta penting mengenai perkembangan lingkungan strategis global yang berdampak terhadap IKN dan Postur Pertahanan Negara Indonesia:

1) Peningkatan Aktivitas Militer di Kawasan Asia Pasifik. Perkembangan strategis di kawasan Asia Pasifik saat ini ditandai oleh kebangkitan China sebagai kekuatan militer global. Melalui peningkatan investasi dan modernisasi militer yang pesat, China kini menjadi pemain kunci dalam politik dan keamanan regional<sup>49</sup>. Salah satu area fokus China adalah Laut China Selatan, dimana mereka telah mengklaim hampir 90% dari perairan tersebut dalam "*Nine Dash Line*", yang menimbulkan kontroversi dan konflik dengan negara-negara tetangga dan masyarakat internasional. Klaim tersebut diperkuat dengan pembangunan pulau buatan dan instalasi militer di beberapa teritorial yang dipersengketakan, seperti Kepulauan Spratly dan Paracel<sup>50</sup>. Langkah ini telah memicu protes dan sengketa dari beberapa negara yang memiliki klaim terhadap wilayah yang sama, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.



**Gambar 7. China's Nine Dash Line**

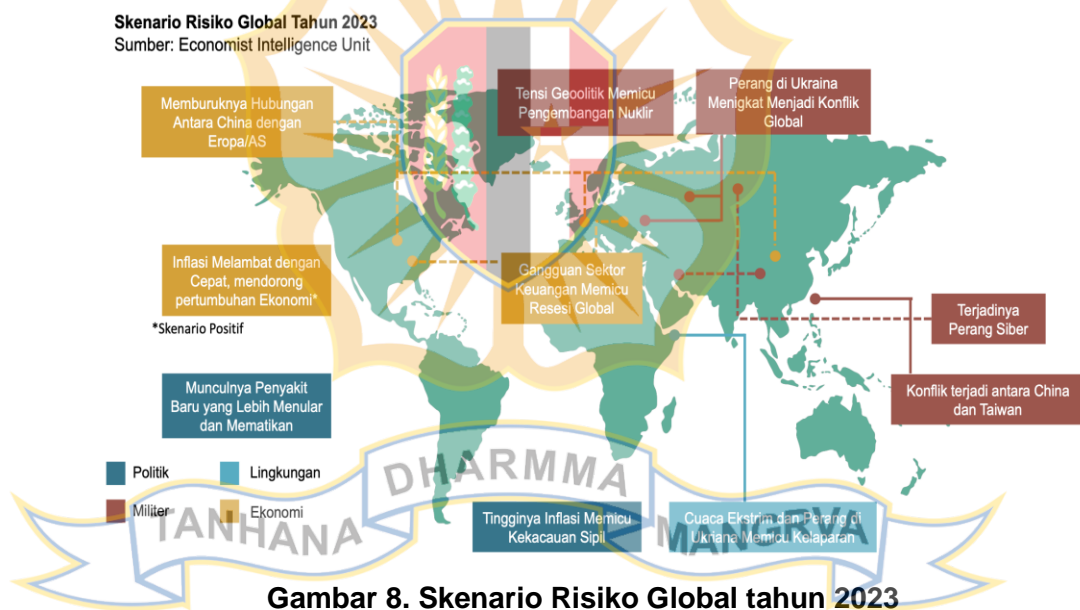
(Sumber : <https://www.mintpressnews.com/wp-content/uploads/2017/02/wide-view.jpg>)

<sup>49</sup> Saunders, P. C. (2020). "China's Rising Power, the U.S. Rebalance to Asia, and Implications for U.S.-China Relations". *Issues & Studies*, 56(1), 2040003.

<sup>50</sup> Beckman, R. (2013). "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea". *American Journal of International Law*, 107, 142-163.



Menanggapi kebangkitan China, dua koalisi keamanan baru muncul, yakni AUKUS (*Australia, UK and Amerika Serikat*) dan QUAD (*Quadrilateral Security Dialogue*), yang terdiri dari Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia. AUKUS, dalam pengumuman pertamanya pada September 2021, mencakup rencana untuk memasok kapal selam bertenaga nuklir ke Australia untuk menangani tantangan keamanan di Indo-Pasifik<sup>51</sup>. Sementara itu, QUAD diresmikan sebagai forum dialog antara empat negara pada 2007 dan telah menjadi lebih aktif dalam menghadapi kegiatan China di Laut China Selatan<sup>52</sup>. Dengan demikian, peningkatan aktivitas militer di Asia Pasifik, terutama seputar kebangkitan militer China dan pembentukan AUKUS dan QUAD, akan membawa implikasi langsung dan tidak langsung pada Postur Pertahanan Indonesia dan pembangunan IKN.



2) Peningkatan Ancaman Siber. Ancaman siber menjadi semakin nyata seiring perkembangan teknologi. Serangan siber bisa menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur kritis suatu negara, termasuk infrastruktur pertahanan dan keamanan. Perkembangan

<sup>51</sup> Tow, W. T., & Kersten, R. (2022). "The Implications of the AUKUS Pact". *Australian Journal of International Affairs*, 76(1), 2-7.

<sup>52</sup> Jaishankar, D. (2020). "The Quad and the Free and Open Indo-Pacific". *The Washington Quarterly*, 43(1), 105-118

teknologi informasi dan komunikasi di era global saat ini membuka peluang baru, namun juga membawa tantangan dan ancaman baru dalam bentuk serangan siber. Menurut *Global Cybersecurity Index 2020* oleh *International Telecommunication Union (ITU)*, serangan siber telah meningkat signifikan, baik dalam skala, intensitas, maupun kerugian ekonomi yang ditimbulkannya<sup>53</sup>. Indonesia sendiri telah menjadi target serangan siber. Laporan dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 200 juta serangan siber di Indonesia<sup>54</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia harus memperkuat pertahanan dan keamanan siber sebagai bagian integral dari strategi pertahanan nasional. Terlebih, dengan rencana perpindahan ibu kota negara ke IKN, tantangan ini semakin besar. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat data nasional, IKN akan menjadi target utama dalam serangan siber.

3) **Perkembangan Teknologi Militer.** Perkembangan teknologi militer di tingkat global menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap strategi pertahanan suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan perkembangan teknologi militer yang signifikan, seperti kemajuan dalam teknologi pesawat tanpa awak (*Unmanned Aerial Vehicle/UAV*), teknologi rudal *hypersonic*, hingga perkembangan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* dan *Cyber Warfare*<sup>55</sup>. Dalam konteks IKN dan Strategi Pertahanan Negara, perkembangan teknologi militer ini memiliki dua sisi: peluang dan tantangan. Di satu sisi, teknologi militer modern dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia, khususnya dalam menjaga keamanan IKN. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi militer juga memunculkan tantangan dan ancaman baru. Ancaman dapat datang dalam bentuk serangan

<sup>53</sup> International Telecommunication Union (2020). *Global Cybersecurity Index*. ITU.

<sup>54</sup> Badan Siber dan Sandi Negara (2021). *Laporan Tahunan BSSN 2020*. BSSN.

<sup>55</sup> SIPRI (2023). "Emerging military technologies: Implications for the arms race, arms control and disarmament". SIPRI Yearbook 2023. Stockholm International Peace Research Institute.

konvensional menggunakan teknologi militer canggih, atau serangan non-konvensional seperti serangan siber<sup>56</sup>.

4) Tantangan Non-Tradisional. Ancaman non-tradisional seperti terorisme, perubahan iklim, dan pandemi kesehatan juga menjadi bagian dari lingkungan strategis global. Ancaman-ancaman ini mempengaruhi stabilitas dan keamanan suatu negara. Tantangan non-tradisional dalam lingkungan strategis global telah menjadi fokus dalam diskusi keamanan dan pertahanan dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan ini mencakup berbagai isu seperti terorisme, ekstremisme, konflik siber, ancaman lingkungan, dan pandemi global<sup>57</sup>.

a) Terorisme dan Ekstremisme. Meski sering terkait dengan isu-isu dalam negeri, terorisme dan ekstremisme juga merupakan tantangan global yang mempengaruhi keamanan dan stabilitas suatu negara. Dalam konteks IKN dan strategi pertahanan Indonesia, perlu adanya peningkatan keamanan dan sistem intelijen yang mampu mendeteksi dan mencegah aksi terorisme.

b) Ancaman Lingkungan. Isu seperti perubahan iklim dan bencana alam juga merupakan tantangan non-tradisional dalam pertahanan dan keamanan. Dalam konteks IKN, pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam harus menjadi bagian dari strategi pertahanan.

c) Pandemi Global. Seperti yang terlihat pada pandemi COVID-19, wabah penyakit bisa berdampak signifikan terhadap keamanan dan stabilitas suatu negara. Hal ini mempengaruhi pertahanan dan keamanan karena mempengaruhi kesiapsiagaan dan kemampuan respons militer dalam kondisi darurat.

5) Pergeseran Perimbangan Kekuatan Global. Dinamika kekuatan global, seperti penurunan pengaruh Amerika Serikat dan kenaikan

---

<sup>56</sup> Kemhan RI (2021). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2021. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

<sup>57</sup> United Nations (2023). "Non-Traditional Security Threats in the 21st Century: A Comprehensive Overview". United Nations Publications.

pengaruh China dan negara-negara non-barat lainnya, mempengaruhi tatanan strategis global dan dapat berdampak pada kebijakan pertahanan suatu negara. Pergeseran perimbangan kekuatan global adalah salah satu aspek kunci dalam dinamika lingkungan strategis internasional. Hal ini merujuk kepada perubahan dalam hierarki kekuatan antar negara, baik dari segi ekonomi, militer, teknologi, atau geopolitik.

a) Munculnya Asia sebagai Pusat Kekuatan Global. Terjadi peningkatan kekuatan dan pengaruh dari negara-negara Asia, terutama China, yang telah menjadi pemain utama dalam ekonomi dan politik global<sup>58</sup>. Ini berimplikasi pada posisi strategis Indonesia dan IKN, yang berada di tengah-tengah dinamika Asia. Menyusun strategi pertahanan yang dapat merespons pergeseran ini, sambil menjaga hubungan baik dengan semua negara kunci, menjadi tantangan tersendiri.

b) Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat, sebagai pemain global utama, memiliki pengaruh signifikan pada perimbangan kekuatan global. Kebijakan luar negerinya, khususnya terhadap Asia, dapat mempengaruhi kondisi keamanan regional dan juga kebijakan pertahanan Indonesia<sup>59</sup>.

c) Berkembangnya Blok-Blok Geopolitik. Misalnya, terbentuknya aliansi seperti AUKUS dan QUAD, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi dinamika pertahanan di kawasan.

d) Pertumbuhan Kekuatan Militer Regional. Selain China, negara-negara lain di kawasan seperti India, Jepang, dan Australia juga meningkatkan kekuatan militernya. Hal ini dapat mempengaruhi strategi pertahanan Indonesia, termasuk penempatan dan pengerahan pasukan di IKN<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> Khanna, P. (2019). "The Future is Asian". Simon & Schuster

<sup>59</sup> Suri, J. (2020). "The End of American World Order". Polity.

<sup>60</sup> The Military Balance (2023). The International Institute for Strategic Studies (IISS).

Perubahan dalam perimbangan kekuatan global ini memerlukan penyesuaian dalam Strategi Pertahanan Indonesia, termasuk strategi pertahanan di IKN. Strategi ini harus mempertimbangkan dinamika pergeseran kekuatan dan bagaimana dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pertahanan nasional.

b. **Regional.** Beberapa fakta penting mengenai perkembangan lingkungan regional yang dapat berdampak terhadap IKN dan Postur Pertahanan Indonesia:

- 1) Malaysia tetap memanfaatkan posisinya sebagai anggota *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) dan terus meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata. Malaysia telah menempatkan pangkalan Angkatan Lautnya di Sandakan sebagai pangkalan utama TLDM di Sabah. Hal ini untuk mempermudah mobilitas unsur-unsur angkatan laut TLDM di wilayah Perairan LCS, ALKI I dan ALKI II.
- 2) Malaysia akan tetap mengizinkan Inggris untuk menempatkan personel dan fasilitas militernya dalam mendukung FPDA di *Head Quarter* (HQ) IADS di Butterworth, Malaysia.
- 3) Malaysia masih memiliki permasalahan batas wilayah dengan Indonesia antara lain di Blok Ambalat.
- 4) Singapura sebagai anggota FPDA akan tetap mengizinkan Inggris untuk menempatkan personel dan fasilitas Angkatan Lautnya di Sembawang, dan tetap menempatkan pangkalan udaranya di Selandia Baru, Australia dan Thailand serta penempatan personel AD Singapura di Brunei Darussalam.
- 5) Singapura mengembangkan kemampuan sibernya yang saat ini dioperasikan oleh tiga badan siber nasional yaitu *The Singapore Computer Emergency Response Team* (SingCERT), *The Defence Cyber Organisation* (DCO) dan *The Cyber Security Agency of Singapore* (CSA).
- 6) Keberadaan teroris di Filipina Selatan yang didominasi oleh *Abu Sayyaf Group* (ASG) akan terus berkembang dengan melibatkan anggotanya dari negara lain. Mereka akan melakukan aktivitasnya di



jalur pelayaran Laut Sulu dengan melakukan aksi perompakan, penculikan dan penyanderaan untuk mencari dukungan logistik.

c. **Nasional.** Beberapa fakta penting mengenai perkembangan Nasional yang berdampak terhadap IKN :

1) Kontestasi politik dalam negeri, khususnya terkait Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang sudah mulai berproses saat ini, memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap kondisi keamanan dalam negeri. Berkaca pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, kali ini juga dinilai memiliki potensi memecah masyarakat Indonesia menjadi kelompok – kelompok yang saling berseberangan, dan mengusung politik identitas, ujaran kebencian dan kampanye hitam bahkan mengusung isu-isu SARA di masyarakat untuk memenangkan Pemilu dan Pilkada. Kondisi ini secara tidak langsung dapat berpengaruh pada proses pembangunan IKN.

2) Aksi terorisme merupakan kejahatan terhadap negara. Potensi ancaman terorisme berasal dari WNI yang bergabung dengan *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) di Suriah dan sudah kembali ke Indonesia serta kelompok teroris di Marawi Filipina Selatan yang berpeluang masuk ke Indonesia untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Kelompok ini juga memanfaatkan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai jalur lalu lintas pergerakan mereka. Hal ini juga dapat membawa dampak negatif pada kondisi keamanan di wilayah sekitar IKN.

3) Metode ancaman siber yang berkembang adalah *ransomware*, pencurian data, pencurian properti intelektual dan serangan melalui pengadaan barang. Ancaman Siber pada bidang sosial politik berupa *black/negative campaign* (propaganda, agitasi, provokasi), *cyber mobbing/stalking* dan pornografi.

4) Belum optimalnya pengawasan terhadap objek vital nasional yang bersifat strategis dan lingkungannya telah menimbulkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Ancaman keamanan tersebut



secara langsung maupun tidak berdampak terhadap perekonomian dan keamanan nasional, termasuk obyek vital di IKN dan wilayah sekitarnya.

5) Konflik horizontal dengan latar belakang SARA masih terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Lampung, Jabar, Jatim, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Sulteng, Maluku, Papua Barat dan Papua. Sementara konflik vertikal juga masih terjadi dengan latar belakang permasalahan UMR, penolakan sistem *outsourcing*, pengangkatan pegawai tetap dan hak tenaga kerja serta sengketa kepemilikan tanah/lahan.

6) Laporan *World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)* edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021. Diprediksi dalam periode 2021-2023, Indonesia akan bertumbuh kuat sebesar 3,3%, 5,6%, dan 6,0%, hal tersebut distimulus dengan adanya kebijakan penanganan pandemi dan pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 sebesar 5,3 % - 5,9 %, kebijakan ekonomi makro tahun 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung pada APBN. Pemulihan ekonomi ini akan berdampak positif pada pembangunan Postur Pertahanan Negara di IKN.

Dalam menghadapi dinamika strategis global, regional, dan nasional, Indonesia dihadapkan pada tantangan seperti peningkatan aktivitas militer, ancaman cyber, dan kontestasi politik domestik. Namun, dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, peluang untuk memperkuat postur pertahanan, khususnya di Ibu Kota Negara (IKN), menjadi semakin terbuka. Untuk itu, integrasi teknologi canggih, peningkatan kapabilitas siber, serta kerjasama Internasional diperlukan agar Indonesia mampu menjaga keamanan dan kedaulatannya di tengah tantangan yang kompleks, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 12. Umum.

Pertahanan dan keamanan IKN menempati posisi kritis dalam agenda nasional, terlebih dengan beragamnya tantangan dan isu yang kini muncul di era modern. Untuk memastikan IKN tetap dalam keadaan aman, ada tiga titik krusial yang menjadi sorotan. Pertama, adalah pentingnya menggali lebih dalam mengenai kondisi nyata postur pertahanan saat ini dalam mengamankan IKN, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga pertahanan dan keamanan IKN. Kedua, diskusi harus mengarah pada dampak dari postur pertahanan yang kurang optimal, bagaimana ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi keamanan di IKN, serta dampak jangka panjangnya bagi warga dan aset negara. Dan ketiga, langkah strategis yang harus diambil untuk meningkatkan Postur Pertahanan, memastikan integrasi antara berbagai instansi terkait, serta menerapkan metode terbaru guna memperkuat pertahanan.

Untuk mendukung analisis yang mendalam, studi ini mengadopsi tiga pendekatan metode analitis utama, yaitu PESTLE, *Risk and Impact Analysis* (analisis risiko dan dampak) serta *Scenario Building and Planning*. Dengan PESTLE, akan dapat dipahami pengaruh berbagai faktor, mulai dari kebijakan politik, kondisi ekonomi, dinamika sosial, perkembangan teknologi, kondisi lingkungan fisik IKN, hingga aspek hukum dan etika. Faktor-faktor ini dianalisis untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi pertahanan dan keamanan di IKN, serta bagaimana responsnya. Selanjutnya, metode “analisis risiko dan dampak” akan mengkaji lebih jauh risiko spesifik yang dapat mengancam IKN. Dengan memahami risiko ini, maka akan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk memitigasi dampaknya dan memastikan pertahanan serta keamanan di IKN tetap terjaga. Sedangkan dengan metode analisa *scenario building and planning* digunakan dalam perencanaan strategis untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Merancang dan mempersiapkan berbagai kemungkinan situasi di masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang

mungkin mempengaruhi jalannya organisasi, seperti antisipasi perubahan, identifikasi peluang dan ancaman serta pembuatan strategi yang fleksibel.

### **13. Kondisi Postur Pertahanan Saat Ini dan Masalah yang Dihadapi Dalam Menjaga Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN).**

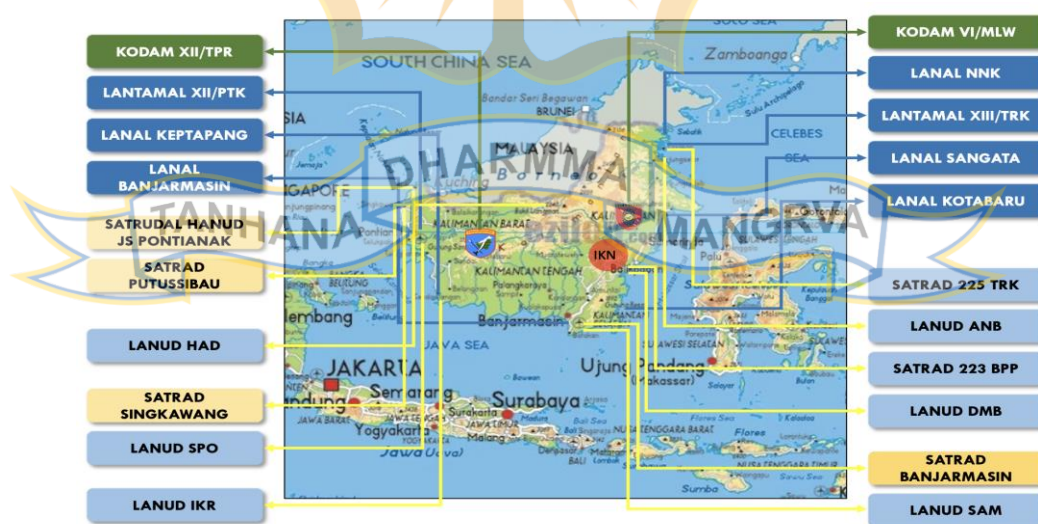
Pertahanan dan keamanan negara menjadi fokus utama dalam menjaga kedaulatan dan integritas bangsa. Di tengah perkembangan geopolitik yang dinamis dan berbagai ancaman baru yang muncul, memahami isu-isu krusial ini menjadi penting untuk memastikan bahwa IKN tetap aman dan terlindungi dari setiap potensi gangguan. Pembahasan pada pasal ini akan dilakukan dengan pendekatan multidimensi, pada sub pasal pertama, akan menggunakan Teori Keamanan Nasional sebagai landasan konseptual. Teori ini akan diintegrasikan dengan analisis tata kelola kelembagaan, pemrograman, penganggaran yang berkelanjutan, serta regulasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi postur pertahanan yang ada sekarang, serta bagaimana kebijakan, regulasi, dan anggaran mempengaruhinya. Diharapkan, melalui pembahasan ini dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan serta potensi peningkatan dalam struktur pertahanan.

Sementara itu, pembahasan sub pasal kedua akan menggunakan metode analisis PESTLE yang juga terintegrasi dengan Teori Keamanan Nasional. Metode PESTLE akan membantu dalam memetakan ancaman dan tantangan dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan di IKN. Tujuannya adalah untuk mengetahui variabel-variabel eksternal yang menjadi penghambat atau pendorong dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di IKN. Melalui kedua sub pasal ini, diharapkan dapat diberikan wawasan komprehensif terkait Postur Pertahanan dan tantangan keamanan di IKN, serta solusi integratif dalam menanggulangnya.

#### **a. Kondisi Postur Pertahanan Saat Ini dalam Menjaga Pertahanan dan Keamanan di IKN.**

Dalam upaya mempertahankan dan menjaga keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada posisi strategis di pulau Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, TNI telah menggelar kekuatan pertahanan pada struktur organisasi militer di tingkat Kotama (Komando Taktis Utama), yang

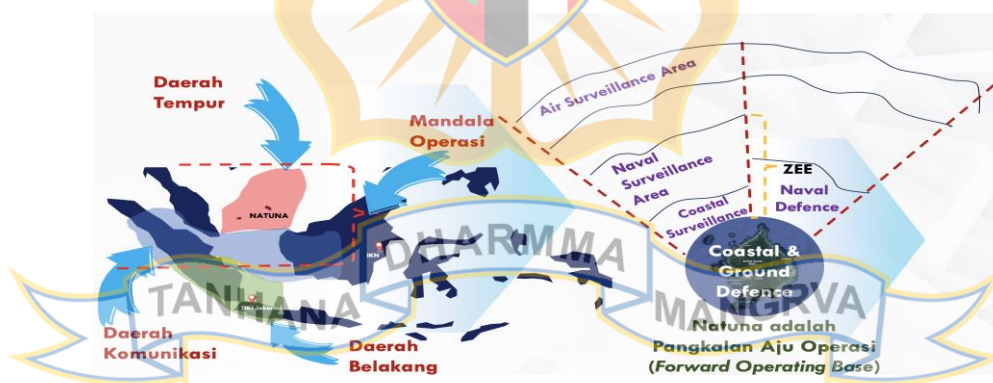
bersifat strategis. Aspek pertahanan darat, yang menjadi fondasi utama pertahanan negara di pulau Kalimantan, diperkuat dengan keberadaan satuan TNI AD di bawah kendali Kodam VI/Mulawarman dan Kodam XII/Tanjungpura. Kedua satuan ini memiliki tanggung jawab krusial untuk mengamankan wilayah darat, mencegah potensi ancaman, serta merespons dengan cepat setiap bentuk gangguan yang dapat mengancam stabilitas wilayah. Di lini pertahanan udara, TNI AU, melalui satuan jajaran Koopsud I dan II, menjaga kedaulatan ruang udara di atas IKN dan Kalimantan secara keseluruhan. Keduanya bertugas memastikan bahwa ruang udara tersebut senantiasa aman dari potensi ancaman eksternal dan dalam kondisi siap memberikan dukungan logistik maupun operasional dari udara bagi pasukan di darat. Sementara itu, perairan sekitar Kalimantan, khususnya jalur ALKI I dan II, menjadi tanggung jawab TNI AL, dengan satuan jajaran Koarmada I dan II yang terus berjaga. Kedua Armada ini memiliki misi menjaga integritas garis pantai, mengawasi lalu lintas maritim, serta melindungi sumber daya kelautan yang vital. Untuk memastikan sinergi antara ketiga komponen pertahanan ini, TNI menempatkan mereka di bawah satu komando, yaitu Kogabwilhan II, yang bertujuan memastikan operasional TNI di wilayah Kalimantan, terutama IKN, berjalan secara terpadu dan terintegrasi<sup>61</sup>.



**Gambar 9. Gelar Satuan TNI di Kalimantan**  
(Sumber : Srenum TNI, 2023)

<sup>61</sup> Laporan Strategi Pertahanan Nasional 2021, "Pembentukan dan Struktur Komando Pertahanan Wilayah Kalimantan," Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hal. 32-40.

Namun, dengan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru, tuntutan terhadap kekuatan pertahanan menjadi semakin tinggi. Dengan beralihnya posisi Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN saat ini, dimana sebelumnya dalam konsep pertahanan, ibu kota berada di “Daerah Komunikasi/Daerah Belakang”, sementara saat ini posisi ibu kota negara maju ke “Daerah Tempur” jika dihadapkan dari potensi arah datang ancaman musuh. Sehingga dalam menghadapi kondisi ini dan berbagai potensi ancaman yang sudah didefinisikan dan diuraikan pada Bab II sebelumnya, menunjukkan bahwa daya tangkal postur pertahanan terhadap ancaman saat ini dinilai belum memadai. Kekuatan dan kemampuan Postur Pertahanan kita saat ini tidak dalam kondisi baik, sehingga Kementerian Pertahanan dan TNI harus segera memperkuat dan meningkatkan Postur Pertahanan sedini mungkin guna menjamin keamanan wilayah Indonesia pada umumnya dan IKN pada khususnya<sup>62</sup>. Adanya kesenjangan antara kebutuhan pertahanan dengan kapasitas yang ada saat ini, menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk memperkuat Postur Pertahanan Negara, agar IKN benar-benar terlindungi dari berbagai ancaman, baik nyata maupun potensial.



**Gambar 10. Mandala Operasi Pertahanan terhadap potensi ancaman**  
(Sumber : Sops TNI, 2023)

Dalam hal tata kelola pemerintahan, gelar satuan TNI di Pulau Kalimantan dan IKN saat ini masih mengikuti struktur organisasi sebelum IKN dibangun, sehingga secara nyata belum ada satuan TNI yang tergelar di wilayah IKN. Oleh karenanya, sebagai ibu kota negara yang baru, perlu

<sup>62</sup> Paparan Sekjen Kemhan pada FGD Evjianbang Sesko TNI, 13 Juni 2023.



dilakukan pembangunan Postur Pertahanan di IKN dan provinsi lain di Kalimantan guna mewujudkan keamanan IKN dari berbagai potensi ancaman. Pembangunan Postur Pertahanan ini dilakukan dengan pembangunan kekuatan TNI secara terintegrasi, yang modern dan adaptif dengan perkembangan teknologi militer terbaru, serta yang telah terbukti memiliki daya tangkal tinggi dalam pertempuran (*combat proven*).

Oleh karena itu, guna memperkuat Postur Pertahanan dalam mengamankan IKN dan seluruh wilayah Indonesia, maka diperlukan pemrograman dalam bentuk rencana pembangunan kekuatan pertahanan secara terpadu dan tepat, dihadapkan pada perkembangan potensi ancaman dan dinamika geopolitik global. Rencana Pembangunan Kekuatan ini harus mampu secara tepat menjawab semua potensi ancaman terhadap keamanan di IKN, baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Selanjutnya, dengan adanya program pembangunan kekuatan TNI ini, sebagai perwujudan pembangunan Postur Pertahanan Negara, maka untuk mewujudkannya diperlukan suatu program “penganggaran yang berkelanjutan” sesuai proyeksi pembangunan kekuatan. Program penganggaran yang berkelanjutan ini menjadi salah satu faktor kunci dalam merealisasikan rencana pembangunan Postur Pertahanan Negara, karena tanpa adanya dukungan anggaran yang berkelanjutan maka Postur Pertahanan yang diproyeksikan tidak akan dapat terwujud. Kata berkelanjutan disini mengandung makna bahwa penganggaran pembangunan Postur Pertahanan ini harus dapat didukung secara konsisten, terus menerus, sampai sasaran Postur Pertahanan yang diharapkan terwujud. Akhirnya, untuk mewujudkan penganggaran yang berkelanjutan ini, maka dibutuhkan regulasi yang menjamin terdukungnya anggaran dalam program pembangunan postur pertahanan tersebut secara berkelanjutan.

**b. Masalah yang Dihadapi dalam Menjaga Pertahanan dan Keamanan di Ibu Kota Nusantara (IKN).**

Dalam menggali masalah yang dihadapi terkait pertahanan dan keamanan di IKN, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Dengan mengetahui masalah yang dihadapi, maka akan



ditemukan alasan “mengapa Postur Pertahanan tersebut perlu diperkuat”. Melalui metode analisis PESTEL, penulis akan mengeksplorasi berbagai dampak dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas isu yang dihadapi.

1) **Politik.** Di wilayah IKN dan sekitarnya, isu politik seperti dinamika lokal, perbedaan pandangan politik, serta manajemen perubahan dari Jakarta ke IKN menjadi masalah aktual. Konflik dan ketidaksepakatan politik sangat berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan IKN<sup>63</sup>.

Pemindahan Ibu Kota ke IKN memunculkan tiga masalah utama dibidang politik. *Pertama*, dinamika geopolitik dikawasan yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan di IKN, termasuk ancaman konflik perbatasan wilayah negara dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah darat dan laut Indonesia. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis negara untuk mengeliminasi ancaman ini terhadap eksistensi IKN. *Kedua*, adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan. Sehingga Perlu dicari solusi yang adil antara kebutuhan pemerintah pusat dan dampak sosial lingkungan yang diharapkan oleh daerah. *Ketiga*, perlindungan hak masyarakat adat menjadi isu penting. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang melindungi, namun penerapannya masih diragukan. Pembangunan di IKN dapat merugikan masyarakat adat. Oleh karena itu, perlunya penyeimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak adat. Pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif perlu dilakukan untuk menjaga lingkungan dan memastikan keadilan.

2) **Ekonomi.** Dalam konteks ekonomi, IKN menghadapi tantangan signifikan yang berpotensi mengganggu keamanannya. Fluktuasi ekonomi, ketidakseimbangan distribusi kekayaan, serta pengangguran bisa memicu ketidakpuasan sosial. Kondisi ideal diharapkan adalah

---

<sup>63</sup> "Dinamika Desentralisasi di Indonesia: Pertimbangan untuk Ibu Kota Baru", Samsu Rizal Panggabean dan Riwanto Tirtosudarmo.

pertumbuhan ekonomi stabil dengan distribusi yang merata, namun mencapainya memerlukan pendekatan holistik, mengingat kompleksitas isu ekonomi dan dampaknya terhadap keamanan IKN<sup>64</sup>.

Dalam konteks ekonomi, masalah aktual yang dihadapi IKN meliputi pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung fungsi IKN sebagai ibu kota baru dan pusat kegiatan ekonomi. Infrastruktur ini mencakup transportasi, utilitas, dan fasilitas publik lainnya. Namun, pembangunan ini memerlukan investasi besar dan dapat memberikan tekanan pada anggaran publik<sup>65</sup>. Seiring dengan itu, pengelolaan sumber daya alam di IKN juga menjadi isu penting. Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam seperti mineral dan hutan, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan adil. Dibutuhkan perencanaan dan regulasi yang baik serta keterlibatan semua pemangku kepentingan.

3) **Sosial.** Masalah sosial di IKN berdampak langsung pada keamanan wilayah tersebut. Isu-isu seperti kesenjangan ekonomi, migrasi, dan konflik sosial menjadi ancaman serius bagi kestabilan IKN. Meski kondisi idealnya adalah masyarakat yang harmonis dan inklusif, upaya mencapai visi tersebut menghadapi berbagai rintangan, memerlukan strategi khusus untuk menjembatani perbedaan dan mewujudkan keamanan yang berkelanjutan<sup>66</sup>.

Dari sudut pandang sosial, masalah yang dihadapi di wilayah IKN dan sekitarnya adalah mulai terjadinya peningkatan urbanisasi dan perpindahan populasi. Proyek IKN berpotensi mendatangkan gelombang baru migrasi internal, dengan individu dan keluarga yang mencari peluang ekonomi baru. Hal ini membawa peluang dan juga dapat menimbulkan tantangan seperti kemacetan, tekanan pada infrastruktur,

<sup>64</sup> Analisis Ekonomi dan Keamanan Ibu Kota Nusantara, Lembaga Riset Ekonomi dan Keamanan Nasional, 2023.

<sup>65</sup> Pembangunan Infrastruktur dan Manajemen Sumber Daya Alam di Ibu Kota Baru Indonesia" oleh Fadhil Hasan dan T. Hidayat

<sup>66</sup> Studi Keamanan dan Sosial Ibu Kota Nusantara, Pusat Penelitian Keamanan Nasional, 2023.

dan peningkatan biaya hidup<sup>67</sup>. Selain itu, terdapat masalah tentang bagaimana masyarakat adat dan penduduk lokal diintegrasikan dalam perubahan ini, agar mereka tidak merasa terpinggirkan.

4) **Teknologi.** Aspek teknologi dalam menjaga keamanan IKN meliputi berbagai dimensi, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem keamanan digital, serta adopsi dan implementasi teknologi ramah lingkungan.

Masalah aktual saat ini mencakup perluasan dan modernisasi infrastruktur teknologi yang ada. Konektivitas *broadband* yang luas dan cepat sangat penting untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta memfasilitasi bisnis dan kehidupan sehari-hari warga. Selain itu, penerapan sistem keamanan digital juga penting untuk melindungi data dan informasi penting pemerintah dan bisnis dari ancaman *cyber*<sup>68</sup>. Selain itu, transisi menuju teknologi ramah lingkungan yang berkelanjutan merupakan tantangan besar lainnya.

5) **Lingkungan.** Aspek lingkungan dalam menjaga keamanan IKN sangat penting, mengingat bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan memberikan tantangan dan peluang baru untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Masalah yang dihadapi adalah adanya tekanan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur dan peningkatan populasi. Hal ini termasuk isu-isu seperti deforestasi, kerusakan habitat, pencemaran air dan udara, serta peningkatan emisi karbon. Ada juga kekhawatiran tentang bagaimana proyek besar ini akan mempengaruhi masyarakat adat dan wilayah-wilayah yang kaya akan biodiversitas<sup>69</sup>.

<sup>67</sup> Dampak Sosial Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap Masyarakat Lokal dan Adat: Studi Kasus di Kalimantan Timur" oleh A. Suryanto dan H. Pramono.

<sup>68</sup> Pembangunan Infrastruktur Digital dalam Konteks Ibu Kota Negara Baru: Studi Kasus IKN" oleh B. Wijaya dan S. Purnomo.

<sup>69</sup> Pembangunan IKN dan Implikasinya terhadap Lingkungan: Sebuah Studi Ekologi Politik" oleh S. Pramono dan R. Sutanto.

6) **Hukum.** Aspek hukum dalam menjaga keamanan IKN mencakup konsolidasi hukum dan peraturan yang berlaku, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta kepastian hukum dalam investasi dan pengelolaan sumber daya.

Masalah yang dihadapi dalam aspek ini adalah pengharmonisasian peraturan dan hukum lokal dengan hukum nasional. Perpindahan ibu kota menuntut penyusunan hukum dan peraturan baru yang mengatur pengelolaan dan operasional di IKN. Selain itu, perlindungan hak-hak masyarakat adat seringkali menjadi isu yang rumit, mengingat adanya potensi konflik antara kepentingan pembangunan dengan pemeliharaan tanah dan sumber daya oleh komunitas adat<sup>70</sup>.

Analisis terhadap kondisi Postur Pertahanan di IKN dilakukan melalui pendekatan multidimensi, dengan teori Keamanan Nasional sebagai fondasi, terintegrasi dengan tata kelola kelembagaan, pemrograman, dan penganggaran. Meskipun TNI telah menggelar kekuatan pertahanan diseluruh wilayah Kalimantan, akan tetapi masih terdapat kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan dan kapasitas pertahanan yang nyata, sehingga hal ini mengindikasikan perlunya penguatan Postur Pertahanan di IKN saat ini. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain terkait isu politik seperti konflik perbatasan, serta isu ekonomi terkait pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Diperlukan strategi holistik untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, termasuk langkah pemrograman yang terpadu dan penganggaran yang berkelanjutan, serta pendekatan inklusif dalam pembangunan untuk memastikan keamanan di IKN.

#### 14. **Dampak Dari Lemahnya Postur Pertahanan Terhadap Keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN).**

Kondisi keamanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan Indonesia memiliki peran krusial dalam stabilitas dan kemajuan Indonesia. Oleh

<sup>70</sup> Hukum, Masyarakat Adat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di IKN: Suatu Tinjauan Kritis" oleh B. Irawan dan A. Supriatna.

karena itu, memastikan keamanan dan stabilitas IKN menjadi hal yang fundamental. Namun, apa yang terjadi jika postur pertahanan IKN lemah? Bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi keamanan dan stabilitas di IKN serta negara secara keseluruhan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam pembahasannya penulis akan menggunakan kerangka teori Penangkalan (*deterrence theory*). Teori ini mengedepankan pemahaman bahwa keberadaan kekuatan pertahanan yang memadai dapat mencegah atau menangkal adanya ancaman dari aktor-aktor eksternal yang mungkin berpotensi mengganggu keamanan. Dengan kata lain, kekuatan pertahanan yang kuat dapat berfungsi sebagai deterren atau penangkal terhadap kemungkinan agresi. Selanjutnya, untuk memahami dengan mendalam tentang dampak dan pengaruh dari lemahnya postur pertahanan IKN, akan digunakan metodologi analisis risiko dan dampak (*risk and impact analysis*). Melalui pendekatan ini, maka akan diidentifikasi potensi risiko yang dapat muncul akibat lemahnya postur pertahanan serta mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan menganalisis dampak dan pengaruh dari lemahnya postur pertahanan, maka akan dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat dalam memperkuat keamanan IKN, serta memahami konsekuensi jika tidak melakukan peningkatan. Pembahasan tentang dampak dan pengaruh dari lemahnya Postur Pertahanan terhadap keamanan di IKN dengan menggunakan ‘analisis dampak dan resiko’, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. **Identifikasi Risiko.** Untuk memahami dampak lemahnya postur pertahanan terhadap keamanan IKN, maka perlu dilakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap ancaman-ancaman yang ada, baik ancaman militer maupun non-militer. Adapun risiko dan dampak yang terjadi dari lemahnya Postur Pertahanan di IKN meliputi:

- 1) Dihadapkan pada ancaman militer. Dihadapkan pada risiko ancaman militer, beberapa potensi risiko yang mungkin terjadi meliputi :
  - a) Agresi dan konflik bersenjata dengan negara atau entitas lain.
  - b) Pelanggaran batas wilayah negara, berupa penetrasi ilegal kedalam wilayah Indonesia, baik darat, laut maupun udara.



- c) Aksi spionase dan sabotase terhadap fasilitas penting di IKN.
  - d) Aksi terorisme, berupa serangan terhadap sasaran sipil untuk menciptakan ketakutan di wilayah IKN.
- 2) Dihadapkan pada ancaman non-militer.
- a) Ancaman berdimensi Ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud), berupa aksi yang mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik, fluktuasi ekonomi, ketegangan sosial maupun erosi nilai budaya.
  - b) Ancaman berdimensi Teknologi, yang berupa penyalahgunaan teknologi, ancaman siber serta ketergantungan pada teknologi asing.

b. **Penilaian Dampak.** Setelah mengidentifikasi risiko yang paling mungkin timbul, maka langkah selanjutnya akan dilakukan analisis potensi dampak dari kemungkinan risiko yang terjadi.

- 1) Dihadapkan pada ancaman militer. Adapun dampak yang akan terjadi, dihadapkan pada risiko ancaman militer, meliputi:
- a) Agresi dan konflik bersenjata dengan negara atau entitas lain. Dampak yang akan terjadi adalah terjadinya kerusakan fisik, korban jiwa, ketidakstabilan politik, dan potensi eskalasi konflik. Ketika terjadi agresi atau konflik bersenjata dengan negara atau entitas lain, kerusakan fisik pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan dapat terjadi.
  - b) Pelanggaran batas wilayah negara, berupa penetrasi ilegal kedalam wilayah Indonesia, baik darat, laut maupun udara. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya potensi konflik/meningkatkan risiko konflik dengan pihak yang melanggar.
  - c) Aksi spionase dan sabotase terhadap fasilitas penting di IKN. Dampak yang terjadi dari aksi spionase adalah kehilangan keamanan data dan informasi strategis serta penurunan integritas keamanan, sedangkan akibat sabotase akan berdampak pada kerusakan yang menghambat operasi penting, seperti produksi



energi atau transportasi, yang pada gilirannya menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

d) Aksi terorisme. Dampak dari aksi serangan terorisme, terutama dengan target sipil, bisa menyebabkan korban jiwa yang signifikan. Selain itu, serangan-serangan tersebut dapat menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur dan properti. Dampak psikologis dari terorisme juga signifikan, di mana masyarakat akan merasa tidak aman dan trauma, sehingga menimbulkan rasa ketakutan publik yang meluas.

2) Dihadapkan pada ancaman non militer. Adapun dampak yang akan terjadi, dihadapkan pada risiko ancaman non militer, meliputi:

a) Ancaman Ipoleksosbud dapat memicu ketidakstabilan politik, memberi tekanan pada perekonomian dan menciptakan ketegangan sosial. Dampaknya mencakup: disrupsi kehidupan sehari-hari, kehilangan kepercayaan publik pada institusi, serta erosi nilai-nilai budaya yang berpotensi mengurangi identitas nasional.

b) Ancaman Teknologi termanifestasi melalui penyalahgunaan teknologi, serangan siber, dan ketergantungan pada teknologi asing. Dampaknya adalah kerentanan infrastruktur kritis, kehilangan data dan informasi penting, serta potensi hilangnya kedaulatan teknologi, yang semuanya berkontribusi pada kerentanan nasional.

c. **Evaluasi Risiko (Penilaian Probabilitas).** Penilaian ini merupakan langkah dalam mengevaluasi risiko, dengan mempertimbangkan dampak potensial dan tingkat kemungkinan terjadinya. Evaluasi risiko merupakan tahapan kritis dalam manajemen risiko yang menentukan bagaimana risiko yang telah diidentifikasi mempengaruhi keamanan IKN. Dalam konteks ini, IKN dihadapkan dengan ancaman militer dan non-militer, yang masing-masing memiliki risiko spesifik. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang probabilitas dan dampak potensial dari setiap risiko terhadap keamanan IKN. Berikut adalah evaluasi risiko dan dampaknya :

1) Ancaman Militer.

a) Agresi dan Konflik Bersenjata. Risiko agresi dan konflik bersenjata dengan negara tetangga memiliki probabilitas 'rendah' tetapi dampak yang 'sangat tinggi'. Agresi militer dari negara atau entitas lain akan mengancam stabilitas regional dan keamanan nasional.

b) Pelanggaran Batas Wilayah Negara. Pelanggaran ini memiliki probabilitas 'sangat tinggi' dengan dampak 'signifikan terhadap kedaulatan negara', terutama di wilayah perbatasan darat, laut, dan udara di IKN, pulau Kalimantan, ALKI 2 dan sekitarnya. Sebagai contoh, ada banyak kasus dimana warga dari Sabah atau Sarawak memasuki wilayah Kalimantan tanpa dokumen resmi atau sebaliknya. Selain itu, ada juga isu penyelundupan barang dan aktivitas ilegal lainnya di perbatasan<sup>71</sup>. Sementara di wilayah laut, pelanggaran berupa pencurian ikan oleh kapal asing sering terjadi. Selain itu, ada juga risiko pelanggaran batas oleh kapal-kapal komersial atau militer yang melintasi ALKI tanpa izin yang sesuai<sup>72</sup>.

c) Sementara pelanggaran wilayah udara, terdapat banyak sekali pelanggaran, di mana pesawat komersial atau militer dari negara tetangga memasuki ruang udara Kalimantan tanpa izin, memerlukan koordinasi dan respons dari otoritas penerbangan sipil dan militer Indonesia<sup>73</sup>.

d) Aksi Spionase dan Sabotase. Dengan peningkatan teknologi dan hubungan global, risiko ini memiliki 'probabilitas tinggi', khususnya aksi spionase. Dampaknya dapat 'merusak infrastruktur kritis dan mengancam keamanan nasional'.

e) Aksi Terorisme. Risiko ini memiliki 'probabilitas tinggi' dan dampak serius terhadap keamanan publik dan stabilitas sosial IKN.

---

<sup>71</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). Data Penyelundupan Barang di Perbatasan Kalimantan. Jakarta: DJBC.

<sup>72</sup> Badan Keamanan Laut. (2022). Pelanggaran Kapal Asing di ALKI. Jakarta: Bakamla.

<sup>73</sup> Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2022). Pelanggaran Ruang Udara Kalimantan. Jakarta: DJPU.

2) Ancaman Non-Militer.

a) Ancaman berdimensi Ipoleksosbud. Dampak dari ketidakstabilan politik, fluktuasi ekonomi, ketegangan sosial, dan erosi nilai budaya dapat berdampak jangka panjang terhadap stabilitas IKN. Probabilitas saat ini dinilai 'moderate/sedang,' dan sangat dinamis tergantung pada kondisi politik dan ekonomi.

b) Ancaman Berdimensi Teknologi. Risiko ini memiliki probabilitas 'tinggi', terutama dalam konteks penyalahgunaan teknologi, ancaman siber, dan ketergantungan teknologi asing. Dampaknya bisa melumpuhkan infrastruktur penting dan ekonomi IKN.

d. **Mitigasi Risiko.** Mitigasi risiko adalah langkah yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang telah diidentifikasi. Beberapa langkah mitigasi yang dapat diambil dalam konteks ancaman yang dihadapi oleh Ibu Kota Nusantara (IKN):

1) Ancaman Militer.

a) Agresi dan Konflik Bersenjata. Untuk mengatasi risiko ini, pemerintah bisa memperkuat kerjasama militer dengan negara-negara lain, serta meningkatkan kemampuan pertahanan sendiri melalui modernisasi alutsista dan kemampuan prajurit militer.

b) Pelanggaran Batas Wilayah Negara. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan adalah langkah kunci dalam mitigasi risiko ini. Selain itu, diplomasi bilateral dan multilateral juga penting untuk menyelesaikan masalah perbatasan.

c) Aksi Spionase dan Sabotase. Untuk merespons ancaman ini, peningkatan kemampuan intelijen dan kontrainTELijen sangat penting, termasuk dalam teknologi siber. Pengawasan dan perlindungan infrastruktur kritis juga harus ditingkatkan.

d) Aksi Terorisme. Pemantauan, deteksi dini, dan penanggulangan terorisme, termasuk melalui kerjasama internasional, akan sangat membantu dalam mitigasi risiko ini.

2) Ancaman Non-Militer.

a) Ancaman berdimensi Ipoleksosbud. Langkah-langkah untuk mitigasi risiko ini termasuk menjaga stabilitas politik, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan menguatkan jaringan pengaman sosial. Selain itu, perlindungan dan promosi nilai budaya lokal juga penting.

b) Ancaman Berdimensi Teknologi. Mengembangkan kemampuan teknologi domestik, meningkatkan keamanan siber, dan merancang kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi yang aman dapat membantu mengurangi risiko ini.

e. **Monitoring dan Review.** *Monitoring* dan *review* dalam konteks dampak lemahnya postur pertahanan terhadap keamanan di IKN adalah elemen penting dalam strategi manajemen risiko. Langkah ini memungkinkan identifikasi awal dari dampak yang mungkin timbul, dan memastikan bahwa strategi yang diterapkan untuk mengatasi dampak tersebut tetap relevan. Tanpa pengawasan yang kuat, ada risiko bahwa tindakan yang diambil mungkin tidak sesuai dengan dampak yang dihadapi, atau bahkan tindakan yang diambil menjadi usang karena perubahan dalam ancaman atau lingkungan. Pembahasan lebih lanjut pada langkah ini:

1) *Monitoring*. *Monitoring* merupakan langkah dalam memahami dampak berkelanjutan.

a) Dampak Militer. *Monitoring* terhadap dampak lemahnya Postur Pertahanan melibatkan pengawasan terhadap kemungkinan aktivitas agresi militer, pelanggaran batas, dan aksi terorisme. Pemantauan ini bisa dalam bentuk pengumpulan informasi intelijen, pengawasan wilayah batas negara maupun pemantauan media sosial untuk menangkap isu-isu yang berkembang.

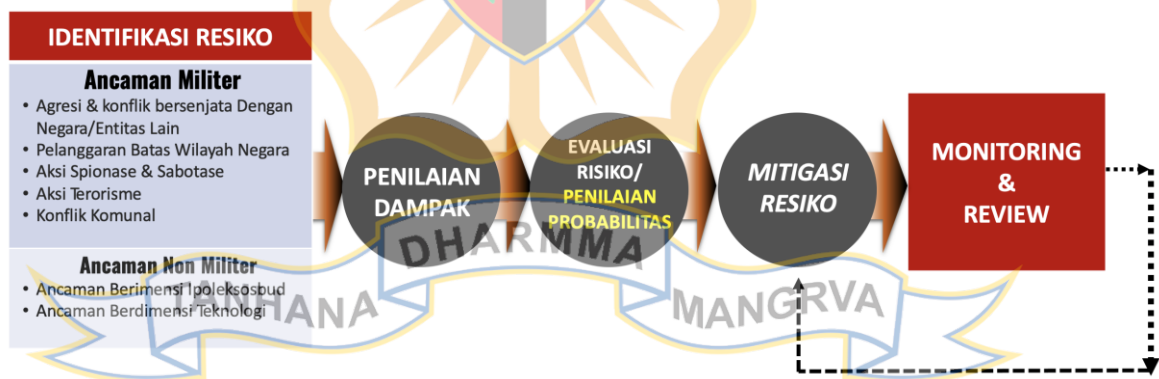
b) Dampak Non-Militer. Dampak ini termasuk pengawasan terhadap fluktuasi ekonomi, ketidakstabilan politik, dan ancaman teknologi. Penyediaan laporan situasi yang rutin mengenai isu-isu ini akan memungkinkan analisis yang tepat mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan.

2) *Review*. Merupakan langkah dalam menilai dan menyelaraskan strategi yang diambil.

a) *Penilaian Periodik*. *Review* perlu dilakukan secara berkala untuk menilai apakah strategi yang ada masih sesuai dengan dampak yang dihadapi. Hal ini termasuk penilaian terhadap efektivitas pasukan yang bertugas, kebijakan *cyber*, dan program-program sosial dalam mencegah atau mengurangi dampak.

b) *Penyesuaian Strategi*. Jika *review* menunjukkan bahwa dampak tertentu tidak diatasi secara efektif oleh strategi yang ada, maka strategi tersebut perlu diubah. Misalnya, jika diidentifikasi Postur Pertahanan lemah terhadap ancaman siber, maka strategi pertahanan siber perlu diperkuat.

c) *Pelibatan Pihak Berkepentingan*. Proses *review* harus melibatkan semua pihak yang terkait dengan keamanan IKN, tidak hanya TNI, termasuk Polri, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini akan memastikan dari pandangan yang beragam dapat diambil dalam menilai dan menyesuaikan strategi.



**Gambar 11. Diagram Alur Analisa Risiko dan Dampak**  
(Sumber : Rekayasa Penulis)

Lemahnya Postur Pertahanan akan sangat berpengaruh pada keamanan di IKN. Dalam konteks pertahanan, postur pertahanan yang lemah akan meningkatkan vulnerabilitas terhadap ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman ini tidak hanya dalam bentuk tradisional, namun juga dapat berupa ancaman non-tradisional seperti terorisme, spionase, dan *cyber attacks*. Lemahnya

Postur Pertahanan juga akan mempengaruhi persepsi negara lain terhadap kemampuan negara dalam menjaga kedaulatannya. Hal ini dapat berdampak mengundang sikap oportunis dari negara atau entitas lain yang memiliki kepentingan. Selain itu, ketidakpastian keamanan dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi, investasi dapat terhambat dan masyarakat tidak aman. Oleh karena itu, memperkuat Postur Pertahanan menjadi hal yang sangat penting dan prioritas dalam menjaga keamanan di IKN.

#### 15. **Penataan dan Peningkatan Postur Pertahanan Secara Terpadu Guna Mengamankan Ibu Kota Nusantara (IKN).**

Setelah dapat dipahami kondisi Postur Pertahanan yang akan mengamankan IKN saat ini, dan dipahami juga dampak dari lemahnya Postur Pertahanan terhadap Keamanan IKN, maka akan muncul pemahaman tentang sebuah kebutuhan baru dalam penataan dan peningkatan Postur Pertahanan. Sebagai pusat pemerintahan baru dan simbol kedaulatan, IKN harus memiliki sistem pertahanan yang tangguh dan adaptif. Mengacu pada Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI, peran TNI sangat sentral dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. TNI memiliki tugas untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan integritas wilayah, dan menjaga kepentingan nasional dari potensi ancaman. Mempertimbangkan hal ini, gelar dan kekuatan satuan TNI di sekitar IKN harus diperkuat, baik dari segi jumlah pasukan, kapabilitas, maupun kesiapsiagaannya. Selain itu, kolaborasi antara TNI dengan dan *stake holder* terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi pertahanan yang terpadu.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) tahun 2020 - 2024 memberikan panduan umum tentang arah dan prioritas pertahanan negara. Salah satu fokusnya adalah mengembangkan pertahanan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Mengingat IKN sebagai pusat pemerintahan baru, maka ada kebutuhan untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian strategi pertahanan agar sesuai dengan karakteristik dan potensi ancaman di wilayah tersebut. Tantangan geografis, sosial, maupun teknologis di IKN memerlukan pendekatan khusus dalam penataan Postur Pertahanan.



Sementara itu, pada Postur Pertahanan Negara tahun 2020 - 2024 menjelaskan bagaimana Indonesia harus menempatkan dan menyusun kekuatannya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan. IKN, sebagai ibu kota baru, tentunya menjadi wilayah yang sangat strategis. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menata ulang atau menyesuaikan Postur Pertahanan di wilayah tersebut, memastikan bahwa alutsista dan satuan militer yang ditempatkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan potensi ancaman. Dengan demikian, upaya penataan dan peningkatan Postur Pertahanan untuk mengamankan IKN memerlukan kolaborasi antar lembaga, adaptasi strategi, serta komitmen untuk terus memperbarui dan meningkatkan kapabilitas pertahanan guna menjaga keamanan IKN.

Selanjutnya dalam pasal ini, penulis akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis '*Scenario Building and Planning*', yang didasarkan pada hasil analisis sebelumnya yang menggunakan metode '*PESTLE*' serta '*Risk and Impact Analysis*'. Penulis akan mengintegrasikan temuan dari kedua metode tersebut dalam kerangka teori "Pertahanan Terpadu" dan teori "*Center of Gravity*". Pada teori Pertahanan Terpadu, menekankan bahwa pertahanan suatu wilayah melibatkan lebih dari sekedar kekuatan militer; ia harus terintegrasi melibatkan aspek-aspek seperti diplomasi, sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat sipil. Dengan meningkatkan Postur Pertahanan yang holistik, penulis mencoba mengeksplorasi pendekatan dan strategi terbaik untuk melindungi IKN dari ancaman, baik dari dalam maupun luar. Ini mencakup peningkatan kekuatan pertahanan, kolaborasi yang lebih erat, penerapan kebijakan pertahanan yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi terkini untuk meningkatkan kinerja sistem pertahanan. Sedangkan teori "*Center of Gravity*", dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi elemen kritis yang mendukung keberlangsungan IKN. Melalui pendekatan "*five rings*", fokus dapat diberikan pada perlindungan kepemimpinan sebagai pusat gravitasi, selanjutnya sistem organik, infrastruktur, populasi dan pasukan lapangan. Dengan memahami dan memperkuat pusat gravitasi ini, IKN dapat dijamin keamanannya menghadapi potensi ancaman eksternal maupun internal. Tujuannya adalah memastikan bahwa IKN, sebagai pusat administratif baru negara, aman dari ancaman nyata serta potensi risiko di masa depan.

Memperkuat Postur Pertahanan dilakukan dengan melakukan langkah-langkah strategis penataan dan peningkatan kekuatan, gelar kekuatan dan kemampuan pertahanan di IKN dan wilayah lain di Indonesia, langkah strategis yang dilakukan meliputi penataan Kekuatan Pertahanan, Gelar Kekuatan Pertahanan dan Kemampuan Pertahanan.

**Penataan dan Peningkatan Kekuatan Pertahanan.** Dilakukan dengan melakukan langkah-langkah strategis guna peningkatan sumber daya pertahanan, baik satuan maupun alutsista pertahanan secara terintegrasi.

a. **Optimalisasi penyelarasan pembangunan Postur Pertahanan Militer dan Postur Pertahanan Nir Militer.**

UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumberdaya Nasional untuk Pertahanan mengatur bagaimana negara memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung pertahanan nasional. Di sini, sumber daya nasional tidak hanya terbatas pada aset militer, tetapi juga melibatkan sektor non-militer seperti industri, teknologi, dan sumber daya manusia. Menunjukkan bahwa pertahanan negara bukan hanya tugas militer semata, tetapi melibatkan berbagai sektor dan unsur masyarakat.

Dalam Permenhan No. 23 Tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, pemerintah memberikan gambaran bagaimana Indonesia harus menempatkan dan menyusun kekuatan pertahannya dalam periode tersebut. Hal ini mencakup baik postur militer maupun nir militer, dengan tujuan untuk menciptakan pertahanan yang kokoh dan berdaya saing. Pembahasan ini menunjukkan betapa pentingnya penyelarasan antara Postur Pertahanan Militer dan Nir Militer. Kedua postur tersebut harus saling mendukung dan bersinergi agar dapat memberikan perlindungan terbaik bagi negara. Oleh karena itu, melalui UU RI No. 23 Tahun 2019 dan Permenhan No. 23 Tahun 2023, pemerintah mencoba untuk memastikan bahwa sumber daya nasional dikelola dengan baik untuk mendukung pertahanan, dan postur pertahanan yang disiapkan adalah yang paling optimal untuk menjaga kedaulatan negara. Pembangunan postur pertahanan negara diarahkan pada tercapainya penyelarasan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam kerangka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan

bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan dengan mengedepankan penguatan pertahanan negara di pulau besar dan gugusan pulau strategis yang menjadi program pembangunan nasional prioritas<sup>74</sup>.

Dikaitkan dengan Teori Pertahanan Terpadu, yang mengedepankan integrasi antara upaya pertahanan militer dan nir militer sebagai respons terhadap ancaman multidimensi. Implementasinya menuntut kolaborasi antara aparat militer, instansi pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya. Tujuannya adalah memperkuat pertahanan negara dari segala sisi, baik dalam aspek tradisional (militer) maupun non-tradisional atau nir-militer (sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi). Dengan penyelarasan pembangunan postur pertahanan militer dan nir-militer ini, maka konsep pertahanan menjadi lebih holistik, adaptif, dan efektif dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai potensi ancaman.

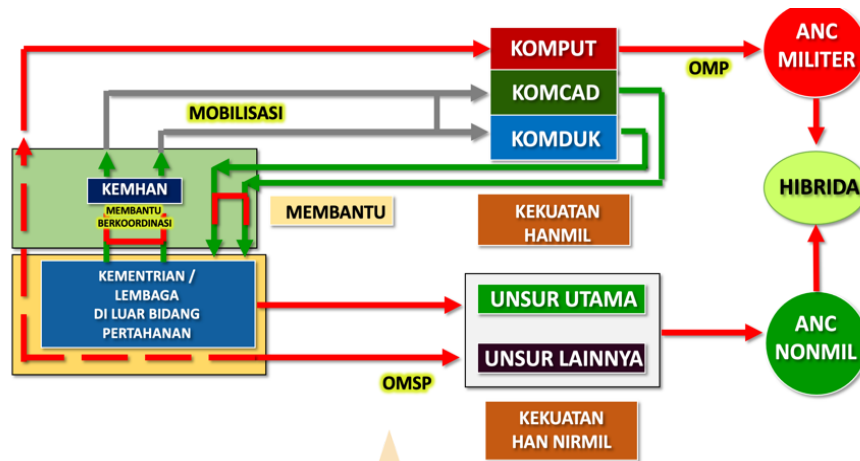
Untuk mengoptimalkan penyelarasan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nir Militer dalam rangka mengamankan Ibu Kota Nusantara (IKN), langkah strategis harus dilakukan melalui pendekatan multidimensional. Strategi pembangunan postur pertahanan militer diarahkan untuk menghadapi ancaman militer, sedangkan postur pertahanan nir militer dirancang untuk menghadapi ancaman non-militer dengan dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keselamatan umum, legislasi dan teknologi. Dua aspek pertahanan ini harus dapat diselaraskan dan disinkronkan untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat dan tangguh. Optimalisasi pembangunan postur pertahanan di IKN membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder, baik dari sektor militer maupun non militer.

Pembangunan postur pertahanan militer mencakup penguatan sistem pertahanan darat, laut dan udara nasional, peningkatan sistem komunikasi dan elektronika, peningkatan sistem peluru kendali strategis, dan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung. Sementara itu, untuk mengoptimalkan pembangunan postur pertahanan nirmiliter, berbagai kementerian dan instansi harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman nirmiliter. Misalnya, ancaman disintegrasi bangsa dan

<sup>74</sup> PERMENHAN RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara tahun 2020-2024.

demokrasi yang anarkis harus ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Intelijen Negara. Ancaman *cyber* dan kejahatan teknologi harus ditangani oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Ancaman keselamatan umum seperti bencana alam dan bioterorisme harus ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan lain sebagainya.

Penyelarasan pembangunan postur pertahanan militer dan nir militer saat ini memang masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu faktor paling penting yang menjadi tantangan adalah aspek koordinasi dan komunikasi antar-instansi. Sistem pertahanan yang melibatkan kedua aspek ini sering kali melibatkan banyak lembaga dan institusi, yang membuat koordinasi dan komunikasi menjadi lebih sulit. Untuk mengatasi tantangan ini, pertama-tama perlu adanya peningkatan dalam koordinasi dan komunikasi antara lembaga dan institusi yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, seperti komite koordinasi atau forum diskusi reguler. Dengan penyelarasan kedua aspek pertahanan ini (baik militer maupun nirmiliter), maka IKN akan memiliki sistem pertahanan yang lebih komprehensif dan efektif. Selain itu, penyelarasan ini juga penting dalam konteks penggunaan sumber daya. Dengan adanya koordinasi dan sinergi antara pembangunan postur pertahanan militer dan nir militer, penggunaan sumber daya dapat lebih efisien dan efektif. Misalnya, melalui koordinasi dan kolaborasi antara agensi pertahanan dan non-pertahanan, dapat dibuat strategi dan taktik pertahanan yang lebih komprehensif. Juga, penyelarasan ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dan strategi pertahanan sesuai dengan tujuan dan prioritas nasional secara keseluruhan. Dengan demikian dapat membantu memastikan bahwa pertahanan dan keamanan menjadi bagian integral dari pembangunan dan kemajuan IKN dan negara secara keseluruhan.



**Gambar 11. Pengintegrasian Komponen Pertahanan Militer dan Nirmiliter**  
(Sumber : rekayasa penulis)

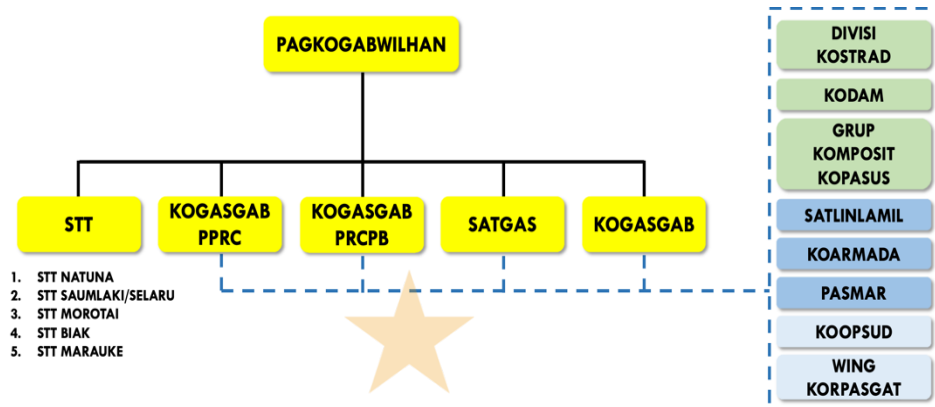
**b. Penguatan Kapasitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).**

Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya baik untuk OMP maupun OMSP, sebagai penangkal bila terjadi ancaman dari luar dan dalam negeri di wilayahnya, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya, dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Panglima TNI<sup>75</sup>. Dalam konteks pengamanan IKN, fungsi Kogabwilhan TNI adalah mengintegrasikan operasi militer ke tiga matra di wilayahnya. Tantangan yang kompleks dan dinamis mendorong kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran serta fungsi Kogabwilhan, khususnya Kogabwilhan I dan II, yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ikut mengamankan IKN. Keadaan ini berlaku dalam berbagai situasi, baik dalam kondisi tertib sipil, darurat sipil, maupun dalam keadaan darurat militer dan perang. Pengamanan IKN bukanlah hal yang sederhana, penerapan konsep “Tri Matra Terpadu” menjadi fondasi yang mutlak diterapkan. Konsep ini mewajibkan tiga elemen – darat, laut, dan udara – untuk saling mendukung dan memiliki inter-operabilitas yang tinggi. Dalam konsep ini, masing-masing elemen harus dapat berfungsi secara efektif dan efisien, sekaligus dapat berkoordinasi satu sama lain dalam

<sup>75</sup> Konsep Umum Operasi Kogabwilhan TNI, KEP Pang TNI Nomor KEP/1124/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.



menghadapi setiap potensi ancaman terhadap IKN, baik dari dalam ataupun luar negeri.

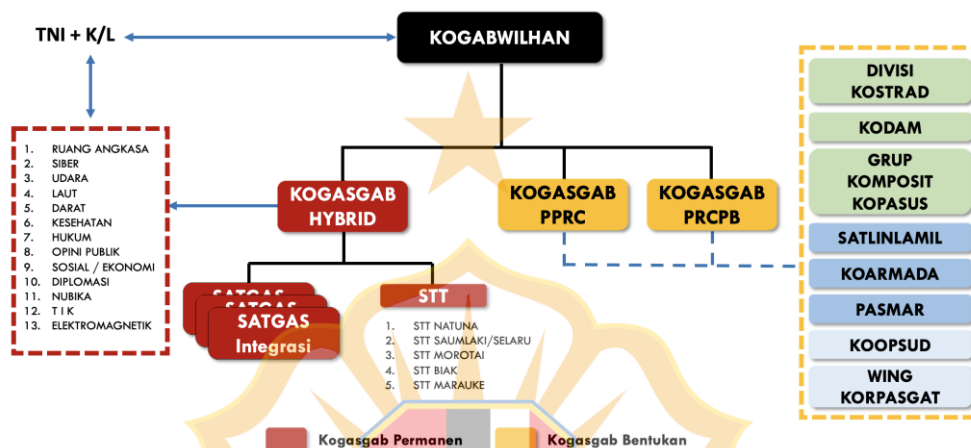


**Gambar 12. Struktur Organisasi Kogabwilhan Es. Pelaksana**

(Sumber : Sops TNI, 2022)

Dalam penguatan organisasi Kogabwilhan, diperlukan upaya inovasi dan adaptasi teknologi serta kerjasama strategis dengan berbagai stakeholder dan kementerian terkait. Dalam konteks teknologi, Kogabwilhan perlu menerapkan teknologi pertahanan terkini, seperti sistem pengawasan elektronik, *drone*, dan sistem senjata berbasis *artificial intelijen* (AI), serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel dalam mengoperasikannya. Kerjasama strategis yang dibangun juga harus melibatkan berbagai sektor, seperti siber, ruang angkasa, kesehatan, hukum, dan opini publik. Dalam bidang siber dan ruang angkasa, Kogabwilhan bisa berkolaborasi dengan agensi siber dan lembaga penelitian ruang angkasa untuk mengembangkan kapabilitas pertahanan dalam domain tersebut, khususnya satelit militer. Di bidang kesehatan, diperlukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi kesehatan lain, sehingga dapat membantu mempersiapkan penanganan situasi darurat medis. Untuk aspek hukum dan opini publik, Kogabwilhan perlu menjalin hubungan dengan lembaga hukum dan media massa untuk memastikan operasional mereka sesuai hukum dan mendapat dukungan publik. Selain itu, aspek ekonomi, diplomasi, energi dan sumber daya, informasi, nuklir, biologi, dan kimia), spektrum elektromagnetik, serta operasi darat, udara, dan laut perlu diperkuat melalui berbagai strategi dan kerjasama. Misalnya, kerjasama dengan kementerian ekonomi dan energi

untuk menjamin ketersediaan sumber daya, dan kerjasama dengan kementerian luar negeri untuk memastikan dukungan internasional. Akhirnya, pada aspek legalitas dan hukum perlu diperkuat dengan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan setiap operasi dan kebijakan Kogabwilhan berjalan sesuai hukum yang berlaku.



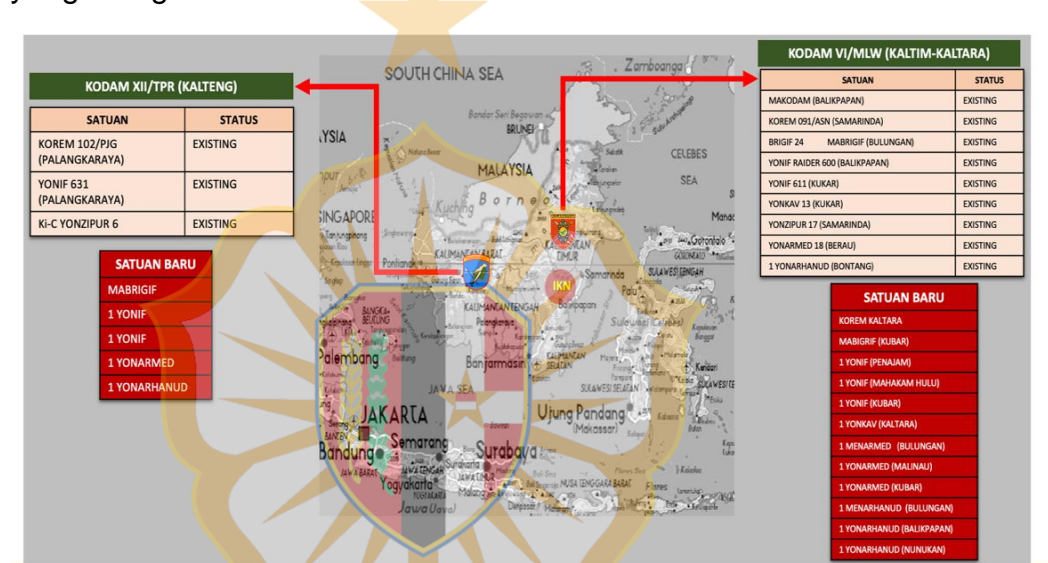
**Gambar 13. Rekomendasi Struktur Organisasi Kogabwilhan**  
(Sumber : rekayasa penulis)

c. **Pengembangan dan Pembentukan Satuan TNI Baru di IKN.** Pengembangan dan pembentukan satuan TNI baru di IKN didasarkan dari proyeksi potensi ancaman yang paling mungkin timbul, baik potensi ancaman dari arah utara, arah barat, arah tenggara, maupun potensi ancaman siber dan terorisme. Adapun konsep pengembangan dan pembentukan satuan TNI tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Pemindahan Mabes TNI dan Mabes Angkatan ke IKN.
- 2) Penguatan kemampuan STT (Satuan TNI Terintegrasi) di Natuna, Saumlaki/Selaru, Morotai, Biak dan Merauke, dengan kemampuan *Multi-Domain Operation* (MDO).
- 3) **Satuan TNI AD.** Untuk dapat melindungi dan mempertahankan wilayah IKN dari potensi ancaman, khususnya dari **arah utara**, maka secara umum penataan dan pembentukan satuan TNI-AD untuk mengamankan IKN adalah sebagai berikut :

- a) Pembentukan **Kodam IKN** beserta dengan satuan dibawahnya.
- b) **Penguatan kemampuan Kodam-Kodam Penyangga**, yang meliputi Kodam VI/MLW dan Kodam XII/TPR, dengan pembentukan satuan–satuan baru, baik satuan kewilayahan maupun Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur.

Penguatan kemampuan Kodam – Kodam penyangga ini, haruslah didesain sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi potensi ancaman yang mungkin timbul.

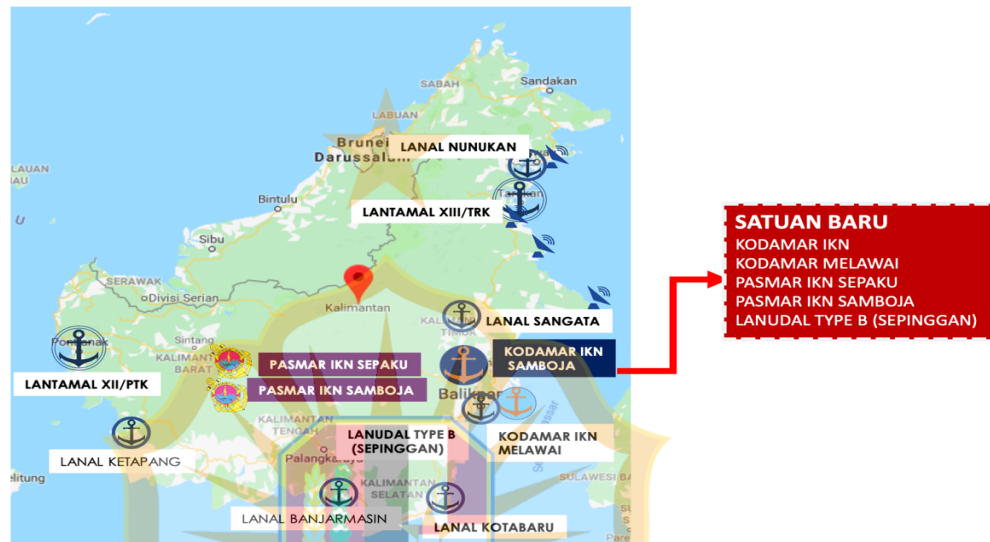


**Gambar 14. Konsep Penguatan Postur Kodam Penyangga IKN**  
(Sumber : rekayasa penulis)

- 4) **Satuan TNI AL**. Peningkatan Postur Pertahanan Laut untuk melindungi IKN dilaksanakan berdasarkan Konsep Pertahanan Berlapis, pada lapisan medan pertahanan penyangga yang berada di luar garis batas ZEE, medan pertahanan utama yang berada dari laut ZEE sampai dengan laut teritorial dan daerah perlawanan yang merupakan perairan kepulauan. Peningkatan Postur Pertahanan Laut ini harus diarahkan untuk dapat mewujudkan kemampuan pengendalian laut (*local sea control*) dan kemampuan penangkalan (*anti access/anti denial*), yang diuraikan:

- a) Kemampuan Pengendalian Laut (*Local Sea Control*), merupakan kemampuan untuk menguasai dan mengontrol wilayah perairan Indonesia.

- b) Kemampuan Penangkalan (*Anti Access/Anti Denial*), melalui:
- (1) Kemampuan untuk mengendalikan *choke points* di perairan yurisdiksi nasional, dan memungkinkan untuk mendapatkan pengendalian laut (*sea control*).
  - (2) Kemampuan untuk mengendalikan ALKI, khususnya ALKI II untuk mendapatkan penguasaan laut.



**Gambar 15. Konsep Penguatan Postur TNI AL di Kalimantan**  
(Sumber : rekayasa penulis)

- c) Kemampuan *Anti Amphibi/Anti Drone*, yang dilaksanakan melalui pembangunan kekuatan Pertahanan Pantai untuk menangkal serangan amfibi dan drone.

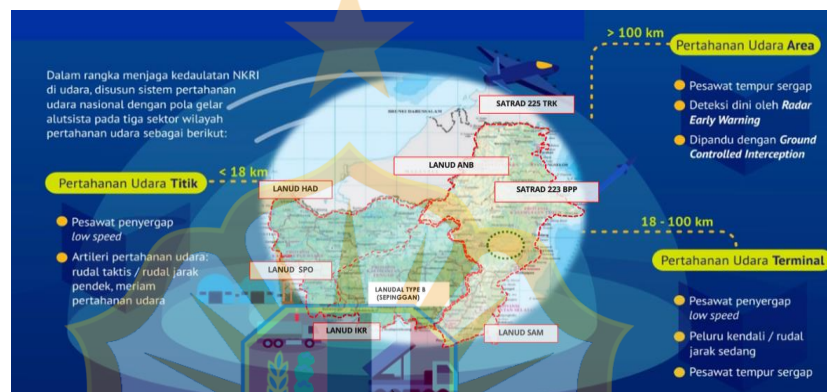
Untuk mewujudkan konsep diatas, perlu dilakukan melalui peningkatan kemampuan pertahanan maritim dan kemampuan Pasmar di IKN dan wilayah sekitarnya, dengan pembentukan satuan-satuan TNI AL untuk mendukung hal tersebut, termasuk pembangunan *Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (C4ISR) Maritim serta *Integrated-Networked Air Defense & Anti-Submarine Warfare*.

- 5) **Satuan TNI AU.** Peningkatan postur Pertahanan Udara harus dilaksanakan berdasarkan lapisan medan pertahanan, yang terdiri dari *medan pertahanan penyangga* yang berada di luar garis batas ZEE dan lapisan udara di atasnya, *medan pertahanan utama* yang berada dari laut



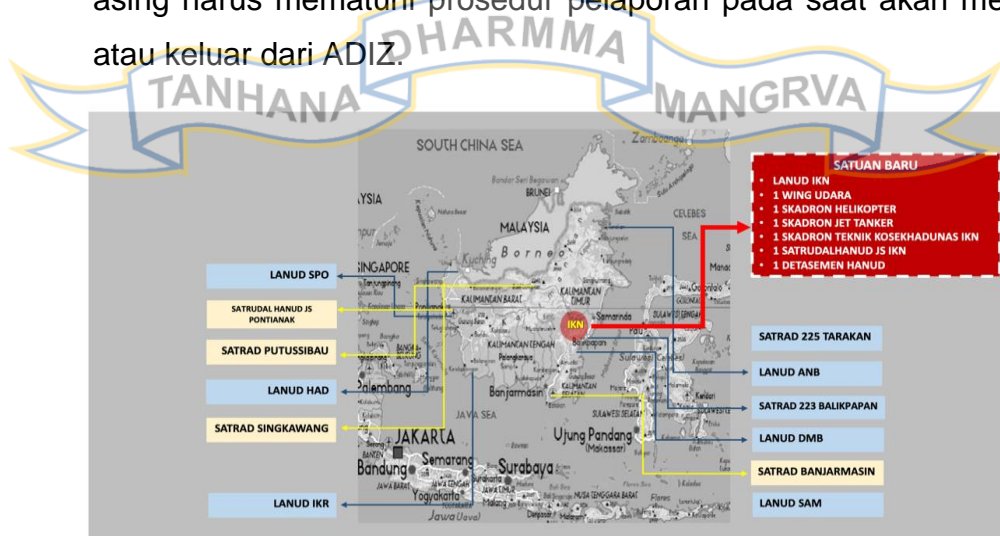
ZEE sampai dengan laut teritorial dan lapisan udara di atasnya serta *daerah perlawanan* yang merupakan wilayah perairan kepulauan dan lapisan udara di atasnya. Operasi Pertahanan Udara (Ops Hanud) untuk melindungi wilayah IKN harus juga disusun dengan pembagian sektor :

- Hanud Area, dengan sarana pesawat tempur.
- Hanud Terminal, dengan sarana Rudal jarak sedang dan pesawat tempur.
- Hanud Titik, dengan sarana Rudal taktis dan meriam Hanud.



**Gambar 16. Visualisasi Pertahanan Udara Berlapis pengamanan IKN**  
(Sumber : rekayasa penulis)

Untuk mendukung Konsep Strategi Pertahanan Udara ini, perlu ditetapkan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ). Setelah Konsep ADIZ ditetapkan melalui *Notice to Airman* (Notam), maka setiap penerbangan asing harus mematuhi prosedur pelaporan pada saat akan memasuki atau keluar dari ADIZ.



**Gambar 17. Konsep Penguatan Postur TNI AU di Kalimantan**  
(Sumber : rekayasa penulis)



**Penataan dan Peningkatan Kemampuan Pertahanan.** Dilakukan dengan langkah strategis guna meningkatkan kemampuan tempur pertahanan, sehingga memiliki daya tangkal yang tinggi dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap eksistensi IKN dan kedaulatan negara Republik Indonesia.

a. **Pengembangan Konsep Satuan Gabungan TNI dalam bentuk MDTF (*Multi -Domain Task Force*).**

Pengembangan satuan dalam bentuk *Multi-Domain Task Force* (MDTF) dapat menjadi pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan keamanan IKN. MDTF adalah konsep satuan yang mengintegrasikan kemampuan melakukan *Multi-domain Operation* (Operasi diberbagai bentuk medan), yaitu kemampuan melakukan operasi di beberapa domain—darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber—untuk menciptakan keunggulan operasional dan strategis<sup>76</sup>. Pengembangan konsep satuan ini dilakukan dengan :

- 1) **Integrasi Kemampuan.** MDTF memerlukan integrasi antar berbagai kecabangan militer untuk menciptakan sinergi dalam operasi. Dalam konteks IKN, ini berarti pasukan darat, laut, dan udara, serta unit-unit yang akan memiliki kemampuan ruang angkasa dan siber, harus bekerja sama secara harmonis. Selain itu, kerjasama antar instansi, seperti dengan Badan Intelijen Negara, BSSN, Kemenkominfo, Kepolisian, dan Kementerian / Lembaga terkait lainnya<sup>77</sup>.
- 2) **Manajemen dan Koordinasi.** Sebuah pusat komando yang efektif, yang mampu mengkoordinasikan operasi di berbagai domain, merupakan kunci keberhasilan MDTF. Dalam konteks IKN, berarti membangun dan mempertahankan sistem komunikasi dan koordinasi yang andal antar berbagai domain. Pengembangan infrastruktur *Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR)* akan menjadi komponen yang sangat penting.
- 3) **Adaptasi Teknologi.** MDTF juga berfokus pada adaptasi teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI), *drone*, dan teknologi siber serta

<sup>76</sup> Carter, David L., et al. "Multi-Domain Battle: Evolution of Combined Arms for the 21st Century 2025-2040." *U.S. Army Training and Doctrine Command*, 2017.

<sup>77</sup> "The Role of Joint Operations in the Evolution of Airpower." *Air and Space Power Journal*, 2021

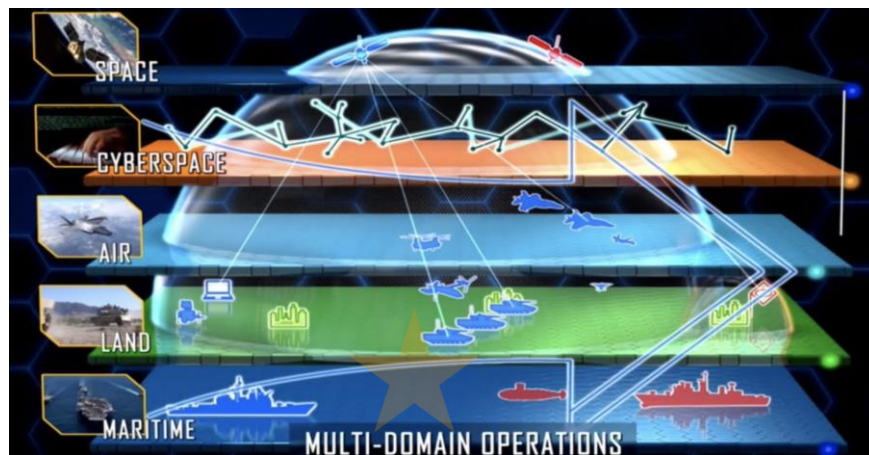
penggunaan satelit militer secara mandiri. Kondisi ini menuntut adanya Postur TNI yang modern dan adaptif, untuk tetap berada di garis depan dalam menghadapi dinamika ancaman dan perubahan taktis.

Dalam mewujudkan konsep *Multi-Domain Task Force* (MDTF) ini, diperlukan sejumlah persiapan dan peningkatan kapabilitas. Pertama dan yang terpenting adalah peningkatan kemampuan di semua domain, termasuk darat, laut, udara, siber, dan kemampuan ruang angkasa. Kondisi ini juga menuntut Postur Pertahanan militer yang memiliki kemampuan ruang angkasa mandiri, dengan kepemilikan dan penguasaan operasional satelit militer. Mempunyai satelit militer mandiri berarti negara tidak harus bergantung pada satelit milik negara lain, memberikan tingkat otonomi dan keamanan yang lebih tinggi. Walaupun diakui, kepemilikan satelit militer akan berkonsekuensi pada kebutuhan anggaran yang besar.

Selain itu, teknologi memainkan peran penting dalam operasi multi-domain. Penguasaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, *drone*, dan teknologi siber akan menjadi kunci dalam penguatan keunggulan taktis dan strategis, termasuk dalam mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam doktrin, prosedur, dan taktik. Selanjutnya, dalam lingkungan yang semakin kompleks dan saling terkait ini, TNI juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak lain seperti pemerintah, industri, universitas, dan mitra internasional.

Integrasi konsep satuan *Multi-Domain Task Force* (MDTF) ini pada Kogabwilhan TNI dalam mengamankan sektor tanggung jawabnya, khususnya Ibu Kota Negara (IKN), dapat menjadi suatu langkah strategis dalam peningkatan keamanan nasional Indonesia. Melalui penggunaan konsep MDTF, Kogabwilhan dapat meningkatkan kemampuan operasional dan responsifnya dalam menghadapi berbagai jenis ancaman di wilayah tersebut. Konsep MDTF dapat sangat membantu Kogabwilhan dalam mengamankan IKN. Misalnya, dengan menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, *drone*, teknologi siber dan satelit militer, Kogabwilhan dapat meningkatkan pengawasan dan keamanan IKN, serta merespons lebih cepat terhadap potensi ancaman. Konsep MDTF ini sangat tepat dikembangkan pada Satuan TNI Terintegrasi (STT) yang sudah tergelar

saat ini di masing-masing Kogabwilhan, baik di Natuna, Saumlaki/Selaru, Morotai, Biak maupun Merauke.



**Gambar 18. Visualisasi Multi-Domain Operation**

(Sumber : US Army Website)

**b. Mengedepankan konsep strategi A2/AW (*anti-Access/Area Denial*).**

Strategi *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD) merupakan strategi militer yang dirancang untuk menghalangi atau membatasi lawan dari akses dan operasi dalam area geografis tertentu. Konsep ini telah menjadi bagian penting dari strategi pertahanan Amerika Serikat, terutama dalam menghadapi potensi tantangan terhadap akses dan kebebasan beroperasi di wilayah strategis, seperti Pasifik Barat<sup>78</sup>. Mengadopsi konsep A2/AD dari militer beberapa negara maju di dunia, TNI dapat mengedepankan strategi pembagunan postur pertahanan militer yang disesuaikan dengan kekhasan kondisi Indonesia. Menyusun strategi A2/AD memerlukan beberapa elemen penting, termasuk kapabilitas udara, maritim, darat, perang siber, dan sistem intelijen canggih serta diplomasi<sup>79</sup>. Penerapan strategi ini akan memastikan bahwa TNI dapat dengan efektif mencegah akses musuh dan menghentikan operasi musuh di area yang dilindungi - dalam hal ini IKN<sup>80</sup>. Adapun konsep strategi A2/AW ini dijabarkan secara terintegrasi, dengan memperkuat kemampuan-kemampuan alutsista dan personelnya :

<sup>78</sup> Department of Defense, "Joint Operational Access Concept (JOAC)," January 17, 2012. [https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/JOAC\\_Jan%202012\\_Signed.pdf](https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/JOAC_Jan%202012_Signed.pdf)

<sup>79</sup> Babbage, Ross. "Defining a Strategy for Australia's Maritime Air Warfare Requirements." *Center for Strategic and Budgetary Assessments*, 2020

<sup>80</sup> Gormley, Dennis M., et al. "A Potent Vector: Assessing Chinese Cruise Missile Developments." *Joint Force Quarterly* 75, 2014

- 1) Kemampuan Udara. TNI Angkatan Udara perlu memperkuat dan memodernisasi postur armadanya dengan pesawat tempur, pesawat pengawasan, dan drone yang lebih canggih (minimal Gen 4.5 hingga Gen 5.0). Kapabilitas pertahanan udara juga perlu ditingkatkan, khususnya sistem pertahanan misil dan radar pengawasan.
- 2) Kemampuan Maritim. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, TNI Angkatan Laut memainkan peran sangat penting dalam strategi A2/AD. Pengadaan kapal perang, kapal selam, dan sistem pertahanan pantai perlu ditingkatkan.
- 3) Kemampuan Darat. TNI Angkatan Darat harus memperkuat sistem pertahanan darat, termasuk tank, artileri, dan terutama sistem rudal.
- 4) Penguatan C4ISR. *Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (C4ISR) adalah kunci dari strategi A2/AD.
- 5) Kemampuan Perang Siber dan Elektronik. Mengingat ancaman di dunia digital semakin meningkat, kapabilitas perang siber dan elektronik juga mutlak diperkuat.
- 6) Diplomasi Pertahanan (Kerjasama Regional dan Internasional). Untuk memperkuat strategi A2/AD, diplomasi pertahanan yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional sangat penting.
- 7) Pembangunan Infrastruktur pertahanan. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertahanan yang kuat dan resilien juga sangat penting, termasuk pangkalan militer, bandara, pelabuhan, dan jaringan komunikasi.



**Gambar 19. Visualisasi Protokol Anti Acces/Area Denial**  
 (Sumber : rekayasa penulis dari paparan Gub. Lemhannas RI)

Protokol *anti-access/area denial* (A2/AD) ini sangat penting dalam melindungi IKN dan memastikan keamanannya. Diplomasi, mencakup upaya untuk mencegah atau mengurangi konflik melalui dialog dan negosiasi. Pengawasan ruang Darat, Laut, dan Udara, berfokus pada pemantauan dan pengawasan intensif terhadap semua domain potensial operasi musuh. Zona Larangan Terbang dan Zona Eksklusif Maritim, adalah wilayah yang ditetapkan di mana aktivitas tertentu, seperti penerbangan atau operasi maritim dilarang. Pertahanan Siber, melibatkan perlindungan terhadap infrastruktur siber dan data dari serangan siber. Pertahanan Berlapis, merujuk pada pendekatan pertahanan yang melibatkan berbagai elemen dan tingkatan, dari pertahanan terdepan hingga pertahanan dalam. Penyekatan Komunikasi, merujuk pada tindakan yang diambil untuk memutuskan atau menghambat komunikasi musuh. Dan akhirnya Aksi Balas, mencakup tindakan yang diambil untuk merespons ancaman atau serangan yang ada.

- c. **Alternatif arsitektur pertahanan dan keamanan IKN secara non-fisik, dengan merancang *metaverse* IKN, melalui pemanfaatan *virtual reality* (VR) dan *augmented reality* (AR).**

Konsep alternatif arsitektur IKN menggunakan teknologi *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR), memungkinkan penciptaan lingkungan digital tiga dimensi yang interaktif dan imersif. Dalam konteks IKN, *metaverse* ini dapat menjadi replika digital ibu kota berupa bangunan fisik, lengkap dengan detail arsitektural dan struktur interior yang akurat. Teknologi ini



memungkinkan pengguna, baik itu staf pemerintah atau pemimpin, untuk 'memasuki' dan 'menavigasi' bangunan ini dalam lingkungan virtual, menghasilkan situasi yang sangat mirip dengan berada di bangunan fisik itu sendiri. Aplikasi ini, selain menciptakan alternatif akses ke IKN, juga memberikan kesempatan untuk memperkuat Postur Pertahanan. Dengan *metaverse* IKN, TNI dapat melibatkan berbagai skenario simulasi kontijensi di bidang pertahanan dan keamanan, mulai dari latihan menghadapi dinamika ancaman militer dari luar maupun dalam negeri, ancaman terorisme, hingga situasi darurat akibat dinamika bencana alam.

Manfaat paling signifikan dari konsep ini dapat dilihat ketika IKN fisik tidak dapat berfungsi, baik akibat serangan pihak musuh, gangguan keamanan berskala besar ataupun akibat bencana alam. Dalam keadaan semacam itu, *metaverse* IKN bisa menjadi '*back-up*' yang sangat berharga. Meski bangunan fisik mungkin tidak dapat diakses, operasional pemerintahan dapat terus berjalan di dalam lingkungan digital ini. Staf dan pemimpin pemerintahan dapat terus berkomunikasi, berdiskusi, dan membuat keputusan penting untuk menjaga kontinuitas pemerintahan. Indonesia memiliki pengalaman sejarah ibu kota negara berpindah pindah beberapa kali akibat adanya dinamika keamanan yang mengakibatkan tidak dapat fungsinya ibu kota negara dan harus dipindahkan ke lokasi lain. Dengan teknologi ini, maka fungsi pemerintahan dapat tetap dijalankan secara virtual, walaupun secara fisik ibu kota negara sudah tidak berfungsi. Meskipun demikian, penting untuk menyeimbangkan manfaat ini dengan tantangan dan risiko yang ada, seperti keamanan siber dan privasi data, serta memastikan bahwa teknologi yang dibutuhkan untuk akses ke *metaverse* IKN tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan secara aman.

Dengan demikian, penggunaan teknologi ini dalam konteks pengamanan IKN, dapat memberikan alat dan metode baru untuk menyiapkan dan merespons situasi darurat. Dengan mempersiapkan respon yang efektif, fleksibel, dan adaptif terhadap ancaman, dapat diminimalisir dampak dan dipastikan kelangsungan operasional pemerintahan. Beberapa negara di dunia yang telah memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung fungsi pemerintahan dan pertahanan keamanan dinegara mereka, antara lain

Amerika Serikat, Israel, Singapura, Estonia, Inggris, China, Kanada dan Korea Selatan. Serta banyak negara lain yang juga sedang bergerak ke arah yang sama. Implementasi teknologi ini menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan, tetapi juga membawa tantangan dalam hal keamanan, dan kesiapan teknologi. Oleh karenanya dalam penerapan teknologi ini, pemerintah juga harus mampu menyiapkan dan menerapkan protokol keamanan bagi penggunaan teknologi ini, khususnya penerapan dalam bidang pertahanan dan keamanan serta jalannya roda pemerintahan di IKN.

**Penataan Gelar Kekuatan Kemampuan Pertahanan.** Dilakukan dengan melakukan langkah strategis guna menata penggelaran kekuatan pertahanan sesuai kemampuannya dihadapkan pada potensi ancaman terhadap IKN dan terhadap seluruh bagian wilayah NKRI.

a. **Optimalisasi Konsep Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Pulau-Pulau Strategis.**

Dalam konteks pengamanan IKN, penataan dan peningkatan Postur Pertahanan harus dilakukan secara terintegrasi dan saling mendukung. Salah satu langkah yang dapat diambil dalam rangka peningkatan ini adalah optimalisasi konsep pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis. Konsep penataan dan peningkatan postur pertahanan yang hendak dicapai adalah mewujudkan postur pertahanan yang ideal, di mana setiap kelompok pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis, serta Pulau - Pulau Kecil Terluar (PPKT) memiliki kemandirian pertahanan yang tinggi, dengan penggelaran kekuatan pertahanan yang proporsional diseluruh wilayah NKRI, dan terintegrasi satu sama lainnya<sup>81</sup>.

Konsep pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis ini penting, mengingat posisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Dalam konteks IKN, strategi ini memiliki relevansi yang tinggi, dimana optimalisasi konsep ini dapat dilakukan melalui berbagai cara :

- 1) Peningkatan infrastruktur pertahanan dan keamanan di pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis. Hal ini dapat berupa

<sup>81</sup> Permenhan RI No. 12 tahun 2023, tentang Doktrin Pertahanan Negara, halaman 26

peningkatan fasilitas militer, seperti pangkalan militer, sistem radar, dan fasilitas lainnya yang mendukung operasional pertahanan. Tiap-tiap pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil diharapkan mampu menyelenggarakan *pertempuran secara mandiri dan berlarut*.

2) Peningkatan kapasitas personel TNI. Hal ini dapat dilakukan melalui perekrutan personel militer lokal di pulau-pulau tersebut yang memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi dan lingkungan lokal, serta pelatihan dan pendidikan militer yang intensif untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka.

3) Penguatan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pertahanan dan keamanan. Ini bisa dilakukan melalui kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain.

4) Peningkatan teknologi pertahanan. Teknologi modern sangat penting dalam operasional pertahanan dan keamanan modern.

Optimalisasi konsep pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, serta diiringi dengan upaya-upaya lainnya dalam rangka peningkatan Postur Pertahanan IKN.

**b. Sinkronisasi Rencana Rinci Wilayah Pertahanan dan Tata Ruang Wilayah dalam Pembangunan Nasional di IKN dan Pulau Kalimantan.**

Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang RTR KSN IKN 2022-2024 menggariskan kerangka pembangunan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara, Perpres No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN menetapkan lembaga yang memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan IKN. Keduanya menjadi dasar penting dalam sinkronisasi Rencana Rinci Wilayah Pertahanan dan Tata Ruang Wilayah di IKN. Sinkronisasi ini menegaskan bahwa aspek pertahanan dan keamanan harus terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang. Dengan memadukan konsep pertahanan dan tata ruang, pembangunan IKN diharapkan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memperhatikan kesiapan dan kapabilitas pertahanan negara. Otorita IKN memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan tata ruang

dan pembangunan yang dijalankan di IKN selaras dengan kebutuhan pertahanan.

Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di IKN dan pulau Kalimantan merupakan langkah strategis dalam peningkatan Postur Pertahanan secara terpadu. Konsep ini mencakup perencanaan penggunaan ruang dan wilayah dengan memperhatikan aspek pertahanan untuk menjaga keamanan di IKN. Integrasi RRWP dan RTRW memerlukan koordinasi dan kerja sama antara berbagai pihak. Perencana kota, pakar lingkungan, pakar ekonomi, dan pakar pertahanan, semuanya perlu bekerja sama dalam proses ini. Hal ini memungkinkan untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi yang sejalan dengan tujuan dan kebutuhan pertahanan. Sebagai contoh, rencana pembangunan jalur kereta api dan jaringan jalan di IKN yang memenuhi standar manuver kendaraan lapis baja satuan TNI AD, termasuk jalan yang memungkinkan didarati oleh pesawat TNI AU jika dalam situasi darurat, jika bandara yang ada tidak berfungsi, dan lain sebagainya. Namun, proses perencanaan dan perwujudan konsep ini bukanlah proses sekali jadi.

Sinkronisasi RRWP dengan RTRW di IKN dan Kalimantan memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. Suksesnya sinkronisasi ini akan mengeliminasi sengketa lahan, menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan atau ruang, dan memastikan setiap ruang di IKN dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai fungsinya. Untuk pembangunan infrastruktur wilayah pertahanan di IKN, diperlukan aturan yang berupa keharusan dan larangan yang harus dikoordinasikan. Sebagai contoh, ketentuan dan keharusan kebutuhan untuk jalan dan jembatan yang mampu menopang 60 ton, lebar yang cukup untuk alutsista berat seperti tank, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi yang mandiri, ketahanan terhadap gempa atau ledakan rudal, serta adanya *buffer zone* sejauh 500 meter. Sementara larangan yang diberlakukan mencakup kawasan yang bebas dari industri, jaringan SUTET, pipa gas, dan bangunan atau tempat yang berpotensi untuk sabotase atau penembak sniper dalam jarak tembak radius 600 meter.

Pembangunan sistem pertahanan IKN harus sinkron dengan Rencana Induk IKN. Untuk itu perlu koordinasi yang intensif antar K/L dan pemda, terkait dengan kebutuhan anggaran pembangunan, kebutuhan lahan untuk satuan dan pendataan status lahan, dan sinkronisasi RTRW provinsi dan RDTR Kabupaten/Kota dengan RWP dan RRWP diseluruh Kalimantan.

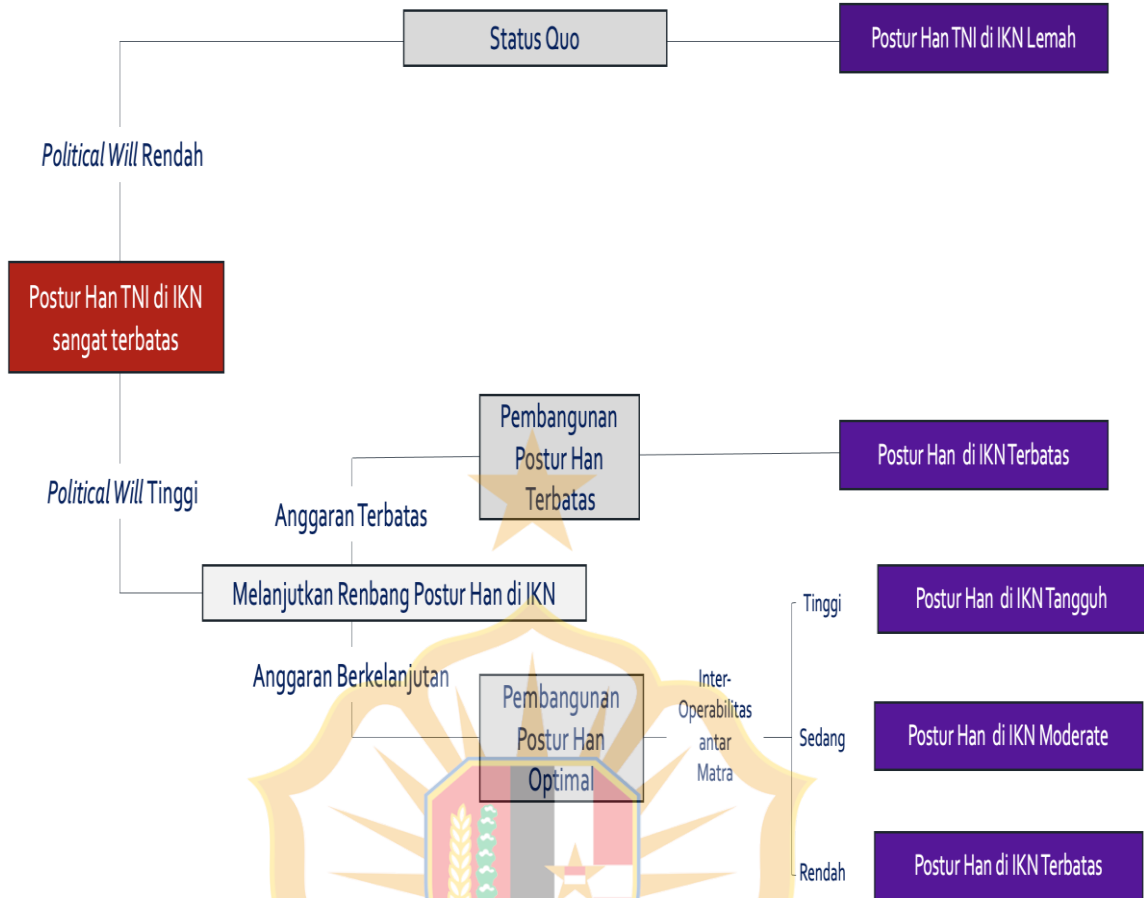
Implementasi dari 8 (delapan) konsep strategis dalam penataan dan peningkatan postur pertahanan diatas, yang meliputi penataan dan peningkatan kekuatan, gelar kekuatan dan kemampuan pertahanan, memerlukan fondasi yang kuat untuk dapat berjalan dengan efektif. Fondasi tersebut adalah kombinasi antara 'kemauan politik' pemerintah dan ketersediaan 'dukungan anggaran yang berkelanjutan'. Kemauan politik atau '*political will*' merupakan faktor esensial yang menentukan arah dan momentum kebijakan pertahanan. Tanpa keberanian dan keinginan dari pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan strategis, sekalipun konsep yang diajukan terbaik, implementasinya akan stagnan. '*Political will*' adalah daya dorong utama yang mendorong agenda pertahanan ke depan, memastikan bahwa ada keseriusan di balik setiap rencana yang diajukan.

Sementara itu, ketersediaan 'dukungan anggaran yang berkelanjutan' menentukan *feasibility* atau kelayakan dari setiap konsep yang diajukan. Tanpa pendanaan yang memadai dan berkelanjutan, ide terbaikpun akan dapat terhambat. Anggaran yang stabil dan cukup, akan memastikan bahwa setiap rencana dapat diterapkan dengan baik, dari tahap perencanaan hingga eksekusi. Jika salah satu atau bahkan kedua faktor di atas absen, maka delapan konsep strategis yang diajukan penulis akan menghadapi tantangan signifikan dalam penerapannya. Realisasi dari konsep-konsep tersebut bukan hanya soal ide yang brilian, tapi juga tentang bagaimana mewujudkannya dalam praktik. Dengan mencatat pentingnya kedua faktor ini, penulis kemudian bermaksud untuk menggunakan metode analisis '*Scenario Building and Planning*'. Melalui pendekatan ini maka akan dapat digali berbagai kemungkinan skenario berdasarkan variabel 'kemauan politik' dan 'ketersediaan anggaran'. Dengan demikian akan dapat dirumuskan berbagai alternatif kebijakan atau strategi mitigasi untuk menghadapi setiap kemungkinan kondisi yang muncul.



*Political Will* (kemauan politik) yang tinggi dalam membangun dan memperkuat Postur Pertahanan diwujudkan setidaknya dalam tiga hal. *Yang pertama*, adalah dirumuskannya konsep pembangunan postur pertahanan yang modern dan tangguh serta adaptif terhadap dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. Rumusan konsep ini disusun oleh Kementerian Pertahanan bersama TNI, dalam bentuk Permenhan tentang Postur Pertahanan Negara, yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2045 selaras dengan pencapaian Indonesia Emas, dan ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) dan terintegasi dengan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, sehingga pembangunan Postur Pertahanan selaras dengan pembangunan sektor lain. *Yang kedua*, adalah ditetapkan Road map (peta jalan) tahapan pembangunan Postur Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI hingga tahun 2045, dengan tujuan akhir adalah terwujudnya Postur Pertahanan yang tangguh dan optimal, memiliki inter-operabilitas antar matra yang tinggi, dalam mengamankan IKN dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Dan *yang ketiga*, adalah tersusunnya program dan anggaran pembangunan Postur Pertahanan, yang didalamnya memuat juga program menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri (Inhan) yang juga diproyeksikan sampai tahun 2045.

Dengan adanya *political will* yang tinggi, program pembangunan Postur Pertahanan untuk IKN belum dapat dipastikan berjalan. Dibutuhkan dukungan penuh dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang dalam hal ini dijabarkan oleh pembantunya dalam pemerintahan yaitu Menkeu dan Ka Bappenas RI untuk memberikan dukungan dan persetujuan anggaran yang dibutuhkan. Tingkat dukungan anggaran akan sangat berpengaruh pada perwujudan Postur Pertahanan di IKN, semakin optimal dukungan anggaran pertahanan yang diberikan akan semakin mendukung terwujudnya postur pertahanan yang tangguh, dan sebaliknya. Selanjutnya dalam mengelola anggaran pertahanan yang optimal tersebut, perwujudan Postur Pertahanan di IKN pada khususnya juga akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial Kemhan dan TNI dalam mewujudkan Inter-operabilitas alutsista antar matra. Ego dan kepentingan sektoral biasanya menjadi kendala utama dalam mewujudkan inter-operabilitas alutsista antar matra.



**Gambar 20. Bifurkasi – Pembangunan Postur Pertahanan di IKN**  
(Sumber : rekayasa penulis)

Dalam analisis *scenario building*, penulis menyusun 5 skenario dalam pembangunan Postur Pertahanan untuk IKN ini. Yang pertama, **Skenario-1**, adalah skenario terburuk, dimana pembangunan postur pertahanan hanya terbatas pada pemeliharaan alutsista yang ada secara terbatas dan peningkatan Postur Pertahanan sampai tahun 2045 tidak lebih dari 5% dari kondisi saat ini. Interoperabilitas antar satuan operasi tidak terwujud, sehingga postur pertahanan hanya difokuskan pada Ring-1 pertahanan IKN (seluruh wilayah IKN), khususnya instalasi penting dan strategis nasional di IKN, seperti Istana Negara, kantor pejabat penting negara, sumber instalasi listrik dan air, pusat informasi dan lain sebagainya. Skenario ini dimunculkan penulis, dengan asumsi jika ada dinamika nasional yang memaksa, seperti saat masa pandemi covid-19 yang lalu, sehingga anggaran di tiap kementerian di *refocusing* untuk mendukung penanganan wabah covid nasional, yang juga berimbas pada anggaran pertahanan.

INDIKATOR DAN SKENARIO	S1: Anggaran Postur Han Sangat Minim (Skenario Terburuk)	S2: Anggaran Postur Han Terdukung Terbatas (25% - 40%)	S3: Anggaran Postur Han Terdukung Sedang (40% - 60%)	S4: Anggaran Postur Han Terdukung Memadai (60% - 90%)	S5: Anggaran Postur Han Terdukung Optimal (> 90%)
Kebijakan Strategi Pembangunan Postur Han di IKN	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Peningkatan kekuatan Han di IKN	<5%	5% - 25%	25,1% - 50%	50,1% - 90%	>90%
Terwujudnya Inter-operabilitas TNI	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Pola gelar kekuatan sesuai / dihadapkan pada potensi ancaman	Fokus - Terbatas pada Ring 1	Dominan Ring 1, terbatas pada Ring 2,3	Dominan pada Ring 1,2 dan terbatas pada Ring 3	Dominan Ring 1,2,3	Dominan pada Ring 1, 2,3
Tingkat teknologi alutsista Han di IKN	Sangat Terbatas	Terbatas	Moderate	Tinggi	Tangguh



**Tabel I. Analisis – Pembangunan Postur Pertahanan di IKN**

(Sumber : rekayasa penulis)

**Skenario-2**, jika realisasi anggaran pertahanan sampai tahun 2045 terbatas, yang hanya mampu mendukung anggaran pemeliharaan alutsista secara terbatas akan tetapi sudah mampu meningkatkan kekuatan pertahanan antara 5% - 25% dari kondisi kekuatan pertahanan saat ini, namun inter-operabilitas antar matra juga belum dapat diwujudkan. Dengan kondisi ini, diharapkan pertahanan dapat secara dominan/optimal mengamankan seluruh Ring-1, namun masih terbatas pada Ring-

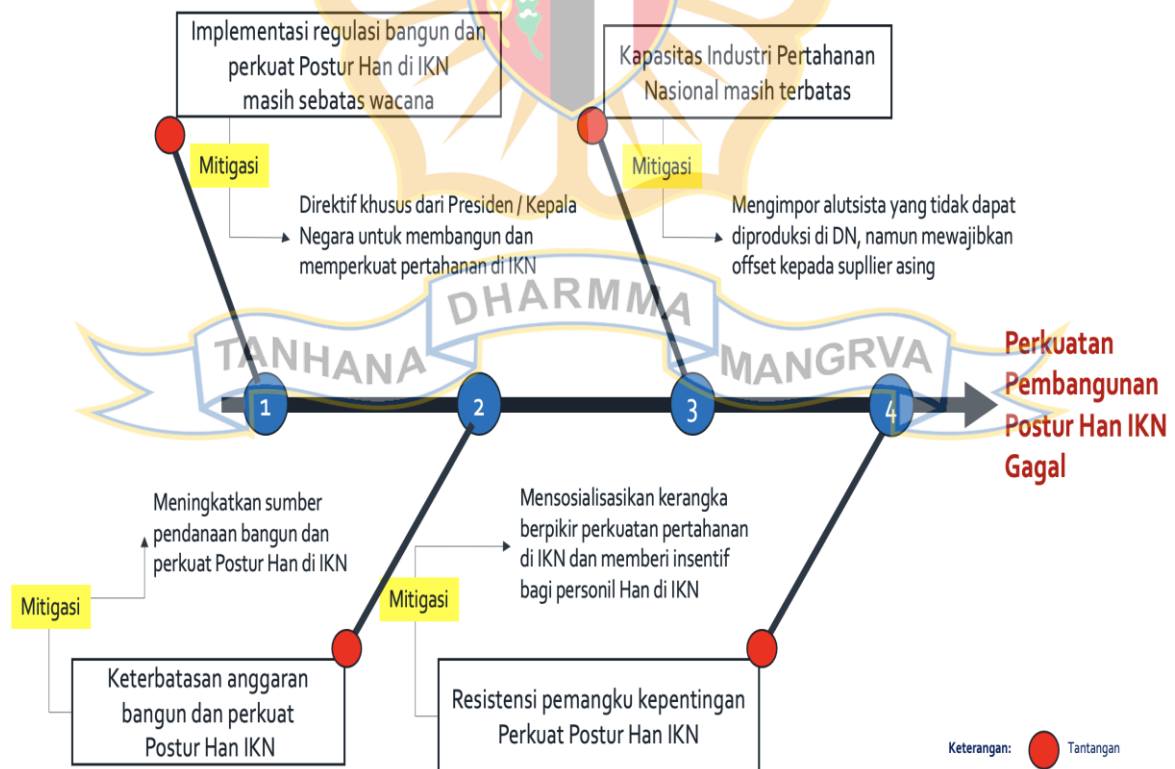
2 dan 3, yang didukung kemampuan teknologi alutsista pertahanan secara terbatas. Skenario ini merupakan skenario yang sedang berlaku saat ini di Indonesia. Selanjutnya **Skenario-3**, jika realisasi anggaran didukung *moderate* / sedang (sampai dengan 50% dari pagu optimum), pemeliharaan alutsista sudah dapat dilakukan secara *moderate* pula, dan peningkatan kekuatan pertahanan dapat dilakukan antara 25,1% sampai dengan 50% dari kondisi saat ini. Kekuatan pertahanan sudah mampu mengamankan secara optimal di Ring-1 dan 2, serta Ring-3 secara terbatas. Namun inter-operabilitas antar matra TNI belum dapat terwujud secara optimal, sehingga kekuatan pertahanan baru dapat dilakukan untuk mengamankan seluruh wilayah Kalimantan secara optimal dan wilayah diluar Kalimantan secara terbatas. Pada kondisi ini, Postur pertahanan sudah didukung oleh kemajuan teknologi/alutsista pertahanan yang cukup memadai. **Skenario-4**, jika realisasi dukungan pembangunan postur pertahanan dapat didukung secara memadai (sampai dengan sekitar 90% kebutuhan), dimana sudah dapat mewujudkan peningkatan kekuatan pertahanan antara 50,1% sampai dengan 90% dari kondisi saat ini. Kekuatan pertahanan sudah mampu secara dominan mengamankan seluruh wilayah Ring-1, 2 dan 3, serta didukung oleh teknologi militer yang berkemampuan tinggi. Dalam kondisi ini sudah dapat terbangun inter-operabilitas antar matra dengan baik dengan dukungan teknologi yang maju. Selanjutnya yang terakhir **Skenario-5**, apabila realisasi anggaran dapat terpenuhi secara optimal, maka peningkatan kekuatan pertahanan dapat dilakukan sampai mencapai kondisi optimum yang diharapkan. Kekuatan pertahanan mampu secara optimal mengamankan seluruh wilayah Ring-1, 2 dan 3 dengan dukungan teknologi alutsista modern pada generasi terbaru dan dapat terus dikembangkan kemampuannya.

Kelima skenario yang diuraikan diatas, lebih tepat dilihat sebagai suatu tahapan pencapaian sasaran, ketimbang sebagai opsi kebijakan, dimana yang menjadi variabel utama pencapaiannya adalah *political will* pemerintah, dalam hal ini Presiden yang dijabarkan oleh Menkeu dan Bapennas dalam bentuk realisasi dukungan anggaran, sementara pencanaan dan eksekusi program dilakukan oleh Menhan dan Panglima TNI. Jika divisualisasikan dalam skenario ganda, maka akan dapat digambarkan seperti di bawah ini :



**Gambar 21. Analisis Skenario Ganda – Pembangunan Postur Pertahanan di IKN**  
(Sumber : rekayasa penulis)

Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian pembangunan Postur Pertahanan yang optimal guna mengamankan dan mempertahankan IKN, penting sekali untuk dilakukan identifikasi terhadap sejumlah tantangan yang dapat menghambat pencapaian Pembangunan Postur Pertahanan yang tangguh. Dibawah ini penulis akan menyajikan *fishbone diagram*, yang terkait dengan tantangan pencapaian pembangunan Postur Pertahanan yang tangguh guna mengamankan IKN.



**Gambar 22. Fisbone Diagram – Pembangunan Postur Pertahanan di IKN**  
(Sumber : rekayasa penulis)

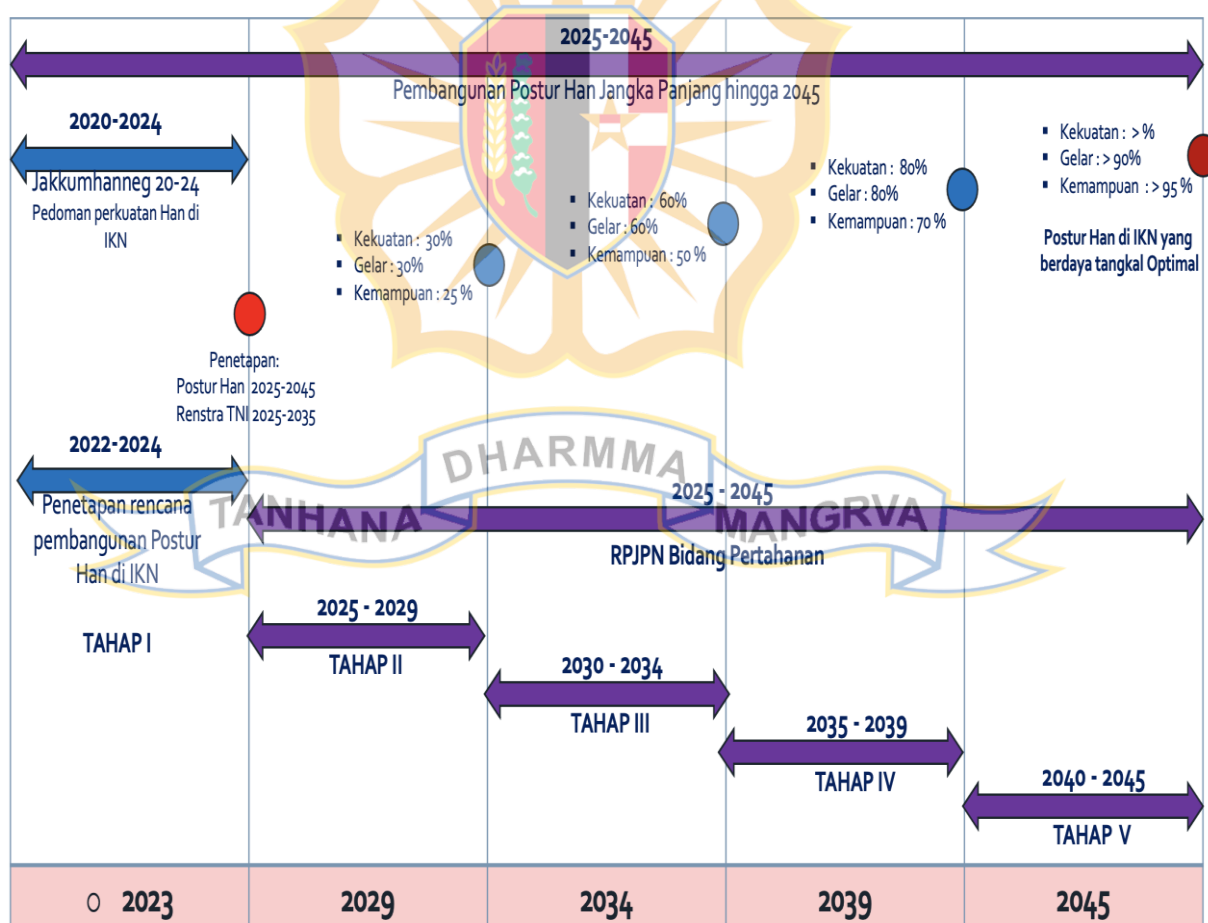


Jika berkaca pada kondisi saat ini, maka regulasi yang mendukung terhadap pembangunan Postur Pertahanan, khususnya dalam mengamankan IKN, sudah sangat memadai. Postur Pertahanan Negara saat ini telah dirumuskan mulai tahun 2022 sampai tahun 2045, dan akan dievaluasi berdasarkan dinamika perkembangan lingkungan strategis setiap 5 tahun. Yang menjadi masalah utama selama ini adalah ‘realisasi’ dukungan anggaran pertahanan yang jauh dari harapan dalam mewujudkan Postur Pertahanan yang ideal dan ini sangat dinamis dihadapkan pada kondisi ekonomi nasional dan *political will* dari Kepada Negara dan pembantunya di pemerintahan. Ditambah lagi adanya resistensi dari pemangku kepentingan lain yang merasa upaya memperkuat postur pertahanan sebagai pemborosan dan dinilai tidak mendesak, sehingga hal ini akhirnya berpengaruh pada keputusan dalam memperkuat Postur Pertahanan. Selanjutnya adalah keberadaan Industri Pertahanan (Inhan) nasional yang kapasitasnya masih terbatas. Harus diakui Inhan kita saat ini masih lebih banyak mengimpor komponen inti dalam memenuhi alutsista pertahanan, sehingga proses menuju ‘Kemandirian Inhan’ butuh perhatian khusus dari pemerintah. Dengan mewujudkan Kemandirian Inhan, maka negara akan dapat sangat berhemat dalam pemenuhan alutsista pertahanan, dan Inhan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang besar, seperti dilakukan oleh negara-negara lain yang memiliki kemandirian Inhan dan menjadi suplier alutsista negara – negara lain.

Kemudian, dengan masih banyaknya tantangan dalam upaya memperkuat Postur Pertahanan yang tangguh guna mengamankan IKN, penulis berupaya merumuskan solusi yang akan divisualisasikan melalui *GANTT Chart* yang digambarkan pada bagian selanjutnya. Titik awal dari *GANTT Chart* diambil mulai dari waktu saat ini sampai dengan tahun 2025, dimana modalitas yang dimiliki adalah sudah adanya Perpres tentang Jakumhanneg 2020 – 2024, yang dilanjutkan dengan rancangan Jakum hanneg 2025- 2029, serta Permenhan tentang Postur Pertahanan Negara 2020 – 2024 yang dilanjutkan rancangan Postur Hanneg 2025 – 2045 yang memproyeksikan pembangunan postur pertahanan yang dibangun secara ideal. Sehingga dalam dokumen strategis ini perlu diintegrasikan konsep penguatan postur pertahanan dalam rangka mengamankan IKN. Dalam rancangan Postur Hanneg 2025 – 2045, telah disiratkan terkait pembangunan IKN, yang

diuraikan dalam dokumen tersebut : “diperlukan sinkronisasi gelar kekuatan TNI secara terpadu dan integratif untuk dapat memperkuat pertahanan Ibu kota Nusantara sebagai simbol dan objek vital negara serta jalannya pemerintahan negara (*continuity of government*) ....”.

Pembangunan Postur Pertahanan di IKN dibagi menjadi 5 Tahapan pembangunan, selaras dengan tahapan pembangunan IKN yang telah dirancang oleh pemerintah. Tahap I (periode 2022 – 2023), Tahap II (periode 2024-2029), Tahap III (periode 2030-2034), Tahap IV (periode 2035-2039), dan Tahap V (periode 2040-2045). Dalam konteks ini, penulis menggunakan Tahun 2023 sebagai awal pemrograman sampai dengan Tahap I selesai diakhir tahun 2024. Pelaksanaan program pembangunan akan dimulai awal tahun 2025, diselaraskan dengan awal rezim pemerintahan yang baru, dan sesuai dengan rencana induk RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025 – 2045.



Keterangan: GANTT Chart diolah dari proyeksi Pembangunan Postur Han 2025-2045

**Gambar 23. GANTT Chart – Pembangunan Postur Pertahanan di IKN**  
(Sumber : rekayasa penulis)

Pada Tahap II (periode tahun 2024-2029), pembangunan Postur Pertahanan di IKN dilakukan untuk mencapai tingkat pencapaian Postur Pertahanan (meliputi pembangunan kekuatan, gelar kekuatan dan kemampuan pertahanan) dari 8 langkah strategis yang diuraikan penulis diatas, dengan sasaran :

- a. Pembangunan Kekuatan mencapai 30%.
- b. Pembangunan Gelar kekuatan mencapai 30%.
- c. Pembangunan Kemampuan pertahanan mencapai 25%.

Pada Tahap ini diharapkan Postur Pertahanan sudah mampu secara Optimal mengamankan Ring-1 serta Ring-2, 3 secara terbatas, dari semua potensi ancaman.

Pada Tahap III (periode tahun 2030-2034), pembangunan Postur Pertahanan di IKN dilakukan untuk mencapai Postur Pertahanan yang mampu secara optimal mengamankan wilayah Ring-1, 2 dan Ring-3 secara terbatas dari semua potensi ancaman, dengan sasaran:

- a. Pembangunan Kekuatan Pertahanan mencapai 60%.
- b. Pembangunan Gelar kekuatan pertahanan mencapai 60%
- c. Pembangunan Kemampuan pertahanan mencapai 50%.

Pada Tahap IV (periode tahun 2035-2039), pembangunan Postur Pertahanan di IKN dilakukan untuk mencapai Postur Pertahanan yang sudah mampu secara optimal mengamankan wilayah Ring-1, 2 dan 3 secara optimal, dari semua potensi ancaman, dengan sasaran:

- a. Pembangunan Kekuatan Pertahanan mencapai 80%.
- b. Pembangunan Gelar kekuatan pertahanan mencapai 80%.
- c. Pembangunan Kemampuan pertahanan mencapai 75%.

Dan pada Tahap V (periode tahun 2040-2045), yang pada akhir periodenya bertepatan dengan masa Indonesia Emas, pembangunan Postur Pertahanan di IKN dilakukan untuk mencapai Postur Pertahanan yang sudah mampu secara sangat optimal mengamankan seluruh wilayah Ring-1, 2 dan 3, dari semua potensi ancaman, dengan sasaran:

- a. Pembangunan Kekuatan Pertahanan mencapai > 90%.
- b. Pembangunan Gelar kekuatan pertahanan mencapai > 90%.
- c. Pembangunan Kemampuan pertahanan mencapai > 95%.

Pada tahun berikutnya setelah Tahap V ini akan terus dilakukan pembangunan kekuatan pertahanan, sesuai dengan potensi ancaman dan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, khususnya terkait pengamanan IKN.

Kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN menuntut perubahan dalam Strategi Pertahanan Negara yang adaptif. Sebagai simbol kedaulatan, IKN memerlukan Postur Pertahanan yang tangguh. Mengacu pada Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg), menekankan pentingnya pertahanan yang adaptif, sehingga hal ini memerlukan adaptasi Postur Pertahanan dan Strategi Pertahanan sesuai dengan karakteristik IKN. Beberapa strategi untuk meningkatkan Postur Pertahanan IKN antara lain: optimalisasi postur pertahanan militer dan nir-militer, penguatan kapasitas komando, pembentukan satuan baru TNI, pengembangan satuan gabungan, strategi A2/AW, hingga pemanfaatan teknologi modern dalam pertahanan. Ada 2 (dua) faktor penting dalam realisasi konsep strategis ini, yaitu “kemauan politik” dan ‘dukungan anggaran yang berkelanjutan’. Tanpa kedua faktor ini, realisasi penguatan postur pertahanan akan menghadapi hambatan. Oleh karena, untuk mendukung penguatan postur pertahanan di IKN, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah (*political will*), terutama dalam hal anggaran. Ketersediaan anggaran yang optimal akan memastikan realisasi penguatan Postur Pertahanan yang tangguh di IKN.



## BAB IV PENUTUP

### 16. Simpulan

a. Kondisi Postur Pertahanan di IKN saat ini perlu ditangani melalui pendekatan multidimensi. Meskipun TNI telah menggelar kekuatan pertahanan di seluruh Kalimantan, tetapi masih terdapat *gap* yang signifikan antara kebutuhan dan kondisi kapasitas pertahanan yang ada, sehingga mendorong perlunya langkah strategis penguatan Postur Pertahanan di IKN. Hambatan yang dihadapi meliputi isu-isu konflik perbatasan dan tantangan ekonomi terkait pembangunan dan pengelolaan sumber daya, sehingga diperlukan strategi holistik, termasuk langkah pemrograman terpadu dan penganggaran berkelanjutan. Pendekatan inklusif dalam pembangunan juga menjadi kunci untuk memastikan keamanan IKN. Penguatan Postur Pertahanan di IKN melalui identifikasi kelemahannya saat ini, dan penyelesaian hambatan dengan pendekatan komprehensif, diharapkan mampu mewujudkan stabilitas keamanan di wilayah IKN.

b. Lemahnya postur pertahanan berdampak sangat signifikan terhadap keamanan di IKN. Kelemahan Postur Pertahanan berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman ini tidak terbatas pada bentuk ancaman tradisional saja, tetapi juga mencakup ancaman non-tradisional seperti terorisme, spionase, dan serangan siber. Disamping itu, lemahnya Postur Pertahanan juga dapat merusak citra negara di mata dunia, mengundang perilaku oportunistik dari negara atau entitas yang memiliki agenda tertentu. Lebih jauh lagi, ketidakpastian keamanan dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di IKN, investasi dapat terhambat, dan masyarakat menjadi merasa tidak aman. Oleh karena itu, langkah memperkuat Postur Pertahanan dalam mengamankan IKN merupakan suatu keharusan yang mendesak. Penguatan ini perlu difokuskan pada kekuatan dan kemampuan pertahanan yang mampu menghadapi berbagai potensi ancaman.



Upaya ini membutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara berbagai lembaga terkait, termasuk TNI, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan memperkuat Postur Pertahanan di IKN akan dapat memastikan terwujudnya stabilitas keamanan di IKN dan seluruh wilayah Indonesia secara umum.

c. Penataan Postur Pertahanan dalam mengamankan IKN menjadi krusial seiring dengan kebijakan pemindahan ibu kota ke IKN. Perubahan ini menuntut transformasi dalam Strategi Pertahanan Negara, khususnya dalam hal penguatan Postur Pertahanan di IKN. Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) 2020 - 2024 menegaskan pentingnya adaptabilitas dalam pertahanan, menuntut penyesuaian Postur Pertahanan dengan karakteristik unik IKN dan perkembangan teknologi pertahanan. Beberapa strategi kunci telah diidentifikasi untuk meningkatkan Postur Pertahanan IKN, seperti optimalisasi penyelarasan Postur Pertahanan militer dan non-militer, penguatan kapasitas Kogabwilhan, pembentukan satuan baru TNI, pengembangan satuan MDTF, serta adaptasi strategi A2/AW dan teknologi modern dalam sistem pertahanan. Namun dalam implementasinya, ada dua faktor vital dalam mewujudkan konsep strategis ini, yaitu 'kemauan politik' dan 'dukungan anggaran yang berkelanjutan'. Tanpa dukungan politik yang kuat dan komitmen untuk mengalokasikan anggaran yang memadai-berkelanjutan, upaya penguatan Postur Pertahanan akan terhambat. Oleh karena itu, untuk mendukung penguatan Postur Pertahanan di IKN, "*political will*" dari pemerintah, terutama dalam aspek anggaran berkelanjutan, sangatlah penting. Ketersediaan anggaran yang memadai akan dapat memastikan implementasi yang efektif dari strategi penguatan Postur Pertahanan dalam menjaga keamanan di IKN.

## 17. Rekomendasi

Dari pembahasan diatas, untuk dapat merealisasikan langkah-langkah strategis yang diajukan oleh penulis, beberapa rekomendasi yang diajukan:

- a. **Presiden RI**, melakukan :
  - Mengambil keputusan memperkuat Postur Pertahanan Negara, sebagai bentuk "*political will*", dan memastikan adanya dukungan anggaran yang berkelanjutan dalam membangun Postur Pertahanan.

Langkah ini diambil Presiden sejak awal masa jabatan kepresidenannya (sejak awal tahun 2025), untuk dapat meyakinkan pembangunan Postur Pertahanan berjalan konsisten selama masa jabatannya.

b. **Menteri Pertahanan dan Panglima TNI**, melakukan:

- 1) Penataan ulang Strategi Pertahanan Negara serta memperkuat Postur Pertahanan Negara yang adaptif dan mampu mengamankan IKN serta seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Meyakinkan terdukungnya anggaran pertahanan yang optimal guna mewujudkan Postur Pertahanan Negara yang ideal.

Langkah ini dilakukan secara terintegrasi antar matra pada *kesempatan pertama* (Tahap I, sejak tahun 2023) dan terus dilakukan *sesuai periode pembangunan Postur Pertahanan Negara*.

c. **Ketua DPR, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas**, melakukan:

- Melakukan analisis tepat terhadap kebutuhan nyata anggaran dalam menata dan memperkuat Postur Pertahanan Negara guna mengamankan IKN, dan mengalokasikan anggaran pertahanan yang proporsional sesuai kebutuhan.

Langkah ini dilakukan secara konsisten, sejak awal tahap pemrograman pembangunan Postur Pertahanan, mulai Tahap I hingga Tahap V.

d. **Menteri Luar Negeri**, melakukan :

- 1) Diplomasi luar negeri yang konstruktif dengan negara tetangga dan kawasan, guna membangun hubungan positif, serta memastikan keamanan wilayah perbatasan dalam mencegah terjadinya konflik.
- 2) Mengingat posisi IKN yang semakin dekat dan terbuka dari perbatasan darat dan terlebih dari arah laut dengan negara tetangga, maka perlu dirumuskan pengendalian khusus atas jalur ALKI II, khususnya dalam pengawasan dan pengendalian terhadap armada militer asing untuk melintas dengan pola lintas damai / *innocent passage*. Dengan usulan instrumen nota diplomatik kepada PBB untuk pemberlakuannya. Dalam hal ini Menlu bekerjasama dengan Menkumham dan pejabat stakeholder terkait lainnya.

Diplomasi luar negeri dilakukan *secara terus menerus, sedini mungkin*, (sejak Tahap II) berdasar pada kebijakan politik luar negeri negara.

e. **Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)**, melakukan :

- 1) Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kebutuhan pertahanan di IKN dan seluruh pulau Kalimantan, secara terintegrasi.
- 2) Membangun infrastruktur pendukung pertahanan yang mampu mendukung tugas TNI dalam keadaan damai maupun darurat.

Langkah ini dilakukan pada *kesempatan pertama* (sejak Tahap I), guna meyakinkan semua infrastruktur yang dibangun terintegasi dengan kebutuhan pertahanan.

f. **Menteri Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara**, melakukan :

- Pengembangan infrastruktur siber dan teknologi informasi untuk mewujudkan keamanan digital di IKN dan seluruh wilayah Indonesia secara terintegrasi, serta melakukan pengembangan teknologi militer yang mampu mendukung tugas pertahanan.

Langkah ini dilakukan *sejak awal* (Tahap I) *dan sesuai dengan pentahapan pembangunan infrastruktur* di IKN.

g. **Menteri Dalam Negeri dan Kepala Otorita IKN**, melakukan :

- Koordinasi intensif dengan TNI dan pihak keamanan lainnya untuk mewujudkan keamanan wilayah guna mendukung pembangunan IKN.

Upaya ini dilakukan *sejak roda pemerintahan di IKN mulai berjalan* (Tahap I), terus menerus dan berkoordinasi dengan wilayah lain di Kalimantan.

h. **Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Ka Bais TNI dan Ka Baintelkam Polri**, melakukan:

- Identifikasi / pengumpulan informasi intelijen terkait potensi ancaman di IKN dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang harus diambil.

Langkah ini dilakukan *sejak awal proses pembangunan IKN dan secara terus menerus (Tahap I)*, agar dapat diyakinkan semua potensi ancaman yang ada.

Untuk mewujudkan ini semua, khususnya dalam memperoleh dukungan dari Kementerian/Lembaga diluar pertahanan, sangat dibutuhkan kemampuan komunikasi sosial dari pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI untuk meyakinkan semua *stakeholder* terkait bahwa konsep yang diajukan ini perlu didukung semua pihak.

**Lampiran :**

1. Alur Pikir
2. Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN & UNDANG-UNDANG

- UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- UU NRI No.34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia
- UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
- UU RI No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- Perpres No 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
- Perpres No 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN
- Perpres No 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN Tahun 2022-2042
- Permenhan No. 23 tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara tahun 2020 – 2024
- Permenhan RI No. 12 tahun 2023, tentang Doktrin Pertahanan Negara
- Jakum Hanneg tahun 2020 - 2024
- Kementerian Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015
- Kementerian Pertahanan RI, Postur Pertahanan Negara 2015
- Konsep Umum Operasi Kogabwilhan TNI, KEP Pang TNI Nomor KEP/1124/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019

### BUKU-BUKU

- Acuto, M. (2013). Global cities, governance and diplomacy: The urban link. Routledge
- Brenner, N., Keil, R. (2006). The Global Cities Reader. Routledge
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers
- Carter, David L., et al. "Multi-Domain Battle: Evolution of Combined Arms for the 21st Century 2025-2040." U.S. Army Training and Doctrine Command, 2017
- Dampak Sosial Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap Masyarakat Lokal dan Adat: Studi Kasus di Kalimantan Timur" oleh A. Suryanto dan H. Pramono
- Florida, R. (2008). Who's your city?: How the creative economy is making where to live the most important decision of your life. Basic books
- Florida, R. (2017). The New Urban Crisis. Basic Books
- Hukum, Masyarakat Adat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di IKN: Suatu Tinjauan Kritis" oleh B. Irawan dan A. Supriatna



- Kementerian PPN/Bapennas RI, Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara
- Khanna, P. (2019). "The Future is Asian". Simon & Schuster
- Mustopo, H. "Urbanisasi dan Implikasi Sosial Ekonominya." Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, vol. 2, no. 1, 2012
- Pembangunan Infrastruktur Digital dalam Konteks Ibu Kota Negara Baru: Studi Kasus IKN" oleh B. Wijaya dan S. Purnomo
- Pembangunan IKN dan Implikasinya terhadap Lingkungan: Sebuah Studi Ekologi Politik" oleh S. Pramono dan R. Sutanto
- Pembangunan Infrastruktur dan Manajemen Sumber Daya Alam di Ibu Kota Baru Indonesia" oleh Fadhil Hasan dan T. Hidayat
- Pribadi, K.S., and H. Sengara. "Pencegahan Bencana sebagai Bagian dari Pertahanan Negara." Journal of Defence and Security, vol. 2, no. 2, 2022
- Suri, J. (2020). "The End of American World Order". Polity
- Studi Keamanan dan Sosial Ibu Kota Nusantara, Pusat Penelitian Keamanan Nasional, 2023
- Tatham, M. (2014). The Politics of Security. Routledge
- Bahan Ajar Lemhannas RI, Bidang Studi Kewaspadaan Nasional, Tahun 2023
- Kenneth Waltz (1959). Man, The State and War.
- Edward Luttwalk (1987). Strategy: The Logic of War and Peace.

## JURNAL

- Arifin, Z. "Migrasi dan Potensi Konflik Sosial: Studi Kasus Transmigrasi di Indonesia." Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, vol. 3, no. 1, 2014
- Babbage, Ross. "Defining a Strategy for Australia's Maritime Air Warfare Requirements." Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2020
- Beckman, R. (2013). "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea". American Journal of International Law, 107
- Chatterjee, D. (2020). The Role of the Capital City in Nation Building. International Journal of Social Sciences and Humanities
- Dinamika Desentralisasi di Indonesia: Pertimbangan untuk Ibu Kota Baru", Samsu Rizal Panggabean dan Riwanto Tirtosudarmo
- Gormley, Dennis M., et al. "A Potent Vector: Assessing Chinese Cruise Missile Developments." Joint Force Quarterly 75, 2014
- Jaishankar, D. (2020). "The Quad and the Free and Open Indo-Pacific". The Washington Quarterly, 43(1)
- Laksmiana, Evan A. "Pertahanan dan Keamanan dalam Perubahan Ibu Kota." CSIS Commentaries, no. DMRU-020-IDN. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2020

- Maharani, D., & Prabowo, R. (2025). Anggaran Pertahanan Indonesia: Sebuah Analisis Komparatif. *Journal of Defence and Security*, 4(1), 45-60
- Nugroho, R., & Wahyudi, S. (2024). Prioritas dan Efisiensi Anggaran Pertahanan Indonesia. *Journal of Defence and Security*, 3(2), 70-85
- Permadi, D., and Y. Sudibyo. "Analisis Kerentanan Infrastruktur Kritis dalam Konteks Keamanan Nasional." *Journal of Defence and Security*, vol. 4, no. 2, 2023
- Prasetyo, B., & Rahmanto, Y. (2022). Menghadapi Tantangan Pertahanan di IKN: Perlunya Alokasi Anggaran Khusus. *Journal of Defence and Security*, 1(1)
- Pribadi, K.S., and H. Sengara. "Analisis Resiliensi Infrastruktur Kritis untuk Pertahanan Negara: Studi Kasus Sistem Energi Jakarta" *Journal of Defence and Security*, vol. 4, no. 2, 2022
- Satria, A. "Strategi Pertahanan dan Keamanan dalam Konteks Pembangunan Ibu Kota Baru." *Journal of Defence and Security*, vol. 5, no. 1, 2023
- Saunders, P. C. (2020). "China's Rising Power, the U.S. Rebalance to Asia, and Implications for U.S.-China Relations". *Issues & Studies*
- Setiawan, R. (2019). *The Dynamics of Capital City Relocation: Comparative Study on Brazil and Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)
- SIPRI (2023). "Emerging military technologies: Implications for the arms race, arms control and disarmament". *SIPRI Yearbook 2023*. Stockholm International Peace Research Institute
- Supriyadi. "Pertahanan Sistem Infrastruktur Kritis Nasional" *Journal of Defence and Security*, vol. 3, no. 1, 2022
- "The Role of Joint Operations in the Evolution of Airpower." *Air and Space Power Journal*, 2021
- The Military Balance (2023). *The International Institute for Strategic Studies (IISS)*.
- Tow, W. T., & Kersten, R. (2022). "The Implications of the AUKUS Pact". *Australian Journal of International Affairs*
- United Nations (2023). "Non-Traditional Security Threats in the 21st Century: A Comprehensive Overview". *United Nations Publications*
- Zakir, I. A., Akhtar, P., & Karim, M. Z. A. (2021). Capital Relocation: Towards New Infrastructure Development. *Journal of Construction in Developing Countries*

## INTERNET

- Department of Defense, "Joint Operational Access Concept (JOAC)," January 17, 2012. [https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/JOAC\\_Jan%202012\\_Signed.pdf](https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/JOAC_Jan%202012_Signed.pdf)
- Pemindahan IKN Ditaksir Boroskan Anggaran Hingga Rp 466 Triliun". *Kontan.co.id*. Retrieved from <https://www.kontan.co.id/news/pemindahan-ibukota-negara-ditaksir-boroskan-anggaran-hingga-rp466-triliun>
- World Bank (2009). *Reshaping Economic Geography*. World Development Report

## LAIN-LAIN

Analisis Ekonomi dan Keamanan Ibu Kota Nusantara, Lembaga Riset Ekonomi dan Keamanan Nasional, 2023

Ancaman Militer Aspek Laut, Srenal (2022)

Ancaman Militer Aspek udara, Srenaau (2022)

Badan Siber dan Sandi Negara (2021). Laporan Tahunan BSSN 2020. BSSN

Badan Keamanan Laut. (2022). Pelanggaran Kapal Asing di ALKI. Jakarta: Bakamla

BSSN (2023). "Cyber Security Strategy for National Defense". Badan Siber dan Sandi Negara

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2022). Pelanggaran Ruang Udara Kalimantan. Jakarta: DJPU

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). Data Penyelundupan Barang di Perbatasan Kalimantan. Jakarta: DJBC

International Telecommunication Union (2020). Global Cybersecurity Index. ITU

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

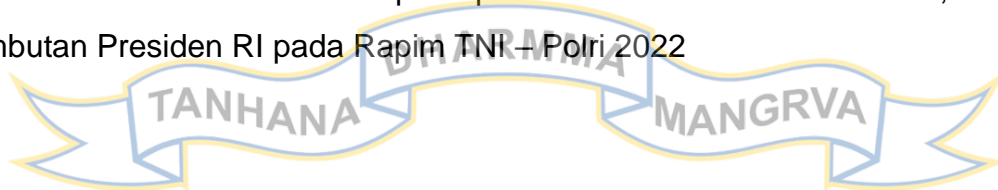
Kemhan RI (2021). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2021. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan RI. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

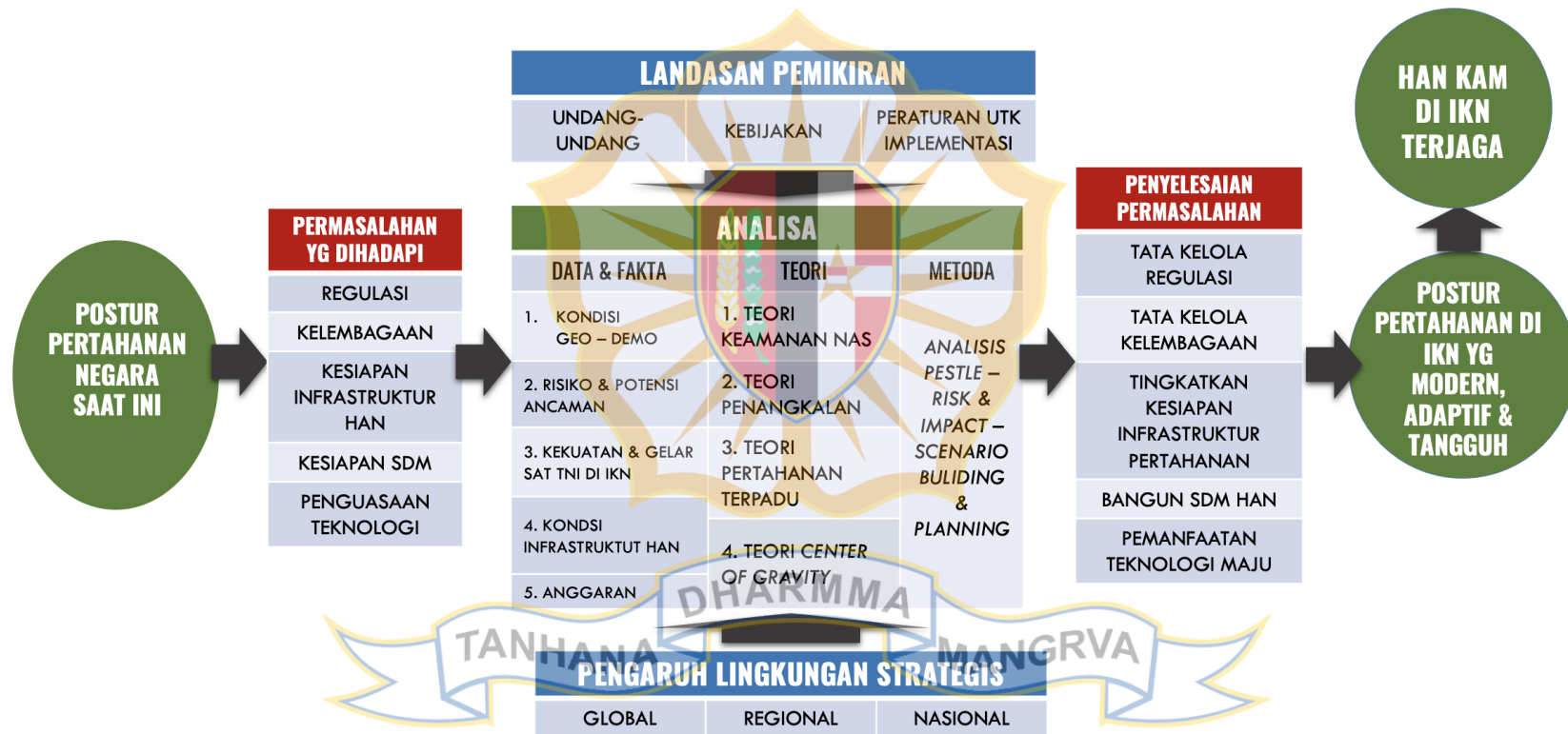
Perkiraaan Ancaman Militer Aspek Laut, Srenad (2022)

Paparan Menteri Pertahanan kepada peserta PPRA 65 Lemhannas RI, Mei 2023

Sambutan Presiden RI pada Rapim TNI – Polri 2022



**ALUR PIKIR**  
**MEMPERKUAT POSTUR PERTAHANAN**  
**GUNA MENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN**  
**IBU KOTA NUSANTARA (IKN)**



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**DATA POKOK**

1. NAMA : JONATHAN BINSAR P. SIANIPAR
2. PANGKAT/KORP/NRP : BRIGADIR JENDERAL TNI
3. JABATAN TERAKHIR : STAF AHLI KASAD
4. TANGGAL LAHIR : 01-02-1972
5. TEMPAT LAHIR : BANJARMASIN
6. AGAMA : KRISTEN PROTESTAN
7. GOLONGAN DARAH : B

**PENDIDIKAN**

**a. PENDIDIKAN UMUM**

- |    |               |       |      |
|----|---------------|-------|------|
| 1) | SEKOLAH DASAR | TAHUN | 1985 |
| 2) | SMP           | TAHUN | 1987 |
| 3) | SMA           | TAHUN | 1990 |
| 3) | S1            | TAHUN | 2013 |
| 4) | S2            | TAHUN | 2018 |

**b. PENDIDIKAN MILITER**

- |    |                        |       |      |
|----|------------------------|-------|------|
| 1) | DIKBANGUM              |       |      |
| a) | AKMIL                  | TAHUN | 1993 |
| b) | SUSSARCAB INF          | TAHUN | 1994 |
| c) | SUSLAPA INF            | TAHUN | 2003 |
| d) | SESKOAD                | TAHUN | 2007 |
| e) | SESKO TNI              | TAHUN | 2016 |
| f) | PPSA XXIV LEMHANNAS RI | TAHUN | 2023 |



## 2) DIKBANGSPES

a)	LAT SAR PARA	TAHUN	1994
b)	LAT KOMANDO	TAHUN	1995
c)	SUS JUMP MASTER	TAHUN	1995
d)	SUS BAHASA INGGRIS	TAHUN	2000
e)	SUS DANKI	TAHUN	2002
f)	TERORISM IN LOW INTENSIVE	TAHUN	2007
g)	SUS JEMENDIK	TAHUN	2010
h)	SUS PANDU UDARA	TAHUN	2010
i)	TAR DANDIM	TAHUN	2011
j)	SUS DANREM	TAHUN	2017

**RIWAYAT JABATAN**

a.	PAMA PUSSENIF	TAHUN	1994
b.	PAMA KOPASSUS	TAHUN	1994
c.	DANUNIT-1/2/3 YON 21 GRUP 2	TAHUN	1996
d.	DANTON-3 KI-1 YON 22 GRUP 2	TAHUN	1996
e.	DANKI 3 YON 22 GRUP 2	TAHUN	1997
f.	KASI LOG YON 22 GRUP 2	TAHUN	1998
g.	KASI PERS YON 22 GRUP 2	TAHUN	1999
h.	KASI OPS YON 22 GRUP 2	TAHUN	2000
i.	PASI LAT GRUP 2	TAHUN	2002
j.	KASI OPSDIK PUSDIK KOPASSUS	TAHUN	2003
k.	DANSUSKO SEKO PUSDIKPASSUS	TAHUN	2005
l.	PABANDYA ORGAS SOPS KOPASSUS	TAHUN	2007
m.	DANYON 13 GRUP 1 KOPASSUS	TAHUN	2008
n.	DANSEKO PUSDIKPASSUS	TAHUN	2010
o.	WAASOPS DANJEN KOPASSUS	TAHUN	2012
p.	WADAN GRUP 1/PARAKO KOPASSUS	TAHUN	2013
q.	DANGRUP 1/PARAKO KOPASSUS	TAHUN	2014
r.	ASOPS DANJEN KOPASSUS	TAHUN	2014
s.	PAMEN DENMA MABESAD (DIK SESKO TNI)	TAHUN	2016
t.	DANMENTAR AKMIL	TAHUN	2017

u.	DANREM 172/PWY DAM XVII/CEN	TAHUN	2018
v.	DIRKERSINHAN KEMHAN	TAHUN	2020
w.	KASDIVIF 1 KOSTRAD	TAHUN	2022
x.	STAF KHUSUS KASAD (DIK PPSA XXIV LEMHANNAS)	TAHUN	2023

### RIWAYAT PENUGASAN

#### 1. DALAM NEGERI

a.	TIMOR TIMUR	TAHUN	1995
b.	AMBON	TAHUN	2000
c.	POSO	TAHUN	2004
d.	PAPUA	TAHUN	2018

#### 2. LUAR NEGERI.

a.	SINGAPURA (DIK)	TAHUN	2002
b.	AMERIKA SERIKAT (DIK)	TAHUN	2008
c.	BRUNEI DARUSSALAM (DIK)	TAHUN	2010
d.	AUSTRALIA (LATMA)	TAHUN	2014
e.	FINLANDIA (OBSERVE)	TAHUN	2014
f.	CHINA (LATMA)	TAHUN	2016
g.	AMERIKA (IUSSD)	TAHUN	2020
h.	RUSIA (ARNEX)	TAHUN	2020
i.	INGGRIS (JDCC)	TAHUN	2021
j.	AMERIKA (IUSSD)	TAHUN	2021
k.	PERANCIS (IFDD)	TAHUN	2021
l.	ITALIA (JDCC-ITALIA)	TAHUN	2021
m.	RUSIA (ARNEX)	TAHUN	2021

### DATA KELUARGA

1. NAMA LENGKAP ISTRI : IRIANTI CHENDRA DEWI, S.H
2. JUMLAH ANAK : 3 (TIGA)
  - Joshua Immanuel B. Sianipar
  - Joseph Hasiholan Sianipar
  - Jesaya Giovanni Sianipar